SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T.**
   Alamat : Jalan Wiyung Indah Blok L/ 1-A, RT.001, RW.006 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur.
2. Nama : **Zahrul Azhar Asumta, S.Ip., M. Kes.**
   Alamat : Dusun Pesantren, RT. 027, RW.004, Kelurahan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ronny B. Talapessy S.H., M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Tanda Perdamaian, S.H., Abd. Aziz, S.H., Abdul Rohman, S.H., Fuad Abdullah, S.Th.i., S.H., M.H., Hariyanto, S.H., Harli, S.H., M.A., M.T., dan Triwiyono Susilo, S.H., Advokat dari Tim Hukum Risma – Gus Hans, beralamat di Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 57, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1, Surabaya;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/SKK/A.1/LO-JV&P/I/2025, tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., Hepri Yadi, S.H.,

M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes., Sholahudin Aliy, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Hartono, S.H., M.H., Sudarmanto, S.H., M.H., Muhtar Hadi Wibowo, S.H., M.H., Suci Azkiya, S.H., Grecelda Theresia Simanjuntak, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., Clarisa Permata Hasian, S.H., Advokat/Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, beralamat di Graha Hanurata 5th *Floor Suite* 509-510, Jalan Kebon Sirih, Kavling 67-69, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II. 1. Nama : **Khofifah Indar Parawansa.**

Alamat : Jalan Jemursari VIII/124, RT/RW: 009/005, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

2. Nama : **Emil Elestianto Dardak.**

Alamat : Jalan Pemuda, Nomor 1, RT/RW: 004/002, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., Sordame Purba, S.H., Andra Reinhard, S.H., M.H., Donni Siagian, S.H., Alex Argo Hernowo, S.H., M.H., Nurul Firdausi, S.H., Endar Sumarsono, S.H., M.H., Mohammad Mirza Rafeli, S.H., Djuli Edy, S.H., M.H., Edward Dewaruci, S.H., M.H., Zaenal Fandi, S.H., M.H., Habib Zaini, S.H., H.RB. Zainal Arifin, S.H., M.Hum., Dr. Syaiful Ma'arif, S.H., M.H., Mirza Julma Sampurna, S.H., M.H., Bambang Wahyu Widodo, S.H., M.H., Ali Subekan, S.H., M.H., Dedy

Prasetyo, S.H., M.H., dan Arip Imawan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Khofifah – Emil, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 23.23 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB, adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara di

Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Dengan demikian, keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-undang adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 6/2020), perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, selain daripada itu juga sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”;

c. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemelihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;
b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB;
c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan; c. Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Ditetapkan Di Surabaya Pada Tanggal 22 September 2024 merupakan Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (Bukti P-4);
c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah

peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-5);

d. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah;

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	< 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.00 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

e. Bahwa jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 41.814.500 jiwa (empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus) yang Pemohon akses melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024) (Bukti P-6), berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara tertinggi paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

f. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 20.732.592 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara, sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 20.732.592 Suara sah = 103.663 Suara;

g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2

(dua) adalah sebesar 5.913.724 (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) Suara;

h. Bahwa berdasarkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) dikarenakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan disebabkan adanya pelanggaran berupa: penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara;

i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (anatara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah

Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB (penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024).

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	**1.797.332** (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2	**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK**	**12.192.165** (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	**6.743.095** (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	**20.732.592** (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua)
TOTAL SUARA TIDAK SAH		**1.204.610** (**satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)**

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, perbandingan perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK**	**12.192.165** (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	**6.743.095** (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
TOTAL SELISIH SUARA		**5.913.724 (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh empat)**

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	**1.797.332** (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2	**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK**	**5.851.001** (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu satu)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	**6.743.095** (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	14.391.428 (Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan)
TOTAL SUARA TIDAK SAH		1.204.610 (**satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)**

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon Tersebut disebabkan adanya:
   a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni Paslon 03 sejumlah 69,407 suara, sementara Paslon 02 sejumlah 906,768 suara dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara di 3.900 TPS yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan parahnya Paslon 03 tidak mendapatkan suara atau (0 suara)/Nihil;
   b. Bahwa terdapat suara tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8% persen, Pasuruan 8,5% persen, Jombang 8,3% persen dan Bojonegoro 7,7% persen. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota, dengan indikasi: Terdapat 4.174 TPS yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota memiliki suara tidak sah lebih dari 10 persen atau total 210.584 suara, tertinggi terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bojonegoro. Selisih suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS dengan Paslon 03 adalah 549.922 suara;
   c. Bahwa adanya penambahan suara bagi pasangan Paslon 02 di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS yakni, Terdapat 34.282 TPS (tersebar di 38 Kabupaten/Kota) yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali sebesar 822.511 (tertinggi terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban). Dengan selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan paslon 03 adalah 4.614.244 suara, Bahwa, terdapat total suara tidak sah sebanyak 1,204,610 suara atau 5,5%, tertinggi di kabupaten Pasuruan;
5. Bahwa menurut Pemohon, hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara di beberapa kabupaten/kota tersebut, bentuk pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon, secara garis besar adalah pelaksanaan

penghitungan surat suara bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

KRONOLOGIS DUGAAN PELANGGARAN PILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR JAWA TIMUR 2024.

A. Manipulasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024

1. Bahwa, Stabilitas Suara Paslon 02 yang Tidak Wajar, Bahwa tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi yang berlangsung pada 27 November 2024, mulai pukul 15.00 WIB, menunjukkan pola yang tidak wajar:
   a. Proses penghitungan suara menunjukkan stabilitas persentase suara Paslon 02 sebesar 58,54% dari awal hingga akhir rekapitulasi, bahkan ketika data masuk lebih dari 87,58% (24 November 2024 pukul 21.00 WIB) hingga mencapai 100% (28 November 2024 pukul 10.00 WIB), tidak ada fluktuasi persentase yang mencerminkan masuknya data dari berbagai wilayah dengan karakteristik pemilih yang berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya pengondisian atau manipulasi hasil suara secara terstruktur dan sistematis.
   b. Bahwa selanjutnya, diperkuat dengan dugaan pelanggaran aparat pada pukul 17.54 WIB 27 November 2024 Mantan Presiden Jokowi Telepon video kepada Paslon Khofifah Indar Parawangsa – Emil Dardak mengucapkan selamat atas angka yang sudah fiksi itu.
2. Bahwa, telah terjadi Manipulasi Sistem Rekapitulasi Sirekap, dugaan manipulasi dalam sistem rekapitulasi (Sirekap) menjadi penyebab stabilitas suara Paslon 02. Yang terjadi di situs Pilkada 2024 KPU https://pilkada2024.kpu.go.id/ Indikasi utama adalah: Data TPS yang dimasukkan ke Sirekap diduga disaring atau diseleksi untuk menciptakan stabilitas persentase suara. dan TPS dengan pola suara yang tidak mendukung stabilitas ini kemungkinan besar tidak dikonfigurasi atau setting ke dalam sistem;
3. Bahwa, Manipulasi Dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di TPS, Bahwa berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian: Penggunaan TipEx untuk menghapus perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara Paslon 02 tetap signifikan; Pencoretan hasil suara Paslon 03 untuk menurunkan angka suara,

sehingga perolehan suara tidak mencerminkan hasil sebenarnya; Pengiriman dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur ganda, yakni C.Hasil-KWK-Gubernur versi awal dan C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan, dengan perbedaan hasil suara yang mengindikasikan adanya upaya mengubah hasil pilkada;

4. Bahwa, Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tidak Sesuai Ketentuan atau Nilai partisipasi Pemilih yang tinggi: Penggunaan DPT hampir 90-100%. Selain itu terdapat 2.780 TPS dengan penyelenggaraan tidak sesuai ketentuan, menghasilkan suara untuk Paslon 02 sebesar 743.784 suara, dengan indikasi, Penggunaan DPT hampir 90-100%, terutama di wilayah (Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan). Penggunaan DPT 100% di seluruh TPS di 13 desa di Sampang dan 2 desa di Pamekasan;
5. Bahwa, Ketidaksesuaian Jumlah Pemilih Pilgub Dibandingkan Pilbup/Pilwali Bahwa terdapat 179 TPS yang menghasilkan suara untuk Paslon 02 sebesar 28.986 suara, dengan indikasi: Jumlah pemilih Pilgub lebih besar daripada Pilbup/Pilwali, dengan selisih yang melebihi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Ketidakwajaran ini ditemukan di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri;
6. Bahwa, Terdapat penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadi selisih angka perolehan Paslon 03 sejumlah 69.407 bahwa seterusnya Paslon 02 sejumlah 906.768 dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837.361 suara di 3.900 TPS yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan indikasi:
   a. Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan
   b. Bahkan ada yang tidak mendapatkan suara atau (0 suara).
7. Bahwa, Terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8% persen, Pasuruan 8,5% persen, Jombang 8,3% persen dan Bojonegoro 7,7% persen. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota, dengan indikasi:
   a. Terdapat 4.174 TPS yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota memiliki suara tidak sah lebih dari 10 persen atau total 210.584 suara, tertinggi terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan

Kabupaten Bojonegoro. Selisih suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS dengan Paslon 03 adalah 549.922 suara.

b. Terdapat 34.282 TPS (tersebar di 38 Kabupaten/Kota) yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali sebesar 822.511 (tertinggi terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban). Dengan selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan paslon 03 adalah 4.614.244 suara.
c. Bahwa, terdapat total suara tidak sah sebanyak 1,204,610 suara atau 5,5%, tertinggi di kabupaten Pasuruan;
d. Bahwa, Pengalihan Suara dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur ke Formulir D.Hasil-Prov-KWK-Gubernur terdapat pengalihan suara Paslon 01 dan Paslon 03 saat rekapitulasi dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur (TPS) ke Formulir D.HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur, sehingga suara untuk Paslon 02 menjadi meningkat signifikan;
e. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024 telah berlangsung penyaluran Penerima Bansos PKH di Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah 1.467.753 Keluarga, sementara Penerima PKH beranggota Keluarga Penerima Bansos PKH Jawa Timur (yang berusia di atas 18 tahun) sebanyak 3.555.409 Jiwa;
f. Bahwa, Menurut keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu, 13 November 2024;

B. Analisa Data

Bahwa kecurangan yang terjadi di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Mojokerto, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kota Kediri, Jombang, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan atau nilai partisipasi pemilih yang tinggi. Dengan nilai partisipasi pemilih yang tinggi mengindikasikan bahwa adanya kecurangan di dalam pemilihan Pilkada Jawa Timur dan adanya dugaan untuk menstabilkan persentase suara Paslon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 02 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

Bahwa penggunaan DPT 90-100% terdapat 2.780 TPS yang tersebar di 36 Kabupaten Kota, dimana presentase terbesar berada di Kabupaten Sampang 53,57%, Pamekasan 45,43%, Bangkalan 27,77%, Sumenep 15,68% dan Mojokerto 15,45%, dengan penyelenggaraan tidak sesuai ketentuan, menghasilkan suara untuk Paslon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 02 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebesar 946.415 suara. **(Bukti P.7)**

(1) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100% **(Bukti P.8);**
(2) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 tidak 100% kehadiran (Bukti P. 9)
(3) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100% **(Bukti P.10);**
(4) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 tidak 100% kehadiran (Bukti P.11)
(5) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bondowoso, Bondowoso, Pancoran TPS 07 100% **(Bukti P.12)**
(6) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Bondowoso, Bondowoso, Pancoran TPS 07 tidak 100% kehadiran (Bukti P.13)
(7) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100% **(Bukti P.14);**
(8) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 tidak 100% kehadiran (Bukti P.15)
(9) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Lamongan, Paciran, Weru TPS 06 100% **(Bukti P.016)**
(10) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Lamongan, Paciran, Weru TPS 06 tidak 100% (P.17);
(11) Bahwa penggunaan DPT 95,69% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Tarik, Segodobancang TPS 02 **(Bukti P.18);**
(12) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Sidoarjo, Tarik, Segodobancang TPS 02 tidak 95,69% (Bukti P.19);
(13) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sumenep, Arjasa, Buddi TPS 03 **(Bukti P.020);**
(14) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Sumenep, Arjasa, Buddi TPS 03 tidak 100% (Bukti P.21);

(15) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di KabupatenSumenep, Arjasa, Angonangon TPS 07 **(Bukti P.22);**

(16) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean TPS 04 100% **(Bukti P.23);**

(17) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean TPS 04 tidak 100% (Bukti P.24);

(18) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Wongsorego, Bajulmati TPS 09 100% **(Bukti P.24);**

(19) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean TPS 04 tidak 100%;

(20) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean TPS 04 tidak 100% (Bukti P.25);

(21) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Balen, Mayangkawis TPS 01 100% **(Bukti P.25 A)**

(22) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap di Kabupaten Bojonegoro, Balen, Mayangkawis TPS 01 tidak 100% (Bukti P. 25 B).

(23) Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kapas, Mojodeso, TPS 04 100% (Bukti P.25 C)

(24) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Bojonegoro, Kapas, Mojodeso, TPS 04 tidak 100% (Bukti P.25 D)

Bahwa di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan ditemukan penggunaan DPT 100% di seluruh TPS yang ada di 15 Desa, sementara daftar hadir tidak 100% dan memanipulasi daftar kehadiran, ini menunjukkan adanya kecurangan agar memenuhi target kemenangan dari Paslon 02 sebesar 58,72 %; (Bukti P.26)

(25) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 01 (Bukti P.27) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.28)

(26) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 02 (Bukti P.29) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.30)

(27) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 03 (Bukti P.31) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.32)

(28) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 04 (Bukti P.33) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.34)

(29) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 05 (Bukti P.35) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.36)

(30) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 06 (Bukti P.37) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.38)

(31) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 01 (Bukti P.39) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.40)

(32) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 02 (Bukti P.41) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.42)

(33) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 03 (Bukti P.43) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.44)

(34) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 04 (Bukti P.45) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.46)

(35) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 05 (Bukti P.47) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.48)

(36) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 06 (Bukti P.49) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.50)

(37) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 07 (Bukti P.51) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.52)

(38) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA Terdapat di TPS 01 (Bukti P.53) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.54) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang

Kecamatan Desa NEPA Terdapat di TPS 02 (Bukti P.55) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.56)

(39) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA Terdapat di TPS 03 (Bukti P.57) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.58)

(40) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA Terdapat di TPS 04 (Bukti P.59) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.60)

(41) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA Terdapat di TPS 05 (Bukti P.61) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.62)

(42) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA Terdapat di TPS 06 (Bukti P.63) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.64)

(43) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa PLANGGARAN TIMUR di TPS 01 (Bukti P.65) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.66)

(44) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa PLANGGARAN TIMUR di TPS 02 (Bukti P.67) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.68)

(45) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa PLANGGARAN TIMUR di TPS 03 (Bukti P.69) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.70)

Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 01 (Bukti P.71) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.72)

Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 02 (Bukti P.73) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.74)

(46) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 03 (Bukti P.75) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.76)

(47) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 04 (Bukti P.77) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.078)

Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 05 (Bukti P.79) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.80)

(48) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TRAPANG di TPS 01 (Bukti P.81) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.082)

(49) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TRAPANG di TPS 02 (Bukti P.83) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.84)

(50) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TRAPANG di TPS 03 (Bukti P.85) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.086)

(51) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 01 (Bukti P.87) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.088)

(52) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 02 (Bukti P.89) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.90)

(53) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 03 (Bukti P.91) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.92)

(54) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 04 (Bukti P.93) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.94)

(55) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 05 (Bukti P.95) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.96)

(56) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 06 (Bukti P.97)

tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.098)

(57) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 07 (Bukti P.99) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.100)

(58) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 01 (Bukti P.101) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.102)

(59) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 01 (Bukti P.103) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.104)

(60) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 02 (Bukti P.105) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.206)

(61) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 03 (Bukti P.107) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.108)

(62) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 04 (Bukti P.109) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.110)

(63) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 05 (Bukti P.111) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.112)

(64) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 06 (Bukti P.113) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.114)

(65) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 07 (Bukti P.115) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P. 116)

(66) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 08 (Bukti P.117) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.118)

(67) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 09 (Bukti P.119) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.120)

(68) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 10 (Bukti P.121) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.122)

(69) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 11 (Bukti P.123) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.124)

(70) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS, TPS 01(Bukti P.125) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.125 A)

(71) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 02 (Bukti P. 126) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.127)

(72) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 03 (Bukti P.128) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.129)

(73) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 04 (Bukti P.130)

tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.131)

(74) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 05 (Bukti P.132) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.133)

(75) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 06 (Bukti P.134) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.135)

(76) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 07 (Bukti P.136) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.137)

(77) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 01 (Bukti P.138) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.139)

(78) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 02 (Bukti P.140) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.141)

(79) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 03 (Bukti P.142) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.143)

(80) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 04 (Bukti P.144) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.145)

(81) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 05 (Bukti P.146) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.147)

(82) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 06 (Bukti P.148) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.149)

(83) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 07 (Bukti P.150) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.151)

(84) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 08 (Bukti P.152) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.153)

(85) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 01 (Bukti P.154) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.155)

(86) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 02 (Bukti P.156) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.157)

(87) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 03 (Bukti P.158) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.159)

(88) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 04 (Bukti P.160) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.161)

(89) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 01 (Bukti P.162) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.163)

(90) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 02 (Bukti P.164) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.165)

(91) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 03 (Bukti P.166) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.167)

(92) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 04 (Bukti P.168) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.169)

(93) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 05 (Bukti P.170) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.171)

(94) Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 06 (Bukti P.172) tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukan hal berbeda (Bukti P.173)

C. Analisa Hukum

1. Bahwa Pilkada Jawa Timur 2024 mencatat sejumlah pelanggaran serius yang memenuhi kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis di tingkat TPS tetapi juga terindikasi melibatkan struktur penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota, hingga KPU provinsi. Indikasi kuat ini menunjukkan adanya pengaturan hasil pemilu secara terencana yang mencederai integritas demokrasi.
2. Bahwa, di tingkat TPS, manipulasi terlihat melalui pengubahan data pada Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK-Gubernur ganda dengan hasil berbeda. Proses ini didukung oleh ketidakwajaran seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 100% di ribuan TPS yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, seperti Sampang dan Pamekasan, demi memenangkan kandidat tertentu. Hal ini membuktikan bahwa manipulasi suara dirancang sejak awal dengan pola yang konsisten.
3. Bahwa, di tingkat PPK, pengalihan suara dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur ke Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, menjadi modus utama dalam meningkatkan suara salah satu kandidat. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan menunjukkan adanya pengurangan suara untuk pasangan lain, yang secara signifikan memengaruhi hasil akhir. Manipulasi ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu di setiap jenjang.

4. Bahwa, pada tingkat kabupaten/kota hingga KPU provinsi, manipulasi ini diperkuat melalui sistem rekapitulasi yang tidak transparan, seperti dugaan penyaringan data dalam Sirekap. Data TPS yang dianggap tidak mendukung stabilitas hasil tertentu diduga diabaikan. Sistem yang seharusnya menjamin keadilan malah digunakan untuk mengarahkan hasil sesuai dengan kepentingan tertentu.
5. Bahwa secara keseluruhan, pelanggaran ini mencerminkan pola pelaksanaan pemilu yang telah dikendalikan oleh struktur penyelenggara. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas kerusakan sistematis yang terjadi. Investigasi independen dan transparansi penuh dalam seluruh proses rekapitulasi menjadi langkah yang tidak dapat ditunda untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Jawa Timur.
6. Bahwa, telah ditemukan penyaluran Bantuan Sosial PKH sejumlah 1.467.753 Keluarga dan ini berlawanan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai;
7. Bahwa, pembagian Bantuan sosial PKH memiliki dampak suara sejumlah 3.555.409 Suara, bahwa dengan anomali nilai partisipasi pemilih 90-100% memiliki dampak suara sejumlah 743.784 suara; bahwa, Pemindahan Suara dari Paslon 03 kepada Paslon 02 sejumlah 837.361 Suara; Bahwa, Anomali suara tidak sah sejumlah 1.204.610 Suara; jika digabungkan sejumlah **6.341.164;**

D. Analisis Pengurangan Suara Terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua)

8. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024 telah berlangsung penyaluran Penerima Bansos PKH di Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah 1.467.753 Keluarga, sementara Penerima PKH beranggota Keluarga Penerima Bansos PKH Jawa Timur (yang berusia di atas 18 tahun) sebanyak 3.555.409 Jiwa;
9. Bahwa, mengacu kepada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai, Wakil Mentri Dalam

Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan suarat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu, 13 November 2024.

10. Bahwa terdapat penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan di 2.780 TPS yang menghasilkan Paslon 02 mencapai 743.784 suara dibandingkan Pemilih Paslon 03 di 26 Kabupaten/Kota (yang lebih dari dua TPS), dengan indikasi:
    a. Penggunaan DPT hampir 90-100% Persen, dimana persentase terbesar ada di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan;
    b. Penggunaan DPT 100% Persen di seluruh TPS di 13 desa di Sampang dan 2 desa di Pamekasan;

    Lampiran:

    (1) Lampiran 1A: Data Penggunaan DPT hampir 90% hingga 100% Persen;
    (2) Lampiran 1B: Data Desa Dengan Penggunaan DPT 100% Persen Di Sampang dan Pamekasan;
    (3) Lampiran 1C: Peta Sebaran Penggunaan DPT hampir 90% hingga 100% Persen;
    (4) Lampiran 1D: Peta Sebaran Desa dengan Penggunaan DPT hampir 100% Persen;
    (5) Lampiran 1E: Peta Kluster Penggunaan DPT hampir 90% hingga 100% Persen

    Lampiran:

    (1) Lampiran 2A: Data Perolehan Paslon 03 Sebanyak 0 Hingga 30 Suara per TPS;
    (2) Lampiran 2B: Peta Sebaran Perolehan Paslon 03 Sebanyak 0 Hingga 30 Suara per TPS;
    (3) Lampiran 2C: Peta Kluster Perolehan Paslon 03 Sebanyak 0 Hingga 30 Suara per TPS;
11. Terdapat anomali suara tidak sah sekitar 5,5% persen pemilih atau 1,2 juta suara disemua TPS menghasilkan Paslon 02 kelebihan suara dibandingkan Pemilih Paslon 03 di kehilangan suara disemua Kabupaten/Kota, dengan indikasi:

E. Perjumlahan Untuk Pengurangan Suara Terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua)

(1) Dampak Bansos = 3.555.409 Suara.

(2) Partisipasi Nilai Pemilih 90-100% = 743.784 Suara

(3) Pencurian Suara 0-30 Suara = 837.361 suara

(4) Anomali Suara Tidak Sah = 1.204.610

Total = **6.341.164 Suara**

12. Bahwa, Bansos PKH memiliki dampak suara sejumlah 3.555.409 Suara; bahwa dengan anomali nilai partisipasi pemilih 90-100% memiliki dampak suara sejumlah 743.784 suara; bahwa, Pemindahan Suara dari Paslon 03 kepada Paslon 02 sejumlah 837.361 Suara; Bahwa, Anomali suara tidak sah sejumlah 1.204.610 Suara;
13. Bahwa, Terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. (tertinggi di Kabupaten Pasuruan, Tuban, Sidoarjo dan Bojonegoro). Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota, dengan indikasi:
14. Bahwa Terdapat 4.174 TPS (tersebar di 36 Kabupaten/Kota) yang memiliki suara tidak sah lebih dari 10 persen atau total 210.584 suara (tertinggi terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bojonegoro). Selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan Paslon 03 adalah 549.922 suara.
15. Bahwa Terdapat 34.282 TPS (tersebar di 38 Kabupaten/Kota) yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali sebesar 822.511 (tertinggi terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban). Dengan selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan Paslon 03 adalah 4.614.244 suara
16. Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prisip konstitusional pemilukada yang Luber dan Jurdil tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum di luar Mahkamah Konstitusi salah satunya jika penegakan hukum di luar Mahkamah Konstitusi tidak menghasilkan keadilan Pemilukada yang

seharusnya sebagaimana didambakan dan dicita-cita oleh masyarakat Indonesia.

F. Terjadinya Penyaluran Bansos yang Melanggar Aturan

17. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024 telah berlangsung penyaluran Penerima Bansos PKH di Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah 1.467.753 Keluarga, sementara Penerima PKH beranggota Keluarga Penerima Bansos PKH Jawa Timur (yang berusia di atas 18 tahun) sebanyak 3.555.409 Jiwa;
18. Dengan terjadinya penyaluran Bansos ini di mana dilakukan di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Adhy Karyono yang diangkat oleh Jokowi pada 16 Februari 2024 yang mana ia menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Timur untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Pj. Gubernur sebagai anak buah Mendagri, sangat terkait dengan koalisi besar Pemerintahan Presiden Prabowo yang kemudian direplikasi ke kontestasi-kontestasi Pilkada yang kemudian terjadi pula di Jawa Timur mendukung Paslon No. 2. Citra dan keuntungan politik yang didulang dari penyebaran Bansos oleh Pj. Gubernur, akan menguntungkan peserta Pilkada yang didukung oleh Jokowi;
19. Bahwa dukungan partai politik yang didukung oleh Presiden Prabowo, selaras dengan koalisi partai politik yang mendukung Prabowo, menunjukkan intensi dan akses pemanfaatan bansos dan program pemerintah, khususnya di Jawa Timur, telah secara terang benderang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
20. Bahwa, Menurut keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu, 13 November 2024;
21. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jawa Timru secara faktual telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, dimana pejabat negara, pejabat pemerintahan, ASN, aparatur desa, dan TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan peserta pilkada tertentu. Tindakan Pj Gubernur

Jawa Timur yang membagikan bansos pada 13 November 2024, adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan UU Pilkada, dan mesti menjadi pertimbangan Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah diuntungkan dari praktik penyaluran bansos yang serampangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

22. Bahwa problematika Bansos yang akhirnya bisa menimbulkan keuntungan elektoral bagi pihak tertentu khususnya calon-calon dari pihak berkuasa atau yang didukung oleh kelompok penguasa telah menjadi persoalan serius di dalam sengketa kepemiluan. Sehingga MK pada Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 membenarkan bahwa penyaluran bansos memang telah terjadi dan berhimpitan dengan kontestasi elektoral sehingga MK menilai seharusnya ada peraturan yang berupa undang-undang yang mengatur hal ini agar dalam pelaksanaan pemilu ke depan termasuk pemilukada hal demikian dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran pemilu dengan mudah. Hingga permohonan ini diajukan ke MK telah ternyata peraturan demikian masih belum dibentuk. Adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri in casu senyatanya belum memadai; itupun tetap dilanggar oleh Pemprov Jawa Timur yang dalam hal ini menguntungkan Paslon No. 2.

Berdasarkan uaraian dan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di Persidangan *a quo*, untuk itu memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus perkara *a quo* yang bunyinya sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guberner Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan EMIL ELESTIANTO DARDAK** karena telah melakukan pelanggaran secara Terstuktur, Sistematis

dan Massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Tahun 2024;

4. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	**Nama Pasangan Calon**	**Perolehan Suara**
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	**1.797.332** (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	**6.743.095** (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)

Atau

5. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di seluruh TPS se Provinsi Jawa Timur yang dikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si & H. Lukmanul Khakim, M.Si dan Pasangan Calon s Nomor Urut 3. Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T dan ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guburner Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan EMIL ELESTIANTO DARDAK.
6. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk Melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-189, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T calon Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zahrul Azhar Asumta, S.Ip., M. Kes, calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 September 2024;
6.	Bukti P-6	:	Cetak Data Jumlah Penduduk Jawa Timur sebesar 41.814.500 (**empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus**) Jiwa.
7.	Bukti P-6A	:	Tidak ada bukti fisik;
8.	Bukti P-7	:	Fotokopi Tabel penggunaan DPT 90% sampai dengan 100%;
9.	Bukti P-8	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Grogol, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan situs Sirekap KPU;
10.	Bukti P-9	:	Tidak ada bukti fisik;
11.	Bukti P-10	:	Tidak ada bukti fisik;
12.	Bukti P-11	:	Tidak ada bukti fisik;
13.	Bukti P-12	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berdasarkan situs Sirekap KPU;
14.	Bukti P-13	:	Tidak ada bukti fisik;
15.	Bukti P-14	:	Tidak ada bukti fisik;
16.	Bukti P-15	:	Tidak ada bukti fisik;
17.	Bukti P-16	:	Tidak ada bukti fisik;
18.	Bukti P-17	:	Tidak ada bukti fisik;

19.	Bukti P-18A	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan situs Sirekap KPU;
20.	Bukti P-18B	:	Tidak ada bukti fisik;
21.	Bukti P-19	:	Tidak ada bukti fisik;
22.	Bukti P-20	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Buddi Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, berdasarkan situs Sirekap KPU;
23.	Bukti P-21	:	Tidak ada bukti fisik;
24.	Bukti P-22	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Angonangon Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, berdasarkan situs Sirekap KPU;
25.	Bukti P-23	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan situs Sirekap KPU;
26.	Bukti P-24	:	Tidak ada bukti fisik;
27.	Bukti P-25	:	Tidak ada bukti fisik;
28.	Bukti P-25A	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan situs Sirekap KPU;
29.	Bukti P-25B	:	Fotokopi daftar hadir Pemilih sesuai data DPT di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Balen Desa Mayangkawis TPS 01;
30.	Bukti P-25C	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan situs Sirekap KPU;
31.	Bukti P-25D	:	Tidak ada bukti fisik;
32.	Bukti P-26	:	Tidak ada bukti fisik;
33.	Bukti P-27	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Batioha Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
34.	Bukti P-28	:	Tidak ada bukti fisik;
35.	Bukti P-29	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Batioha Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
36.	Bukti P-30	:	Tidak ada bukti fisik;
37.	Bukti P-31	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Batioha Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
38.	Bukti P-32	:	Tidak ada bukti fisik;
39.	Bukti P-33	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Batioha Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;

40.	Bukti P-34	:	Tidak ada bukti fisik;
41.	Bukti P-35	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Batioha Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
42.	Bukti P-36	:	Tidak ada bukti fisik;
43.	Bukti P-37	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Batioha Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
44.	Bukti P-38	:	Tidak ada bukti fisik;
45.	Bukti P-39	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
46.	Bukti P-40	:	Tidak ada bukti fisik;
47.	Bukti P-41	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
48.	Bukti P-42	:	Tidak ada bukti fisik;
49.	Bukti P-43	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
50.	Bukti P-44	:	Tidak ada bukti fisik;
51.	Bukti P-45	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
52.	Bukti P-46	:	Tidak ada bukti fisik;
53.	Bukti P-47	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
54.	Bukti P-48	:	Tidak ada bukti fisik;
55.	Bukti P-49	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
56.	Bukti P-50	:	Tidak ada bukti fisik;
57.	Bukti P-51	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
58.	Bukti P-52	:	Tidak ada bukti fisik;
59.	Bukti P-53	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
60.	Bukti P-54	:	Tidak ada bukti fisik;

61.	Bukti P-55	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
62.	Bukti P-56	:	Tidak ada bukti fisik;
63.	Bukti P-57	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
64.	Bukti P-58	:	Tidak ada bukti fisik;
65.	Bukti P-59	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
66.	Bukti P-60	:	Tidak ada bukti fisik;
67.	Bukti P-61	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
68.	Bukti P-62	:	Tidak ada bukti fisik;
69.	Bukti P-63	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
70.	Bukti P-64	:	Tidak ada bukti fisik;
71.	Bukti P-65	:	Tidak ada bukti fisik;
72.	Bukti P-66	:	Tidak ada bukti fisik;
73.	Bukti P-67	:	Tidak ada bukti fisik;
74.	Bukti P-68	:	Tidak ada bukti fisik;
75.	Bukti P-69	:	Tidak ada bukti fisik
76.	Bukti P-70	:	Tidak ada bukti fisik
77.	Bukti P-71	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
78.	Bukti P-72	:	Tidak ada bukti fisik;
79.	Bukti P-73	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
80.	Bukti P-74	:	Tidak ada bukti fisik;
81.	Bukti P-75	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
82.	Bukti P-76	:	Tidak ada bukti fisik;
83.	Bukti P-77	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
84.	Bukti P-78	:	Tidak ada bukti fisik;

85.	Bukti P-79	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
86.	Bukti P-80	:	Tidak ada bukti fisik;
87.	Bukti P-81	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
88.	Bukti P-82	:	Tidak ada bukti fisik;
89.	Bukti P-83	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
90.	Bukti P-84	:	Tidak ada bukti fisik;
91.	Bukti P-85	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
92.	Bukti P-86	:	Tidak ada bukti fisik;
93.	Bukti P-87	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
94.	Bukti P-88	:	Tidak ada bukti fisik;
95.	Bukti P-89	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
96.	Bukti P-90	:	Tidak ada bukti fisik;
97.	Bukti P-91	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
98.	Bukti P-92	:	Tidak ada bukti fisik;
99.	Bukti P-93	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
100.	Bukti P-94	:	Tidak ada bukti fisik;
101.	Bukti P-95	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
102.	Bukti P-96	:	Tidak ada bukti fisik;
103.	Bukti P-97	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
104.	Bukti P-98	:	Tidak ada bukti fisik;
105.	Bukti P-99	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;

106.	Bukti P-100	:	Tidak ada bukti fisik;
107.	Bukti P-101	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
108.	Bukti P-102	:	Tidak ada bukti fisik;
109.	Bukti P-103	:	Tidak ada bukti fisik;
110.	Bukti P-104	:	Tidak ada bukti fisik;
111.	Bukti P-105	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
112.	Bukti P-206	:	Tidak ada bukti fisik;
113.	Bukti P-107	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
114.	Bukti P-108	:	Tidak ada bukti fisik;
115.	Bukti P-109	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
116.	Bukti P-110	:	Tidak ada bukti fisik;
117.	Bukti P-111	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU.
118.	Bukti P-112	:	Tidak ada bukti fisik;
119.	Bukti P-113	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
120.	Bukti P-114	:	Tidak ada bukti fisik;
121.	Bukti P-115	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
122.	Bukti P-116	:	Tidak ada bukti fisik;
123.	Bukti P-117	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 08 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
124.	Bukti P-118	:	Tidak ada bukti fisik;
125.	Bukti P-119	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 09 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
126.	Bukti P-120	:	Tidak ada bukti fisik;
127.	Bukti P-121	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 10 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
128.	Bukti P-122	:	Tidak ada bukti fisik;

129.	Bukti P-123	:	Tidak ada bukti fisik;
130.	Bukti P-124	:	Tidak ada bukti fisik;
131.	Bukti P-125	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
132.	Bukti P-125A	:	Tidak ada bukti fisik;
133.	Bukti P-126	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
134.	Bukti P-127	:	Tidak ada bukti fisik;
135.	Bukti P-128	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
136.	Bukti P-129	:	Tidak ada bukti fisik;
137.	Bukti P-130	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
138.	Bukti P-131	:	Tidak ada bukti fisik;
139.	Bukti P-132	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
140.	Bukti P-133	:	Tidak ada bukti fisik;
141.	Bukti P-134	:	Tidak ada bukti fisik;
142.	Bukti P-135	:	Tidak ada bukti fisik;
143.	Bukti P-136	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
144.	Bukti P-137	:	Tidak ada bukti fisik;
145.	Bukti P-138	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
146.	Bukti P-139	:	Tidak ada bukti fisik;
147.	Bukti P-140	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
148.	Bukti P-141	:	Tidak ada bukti fisik;
149.	Bukti P-142	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
150.	Bukti P-143	:	Tidak ada bukti fisik;
151.	Bukti P-144	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;

152.	Bukti P-145	:	Tidak ada bukti fisik;
153.	Bukti P-146	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
154.	Bukti P-147	:	Tidak ada bukti fisik;
155.	Bukti P-148	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
156.	Bukti P-149	:	Tidak ada bukti fisik;
157.	Bukti P-150	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 07 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
158.	Bukti P-151	:	Tidak ada bukti fisik;
159.	Bukti P-152	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 08 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
160.	Bukti P-153	:	Tidak ada bukti fisik;
161.	Bukti P-154	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
162.	Bukti P-155	:	Tidak ada bukti fisik;
163.	Bukti P-156	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
164.	Bukti P-157	:	Tidak ada bukti fisik;
165.	Bukti P-158	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 03 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
166.	Bukti P-159	:	Tidak ada bukti fisik;
167.	Bukti P-160	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
168.	Bukti P-161	:	Tidak ada bukti fisik;
169.	Bukti P-162	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 01 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
170.	Bukti P-163	:	Tidak ada bukti fisik;
171.	Bukti P-164	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 02 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
172.	Bukti P-165	:	Tidak ada bukti fisik;
173.	Bukti P-166	:	Tidak ada bukti fisik;
174.	Bukti P-167	:	Tidak ada bukti fisik;

175.	Bukti P-168	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 04 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
176.	Bukti P-169	:	Tidak ada bukti fisik;
177.	Bukti P-170	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 05 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
178.	Bukti P-171	:	Tidak ada bukti fisik;
179.	Bukti P-172	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 06 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berdasarkan situs Sirekap KPU;
180.	Bukti P-173	:	Tidak ada bukti fisik;
181.	Bukti P-174	:	Tidak ada bukti fisik;
182.	Bukti P-175.1	:	Fotokopi Berita Dana Bansos Rp100 Miliar yang disalurkan mulai tanggal 7 November 2024; (Sumber: https://www.jatimtimes.com/baca/324923/20241111/062800/gelontor-rp-100-miliar-dinsos-jatim-perluas-bansos-pkh-plus-triwulan-iv-2024)
183.	Bukti P-175.2	:	Video dan Foto pembagian Bansos dilakukan oleh Paslon 02 dan dihadiri oleh Calon Wakil Gubernur 02 Emil Elestianto Dardak pada tanggal 17 November 2024. Dalam Acara Pengajian dan Istighosah untuk Kemaslahatan Jawa Timur bertempat di Astoria Convention Hall Kota Mojokerto;
184.	Bukti P-175.3	:	Cetak peta penyebaran dampak Bansos;
185.	Bukti P-176	:	Cetak grafik data C-Hasil Paslon berdasarkan waktu yang tersimpan di situs Sirekap KPU;
186.	Bukti P-177	:	Video ucapan Joko Widodo kepada Paslon 02 atas kemenangan dalam Pilkada Jawa Timur;
187.	Bukti P-178	:	Tabel waktu C-Hasil tersimpan di situs Sirekap KPU
188.	Bukti P-179.1	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
189.	Bukti P-179.2	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
190.	Bukti P-179.3	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
191.	Bukti P-179.4	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
192.	Bukti P-179.5	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
193.	Bukti P-179.6	:	Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

194. Bukti P-179.7 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Cangkareman Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
195. Bukti P-179.8 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
196. Bukti P-179.9 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
197. Bukti P-179.10 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
198. Bukti P-179.11 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
199. Bukti P-179.12 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
200. Bukti P-179.13 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
201. Bukti P-179.14 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
202. Bukti P-179.15 : Tidak ada bukti fisik;
203. Bukti P-179.16 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
204. Bukti P-179.17 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
205. Bukti P-179.18 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
206. Bukti P-179.19 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sadah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
207. Bukti P-179.20 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
208. Bukti P-179.21 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
209. Bukti P-179.22 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
210. Bukti P-179.23 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
211. Bukti P-179.24 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
212. Bukti P-179.25 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
213. Bukti P-179.26 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
214. Bukti P-179.27 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

215. Bukti P-179.28 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
216. Bukti P-179.29 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jampit Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso;
217. Bukti P-179.30 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
218. Bukti P-179.31 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
219. Bukti P-179.32 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
220. Bukti P-179.33 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
221. Bukti P-179.34 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Curahmalang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
222. Bukti P-179.35 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Jemberkidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
223. Bukti P-179.36 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
224. Bukti P-179.37 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
225. Bukti P-179.38 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
226. Bukti P-179.39 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
227. Bukti P-179.40 : Cetak Foto C-Hasil TPS 036 Desa Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
228. Bukti P-179.41 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
229. Bukti P-179.42 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
230. Bukti P-179.43 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
231. Bukti P-179.44 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
232. Bukti P-179.45 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
233. Bukti P-179.46 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
234. Bukti P-179.47 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;

235. Bukti P-179.48 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
236. Bukti P-179.49 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
237. Bukti P-179.50 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
238. Bukti P-179.51 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang;
239. Bukti P-179.52 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;
240. Bukti P-179.53 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
241. Bukti P-179.54 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
242. Bukti P-179.55 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
243. Bukti P-179.56 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
244. Bukti P-179.57 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
245. Bukti P-179.58 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
246. Bukti P-179.59 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
247. Bukti P-179.60 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
248. Bukti P-179.61 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
249. Bukti P-179.62 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bangserreh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
250. Bukti P-179.63 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
251. Bukti P-179.64 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
252. Bukti P-179.65 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
253. Bukti P-179.66 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
254. Bukti P-179.67 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
255. Bukti P-179.68 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;

256. Bukti P-179.69 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
257. Bukti P-179.70 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Banyupelle Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
258. Bukti P-179.71 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
259. Bukti P-179.72 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
260. Bukti P-179.73 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
261. Bukti P-179.74 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Billa'an Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
262. Bukti P-179.75 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
263. Bukti P-179.76 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
264. Bukti P-179.77 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
265. Bukti P-179.78 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
266. Bukti P-179.79 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
267. Bukti P-179.80 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
268. Bukti P-179.81 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
269. Bukti P-179.82 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
270. Bukti P-179.83 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
271. Bukti P-179.84 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
272. Bukti P-179.85 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
273. Bukti P-179.86 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
274. Bukti P-179.87 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
275. Bukti P-179.88 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
276. Bukti P-179.89 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;

277. Bukti P-179.90 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
278. Bukti P-179.91 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
279. Bukti P-179.92 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
280. Bukti P-179.93 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
281. Bukti P-179.94 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
282. Bukti P-179.95 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
283. Bukti P-179.96 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
284. Bukti P-179.97 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
285. Bukti P-179.98 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
286. Bukti P-179.99 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
287. Bukti P-179.100 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
288. Bukti P-179.101 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
289. Bukti P-179.102 : Tidak ada bukti fisik;
290. Bukti P-179.103 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
291. Bukti P-179.104 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
292. Bukti P-179.105 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
293. Bukti P-179.106 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
294. Bukti P-179.107 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
295. Bukti P-179.108 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
296. Bukti P-179.109 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
297. Bukti P-179.110 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
298. Bukti P-179.111 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

299. Bukti P-179.112 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
300. Bukti P-179.113 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
301. Bukti P-179.114 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
302. Bukti P-179.115 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
303. Bukti P-179.116 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
304. Bukti P-179.117 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
305. Bukti P-179.118 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
306. Bukti P-179.119 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
307. Bukti P-179.120 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
308. Bukti P-179.121 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
309. Bukti P-179.122 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
310. Bukti P-179.123 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
311. Bukti P-179.124 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
312. Bukti P-179.125 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
313. Bukti P-179.126 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kacok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
314. Bukti P-179.127 : Cetak Foto C-Hasil TPS 901 Desa Kacok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
315. Bukti P-179.128 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kodik Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
316. Bukti P-179.129 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Larangan Badung Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
317. Bukti P-179.130 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Larangan Badung Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
318. Bukti P-179.131 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Lesong Daja Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
319. Bukti P-179.132 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
320. Bukti P-179.133 : Tidak ada bukti fisik;

321. Bukti P-179.134 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
322. Bukti P-179.135 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Mapper Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
323. Bukti P-179.136 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Mapper Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
324. Bukti P-179.137 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Mapper Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
325. Bukti P-179.138 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
326. Bukti P-179.139 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
327. Bukti P-179.140 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
328. Bukti P-179.141 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
329. Bukti P-179.142 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
330. Bukti P-179.143 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
331. Bukti P-179.144 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
332. Bukti P-179.145 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
333. Bukti P-179.146 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
334. Bukti P-179.147 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
335. Bukti P-179.148 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
336. Bukti P-179.149 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
337. Bukti P-179.150 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
338. Bukti P-179.151 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
339. Bukti P-179.152 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
340. Bukti P-179.153 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
341. Bukti P-179.154 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;

342. Bukti P-179.155 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
343. Bukti P-179.156 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
344. Bukti P-179.157 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
345. Bukti P-179.158 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
346. Bukti P-179.159 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
347. Bukti P-179.160 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
348. Bukti P-179.161 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
349. Bukti P-179.162 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
350. Bukti P-179.163 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
351. Bukti P-179.164 : Cetak Foto C-Hasil TPS 902 Desa Panaan Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
352. Bukti P-179.165 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
353. Bukti P-179.166 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
354. Bukti P-179.167 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
355. Bukti P-179.168 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
356. Bukti P-179.169 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
357. Bukti P-179.170 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
358. Bukti P-179.171 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
359. Bukti P-179.172 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
360. Bukti P-179.173 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
361. Bukti P-179.174 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
362. Bukti P-179.175 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

363. Bukti P-179.176 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
364. Bukti P-179.177 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
365. Bukti P-179.178 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
366. Bukti P-179.179 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pangereman Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
367. Bukti P-179.180 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
368. Bukti P-179.181 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Panglemah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
369. Bukti P-179.182 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
370. Bukti P-179.183 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
371. Bukti P-179.184 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
372. Bukti P-179.185 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
373. Bukti P-179.186 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
374. Bukti P-179.187 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Patoan Daja Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
375. Bukti P-179.188 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Patoan Daja Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
376. Bukti P-179.189 : Cetak Foto C-Hasil TPS 902 Desa Patoan Daja Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
377. Bukti P-179.190 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
378. Bukti P-179.191 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
379. Bukti P-179.192 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
380. Bukti P-179.193 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Potoan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
381. Bukti P-179.194 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Potoan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
382. Bukti P-179.195 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Potoan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
383. Bukti P-179.196 : Cetak Foto C-Hasil TPS 901 Desa Potoan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;

384. Bukti P-179.197 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
385. Bukti P-179.198 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
386. Bukti P-179.199 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
387. Bukti P-179.200 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
388. Bukti P-179.201 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
389. Bukti P-179.202 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
390. Bukti P-179.203 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
391. Bukti P-179.204 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Rombuh Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
392. Bukti P-179.205 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Rombuh Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
393. Bukti P-179.206 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Rombuh Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
394. Bukti P-179.207 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Rombuh Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
395. Bukti P-179.208 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
396. Bukti P-179.209 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
397. Bukti P-179.210 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
398. Bukti P-179.211 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
399. Bukti P-179.212 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
400. Bukti P-179.213 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Talangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
401. Bukti P-179.214 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
402. Bukti P-179.215 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
403. Bukti P-179.216 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
404. Bukti P-179.217 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;

405. Bukti P-179.218 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
406. Bukti P-179.219 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
407. Bukti P-179.220 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
408. Bukti P-179.221 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
409. Bukti P-179.222 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
410. Bukti P-179.223 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
411. Bukti P-179.224 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
412. Bukti P-179.225 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Podokoyo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
413. Bukti P-179.226 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
414. Bukti P-179.227 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
415. Bukti P-179.228 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
416. Bukti P-179.229 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gununggeni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
417. Bukti P-179.230 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
418. Bukti P-179.231 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
419. Bukti P-179.232 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Angsokah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
420. Bukti P-179.233 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Angsokah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
421. Bukti P-179.234 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Angsokah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
422. Bukti P-179.235 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Angsokah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
423. Bukti P-179.236 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Apa An Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
424. Bukti P-179.237 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banjarbillah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
425. Bukti P-179.238 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

426. Bukti P-179.239 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
427. Bukti P-179.240 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
428. Bukti P-179.241 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
429. Bukti P-179.242 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
430. Bukti P-179.243 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
431. Bukti P-179.244 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
432. Bukti P-179.245 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
433. Bukti P-179.246 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
434. Bukti P-179.247 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
435. Bukti P-179.248 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
436. Bukti P-179.249 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
437. Bukti P-179.250 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
438. Bukti P-179.251 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
439. Bukti P-179.252 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
440. Bukti P-179.253 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
441. Bukti P-179.254 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
442. Bukti P-179.255 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
443. Bukti P-179.256 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
444. Bukti P-179.257 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
445. Bukti P-179.258 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
446. Bukti P-179.259 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

447. Bukti P-179.260 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
448. Bukti P-179.261 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
449. Bukti P-179.262 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
450. Bukti P-179.263 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
451. Bukti P-179.264 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
452. Bukti P-179.265 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
453. Bukti P-179.266 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Batoporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
454. Bukti P-179.267 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
455. Bukti P-179.268 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
456. Bukti P-179.269 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
457. Bukti P-179.270 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
458. Bukti P-179.271 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
459. Bukti P-179.272 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
460. Bukti P-179.273 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
461. Bukti P-179.274 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
462. Bukti P-179.275 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
463. Bukti P-179.276 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
464. Bukti P-179.277 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
465. Bukti P-179.278 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
466. Bukti P-179.279 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
467. Bukti P-179.280 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

468. Bukti P-179.281 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
469. Bukti P-179.282 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
470. Bukti P-179.283 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
471. Bukti P-179.284 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
472. Bukti P-179.285 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
473. Bukti P-179.286 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
474. Bukti P-179.287 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
475. Bukti P-179.288 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
476. Bukti P-179.289 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
477. Bukti P-179.290 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
478. Bukti P-179.291 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
479. Bukti P-179.292 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
480. Bukti P-179.293 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
481. Bukti P-179.294 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
482. Bukti P-179.295 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
483. Bukti P-179.296 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
484. Bukti P-179.297 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
485. Bukti P-179.298 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
486. Bukti P-179.299 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
487. Bukti P-179.300 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
488. Bukti P-179.301 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

489. Bukti P-179.302 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
490. Bukti P-179.303 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
491. Bukti P-179.304 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
492. Bukti P-179.305 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
493. Bukti P-179.306 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
494. Bukti P-179.307 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
495. Bukti P-179.308 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
496. Bukti P-179.309 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
497. Bukti P-179.310 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
498. Bukti P-179.311 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
499. Bukti P-179.312 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
500. Bukti P-179.313 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
501. Bukti P-179.314 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
502. Bukti P-179.315 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
503. Bukti P-179.316 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
504. Bukti P-179.317 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
505. Bukti P-179.318 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
506. Bukti P-179.319 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
507. Bukti P-179.320 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
508. Bukti P-179.321 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
509. Bukti P-179.322 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

510. Bukti P-179.323 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
511. Bukti P-179.324 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
512. Bukti P-179.325 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
513. Bukti P-179.326 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
514. Bukti P-179.327 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
515. Bukti P-179.328 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
516. Bukti P-179.329 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
517. Bukti P-179.330 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
518. Bukti P-179.331 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
519. Bukti P-179.332 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
520. Bukti P-179.333 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
521. Bukti P-179.334 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
522. Bukti P-179.335 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
523. Bukti P-179.336 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
524. Bukti P-179.337 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
525. Bukti P-179.338 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
526. Bukti P-179.339 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
527. Bukti P-179.340 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
528. Bukti P-179.341 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
529. Bukti P-179.342 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
530. Bukti P-179.343 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

531. Bukti P-179.344 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
532. Bukti P-179.345 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
533. Bukti P-179.346 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
534. Bukti P-179.347 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
535. Bukti P-179.348 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
536. Bukti P-179.349 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
537. Bukti P-179.350 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
538. Bukti P-179.351 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
539. Bukti P-179.352 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
540. Bukti P-179.353 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
541. Bukti P-179.354 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
542. Bukti P-179.355 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
543. Bukti P-179.356 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
544. Bukti P-179.357 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
545. Bukti P-179.358 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
546. Bukti P-179.359 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
547. Bukti P-179.360 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
548. Bukti P-179.361 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
549. Bukti P-179.362 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
550. Bukti P-179.363 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
551. Bukti P-179.364 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

552. Bukti P-179.365 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
553. Bukti P-179.366 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
554. Bukti P-179.367 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
555. Bukti P-179.368 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
556. Bukti P-179.369 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
557. Bukti P-179.370 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
558. Bukti P-179.371 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
559. Bukti P-179.372 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
560. Bukti P-179.373 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
561. Bukti P-179.374 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
562. Bukti P-179.375 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
563. Bukti P-179.376 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
564. Bukti P-179.377 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
565. Bukti P-179.378 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
566. Bukti P-179.379 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
567. Bukti P-179.380 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
568. Bukti P-179.381 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
569. Bukti P-179.382 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
570. Bukti P-179.383 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
571. Bukti P-179.384 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
572. Bukti P-179.385 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kamondung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

573. Bukti P-179.386 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kanjar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
574. Bukti P-179.387 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
575. Bukti P-179.388 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
576. Bukti P-179.389 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
577. Bukti P-179.390 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
578. Bukti P-179.391 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
579. Bukti P-179.392 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
580. Bukti P-179.393 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
581. Bukti P-179.394 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
582. Bukti P-179.395 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
583. Bukti P-179.396 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
584. Bukti P-179.397 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
585. Bukti P-179.398 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
586. Bukti P-179.399 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
587. Bukti P-179.400 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
588. Bukti P-179.401 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
589. Bukti P-179.402 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
590. Bukti P-179.403 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

591. Bukti P-179.404 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
592. Bukti P-179.405 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
593. Bukti P-179.406 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
594. Bukti P-179.407 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
595. Bukti P-179.408 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
596. Bukti P-179.409 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
597. Bukti P-179.410 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
598. Bukti P-179.411 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
599. Bukti P-179.412 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
600. Bukti P-179.413 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
601. Bukti P-179.414 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
602. Bukti P-179.415 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
603. Bukti P-179.416 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
604. Bukti P-179.417 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

605. Bukti P-179.418 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
606. Bukti P-179.419 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
607. Bukti P-179.420 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
608. Bukti P-179.421 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
609. Bukti P-179.422 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
610. Bukti P-179.423 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
611. Bukti P-179.424 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
612. Bukti P-179.425 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
613. Bukti P-179.426 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
614. Bukti P-179.427 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
615. Bukti P-179.428 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
616. Bukti P-179.429 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
617. Bukti P-179.430 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
618. Bukti P-179.431 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
619. Bukti P-179.432 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
620. Bukti P-179.433 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
621. Bukti P-179.434 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
622. Bukti P-179.435 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
623. Bukti P-179.436 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
624. Bukti P-179.437 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
625. Bukti P-179.438 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

626. Bukti P-179.439 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
627. Bukti P-179.440 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
628. Bukti P-179.441 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
629. Bukti P-179.442 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
630. Bukti P-179.443 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
631. Bukti P-179.444 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
632. Bukti P-179.445 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
633. Bukti P-179.446 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
634. Bukti P-179.447 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
635. Bukti P-179.448 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
636. Bukti P-179.449 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
637. Bukti P-179.450 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
638. Bukti P-179.451 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
639. Bukti P-179.452 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
640. Bukti P-179.453 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
641. Bukti P-179.454 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
642. Bukti P-179.455 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
643. Bukti P-179.456 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
644. Bukti P-179.457 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
645. Bukti P-179.458 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
646. Bukti P-179.459 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

647. Bukti P-179.460 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
648. Bukti P-179.461 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
649. Bukti P-179.462 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
650. Bukti P-179.463 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
651. Bukti P-179.464 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
652. Bukti P-179.465 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
653. Bukti P-179.466 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
654. Bukti P-179.467 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
655. Bukti P-179.468 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
656. Bukti P-179.469 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
657. Bukti P-179.470 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
658. Bukti P-179.471 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
659. Bukti P-179.472 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
660. Bukti P-179.473 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
661. Bukti P-179.474 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
662. Bukti P-179.475 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
663. Bukti P-179.476 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
664. Bukti P-179.477 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
665. Bukti P-179.478 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
666. Bukti P-179.479 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
667. Bukti P-179.480 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

668. Bukti P-179.481 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
669. Bukti P-179.482 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa P. Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
670. Bukti P-179.483 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
671. Bukti P-179.484 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
672. Bukti P-179.485 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
673. Bukti P-179.486 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pakalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
674. Bukti P-179.487 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pakalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
675. Bukti P-179.488 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Palenggian Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
676. Bukti P-179.489 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Palenggian Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
677. Bukti P-179.490 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
678. Bukti P-179.491 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
679. Bukti P-179.492 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
680. Bukti P-179.493 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
681. Bukti P-179.494 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
682. Bukti P-179.495 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
683. Bukti P-179.496 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
684. Bukti P-179.497 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
685. Bukti P-179.498 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
686. Bukti P-179.499 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
687. Bukti P-179.500 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
688. Bukti P-179.501 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

689. Bukti P-179.502 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
690. Bukti P-179.503 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
691. Bukti P-179.504 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
692. Bukti P-179.505 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
693. Bukti P-179.506 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
694. Bukti P-179.507 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
695. Bukti P-179.508 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
696. Bukti P-179.509 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
697. Bukti P-179.510 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
698. Bukti P-179.511 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
699. Bukti P-179.512 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
700. Bukti P-179.513 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
701. Bukti P-179.514 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
702. Bukti P-179.515 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
703. Bukti P-179.516 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
704. Bukti P-179.517 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
705. Bukti P-179.518 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
706. Bukti P-179.519 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
707. Bukti P-179.520 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
708. Bukti P-179.521 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
709. Bukti P-179.522 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

710. Bukti P-179.523 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
711. Bukti P-179.524 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
712. Bukti P-179.525 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
713. Bukti P-179.526 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
714. Bukti P-179.527 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
715. Bukti P-179.528 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
716. Bukti P-179.529 : Tidak ada bukti fisik;
717. Bukti P-179.530 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
718. Bukti P-179.531 : Tidak ada bukti fisik;
719. Bukti P-179.532 : Tidak ada bukti fisik;
720. Bukti P-179.533 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
721. Bukti P-179.534 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
722. Bukti P-179.535 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
723. Bukti P-179.536 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
724. Bukti P-179.537 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
725. Bukti P-179.538 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
726. Bukti P-179.539 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
727. Bukti P-179.540 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
728. Bukti P-179.541 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
729. Bukti P-179.542 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
730. Bukti P-179.543 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
731. Bukti P-179.544 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
732. Bukti P-179.545 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

733. Bukti P-179.546 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
734. Bukti P-179.547 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
735. Bukti P-179.548 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
736. Bukti P-179.549 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
737. Bukti P-179.550 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
738. Bukti P-179.551 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
739. Bukti P-179.552 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
740. Bukti P-179.553 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Somber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
741. Bukti P-179.554 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
742. Bukti P-179.555 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
743. Bukti P-179.556 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
744. Bukti P-179.557 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
745. Bukti P-179.558 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
746. Bukti P-179.559 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
747. Bukti P-179.560 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
748. Bukti P-179.561 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
749. Bukti P-179.562 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
750. Bukti P-179.563 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
751. Bukti P-179.564 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
752. Bukti P-179.565 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

753. Bukti P-179.566 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
754. Bukti P-179.567 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
755. Bukti P-179.568 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
756. Bukti P-179.569 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
757. Bukti P-179.570 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
758. Bukti P-179.571 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
759. Bukti P-179.572 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
760. Bukti P-179.573 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
761. Bukti P-179.574 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
762. Bukti P-179.575 : Tidak ada bukti fisik;
763. Bukti P-179.576 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
764. Bukti P-179.577 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
765. Bukti P-179.578 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
766. Bukti P-179.579 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
767. Bukti P-179.580 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
768. Bukti P-179.581 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tapa'an Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
769. Bukti P-179.582 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tapa'an Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
770. Bukti P-179.583 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tapa'an Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
771. Bukti P-179.584 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
772. Bukti P-179.585 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
773. Bukti P-179.586 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
774. Bukti P-179.587 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

775. Bukti P-179.588 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
776. Bukti P-179.589 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
777. Bukti P-179.590 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
778. Bukti P-179.591 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
779. Bukti P-179.592 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
780. Bukti P-179.593 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
781. Bukti P-179.594 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
782. Bukti P-179.595 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
783. Bukti P-179.596 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
784. Bukti P-179.597 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
785. Bukti P-179.598 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
786. Bukti P-179.599 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
787. Bukti P-179.600 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
788. Bukti P-179.601 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
789. Bukti P-179.602 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
790. Bukti P-179.603 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
791. Bukti P-179.604 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
792. Bukti P-179.605 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
793. Bukti P-179.606 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
794. Bukti P-179.607 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
795. Bukti P-179.608 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

796. Bukti P-179.609 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
797. Bukti P-179.610 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
798. Bukti P-179.611 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
799. Bukti P-179.612 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
800. Bukti P-179.613 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
801. Bukti P-179.614 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
802. Bukti P-179.615 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
803. Bukti P-179.616 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
804. Bukti P-179.617 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
805. Bukti P-179.618 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
806. Bukti P-179.619 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
807. Bukti P-179.620 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
808. Bukti P-179.621 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
809. Bukti P-179.622 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
810. Bukti P-179.623 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
811. Bukti P-179.624 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
812. Bukti P-179.625 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
813. Bukti P-179.626 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
814. Bukti P-179.627 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
815. Bukti P-179.628 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
816. Bukti P-179.629 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

817. Bukti P-179.630 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
818. Bukti P-179.631 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
819. Bukti P-179.632 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
820. Bukti P-179.633 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
821. Bukti P-179.634 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
822. Bukti P-179.635 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
823. Bukti P-179.636 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
824. Bukti P-179.637 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
825. Bukti P-179.638 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
826. Bukti P-179.639 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
827. Bukti P-179.640 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
828. Bukti P-179.641 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
829. Bukti P-179.642 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
830. Bukti P-179.643 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
831. Bukti P-179.644 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
832. Bukti P-179.645 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kedondong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
833. Bukti P-179.646 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
834. Bukti P-179.647 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
835. Bukti P-179.648 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
836. Bukti P-179.649 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
837. Bukti P-179.650 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

838. Bukti P-179.651 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
839. Bukti P-179.652 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Aenganyar Kecamatan Giliginting Kabupaten Sumenep;
840. Bukti P-179.653 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
841. Bukti P-179.654 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
842. Bukti P-179.655 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banmaleng Kecamatan Giliginting Kabupaten Sumenep;
843. Bukti P-179.656 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
844. Bukti P-179.657 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
845. Bukti P-179.658 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
846. Bukti P-179.659 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Buddi Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
847. Bukti P-179.660 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
848. Bukti P-179.661 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
849. Bukti P-179.662 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
850. Bukti P-179.663 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
851. Bukti P-179.664 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
852. Bukti P-179.665 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
853. Bukti P-179.666 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
854. Bukti P-179.667 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
855. Bukti P-179.668 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Payudan Dundang Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
856. Bukti P-179.669 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
857. Bukti P-179.670 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

858. Bukti P-179.671 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
859. Bukti P-179.672 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
860. Bukti P-179.673 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
861. Bukti P-179.674 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
862. Bukti P-179.675 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
863. Bukti P-179.676 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
864. Bukti P-179.677 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
865. Bukti P-179.678 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
866. Bukti P-179.679 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
867. Bukti P-179.680 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
868. Bukti P-179.681 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
869. Bukti P-179.682 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Karangan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
870. Bukti P-180.1 : Tabel TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan penggunaan DPT lebih dari 90%;
871. Bukti P-180.2 : Tabel Foto C-Hasil TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan penggunaan DPT lebih dari 90% yang didapat dari situs Sirekap KPU;
872. Bukti P-181.1 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Kranggan Kecamatan Purwotengah Kabupaten Kota Mojokerto;
873. Bukti P-181.2 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Kranggan Kecamatan Purwotengah Kabupaten Kota Mojokerto;
874. Bukti P-181.3 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 903 Desa Manguharjo Kecamatan Madiun Lor Kabupaten Kota Madiun;
875. Bukti P-181.4 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 903 Desa Manguharjo Kecamatan Madiun Lor Kabupaten Kota Madiun;

876. Bukti P-181.5 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 904 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
877. Bukti P-181.6 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 904 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
878. Bukti P-181.7 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Rabasan Kabupaten Sampang;
879. Bukti P-181.8 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Rabasan Kabupaten Sampang;
880. Bukti P-181.9 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 903 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
881. Bukti P-181.10 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 903 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
882. Bukti P-181.11 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 905 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
883. Bukti P-181.12 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 905 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
884. Bukti P-181.13 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenlor Kabupaten Kota Blitar;
885. Bukti P-181.14 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenlor Kabupaten Kota Blitar;
886. Bukti P-181.15 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Palenggaan Kecamatan Patoan Daja Kabupaten Pamekasan;
887. Bukti P-181.16 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Palenggaan Kecamatan Patoan Daja Kabupaten Pamekasan;
888. Bukti P-181.17 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 912 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
889. Bukti P-181.18 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 912 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;

890. Bukti P-181.19 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 909 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
891. Bukti P-181.20 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 909 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
892. Bukti P-181.21 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Panji Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo;
893. Bukti P-181.22 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Panji Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo;
894. Bukti P-181.23 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kranggan Kecamatan Purwotengah Kabupaten Kota Mojokerto;
895. Bukti P-181.24 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kranggan Kecamatan Purwotengah Kabupaten Kota Mojokerto;
896. Bukti P-181.25 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Mantingan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Ngawi;
897. Bukti P-181.26 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Mantingan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Ngawi;
898. Bukti P-181.27 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 904 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
899. Bukti P-181.28 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 904 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
900. Bukti P-181.29 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Bangil Kecamatan Kauman Kabupaten Pasuruan;
901. Bukti P-181.30 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Bangil Kecamatan Kauman Kabupaten Pasuruan;
902. Bukti P-181.31 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Diwek Kecamatan Cukir Kabupaten Jombang;
903. Bukti P-181.32 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Diwek Kecamatan Cukir Kabupaten Jombang;
904. Bukti P-181.33 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 913 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;

905. Bukti P-181.34 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 913 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
906. Bukti P-181.35 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Potoan Laok Kabupaten Pamekasan;
907. Bukti P-181.36 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Potoan Laok Kabupaten Pamekasan;
908. Bukti P-181.37 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Patoan Daja Kabupaten Pamekasan;
909. Bukti P-181.38 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Patoan Daja Kabupaten Pamekasan;
910. Bukti P-181.39 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kota Kediri;
911. Bukti P-181.40 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kota Kediri;
912. Bukti P-181.41 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Mantingan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Ngawi;
913. Bukti P-181.42 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Mantingan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Ngawi;
914. Bukti P-181.43 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Kedungdung Kecamatan Bajrasoka Kabupaten Sampang;
915. Bukti P-181.44 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Kedungdung Kecamatan Bajrasoka Kabupaten Sampang;
916. Bukti P-181.45 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 008 Desa Kedungdung Kecamatan Ombul Kabupaten Sampang;
917. Bukti P-181.46 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Kedungdung Kecamatan Ombul Kabupaten Sampang;
918. Bukti P-181.47 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Mayangan Kecamatan Mangunharjo Kabupaten Kota Probolinggo;

919. Bukti P-181.48 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Mayangan Kecamatan Mangunharjo Kabupaten Kota Probolinggo;
920. Bukti P-181.49 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 905 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
921. Bukti P-181.50 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 905 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
922. Bukti P-181.51 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Paciran Kecamatan Banjarwati Kabupaten Lamongan;
923. Bukti P-181.52 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Paciran Kecamatan Banjarwati Kabupaten Lamongan;
924. Bukti P-181.53 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Jombang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Jombang;
925. Bukti P-181.54 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Jombang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Jombang;
926. Bukti P-181.55 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Porong Kecamatan Kebonagung Kabupaten Sidoarjo;
927. Bukti P-181.56 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Porong Kecamatan Kebonagung Kabupaten Sidoarjo;
928. Bukti P-181.57 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Pegantenan Kecamatan Plakpak Kabupaten Pamekasan;
929. Bukti P-181.58 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Pegantenan Kecamatan Plakpak Kabupaten Pamekasan;
930. Bukti P-181.59 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
931. Bukti P-181.60 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
932. Bukti P-181.61 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Sukun Kecamatan Kebonsari Kabupaten Kota Malang;

933. Bukti P-181.62 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Sukun Kecamatan Kebonsari Kabupaten Kota Malang;
934. Bukti P-181.63 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
935. Bukti P-181.64 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
936. Bukti P-181.65 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Pamekasan Kecamatan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan;
937. Bukti P-181.66 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Pamekasan Kecamatan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan;
938. Bukti P-181.67 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 009 Desa Kedungdung Kecamatan Ombul Kabupaten Sampang;
939. Bukti P-181.68 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Kedungdung Kecamatan Ombul Kabupaten Sampang;
940. Bukti P-181.69 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Mlarak Kecamatan Gontor Kabupaten Ponorogo;
941. Bukti P-181.70 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Mlarak Kecamatan Gontor Kabupaten Ponorogo;
942. Bukti P-181.71 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Trenggalek Kecamatan Ngares Kabupaten Trenggalek;
943. Bukti P-181.72 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Trenggalek Kecamatan Ngares Kabupaten Trenggalek;
944. Bukti P-181.73 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kota Kecamatan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri;
945. Bukti P-181.74 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kota Kecamatan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri;
946. Bukti P-181.75 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 904 Desa Porong Kecamatan Kebonagung Kabupaten Sidoarjo;
947. Bukti P-181.76 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 904 Desa Porong Kecamatan Kebonagung Kabupaten Sidoarjo;

948. Bukti P-181.77 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
949. Bukti P-181.78 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
950. Bukti P-181.79 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 903 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
951. Bukti P-181.80 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 903 Desa Mojo Kecamatan Ploso Kabupaten Kediri;
952. Bukti P-181.81 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Kota Pasuruan;
953. Bukti P-181.82 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Kota Pasuruan;
954. Bukti P-181.83 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Palenggaan Kecamatan Kacok Kabupaten Pamekasan;
955. Bukti P-181.84 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Palenggaan Kecamatan Kacok Kabupaten Pamekasan;
956. Bukti P-181.85 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Situbondo Kecamatan Dawuhan Kabupaten Situbondo;
957. Bukti P-181.86 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Situbondo Kecamatan Dawuhan Kabupaten Situbondo;
958. Bukti P-181.87 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Mayangan Kecamatan Mangunharjo Kabupaten Kota Probolinggo;
959. Bukti P-181.88 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Mayangan Kecamatan Mangunharjo Kabupaten Kota Probolinggo;
960. Bukti P-181.89 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Pamekasan Kecamatan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan;
961. Bukti P-181.90 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Pamekasan Kecamatan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan;
962. Bukti P-181.91 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Daya Kabupaten Sampang;

963. Bukti P-181.92 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Sokobanah Kecamatan Sokobanah Daya Kabupaten Sampang;
964. Bukti P-181.93 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 904 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
965. Bukti P-181.94 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 904 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
966. Bukti P-181.95 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 903 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
967. Bukti P-181.96 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 903 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
968. Bukti P-181.97 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 911 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
969. Bukti P-181.98 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 911 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
970. Bukti P-181.99 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 905 Desa Panji Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo;
971. Bukti P-181.100 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 905 Desa Panji Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo;
972. Bukti P-181.101 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Widodaren Kecamatan Karangbanyu Kabupaten Ngawi;
973. Bukti P-181.102 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Widodaren Kecamatan Karangbanyu Kabupaten Ngawi;
974. Bukti P-181.103 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Diwek Kecamatan Cukir Kabupaten Jombang;
975. Bukti P-181.104 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Diwek Kecamatan Cukir Kabupaten Jombang;
976. Bukti P-181.105 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Paciran Kecamatan Banjarwati Kabupaten Lamongan;

977. Bukti P-181.106 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Paciran Kecamatan Banjarwati Kabupaten Lamongan;
978. Bukti P-181.107 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Ngawi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Ngawi;
979. Bukti P-181.108 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Ngawi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Ngawi;
980. Bukti P-181.109 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Tuban Kecamatan Sendangharjo Kabupaten Tuban;
981. Bukti P-181.110 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Tuban Kecamatan Sendangharjo Kabupaten Tuban;
982. Bukti P-181.111 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Pegantenan Kecamatan Plakpak Kabupaten Pamekasan;
983. Bukti P-181.112 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Pegantenan Kecamatan Plakpak Kabupaten Pamekasan;
984. Bukti P-181.113 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Karas Kecamatan Temboro Kabupaten Magetan;
985. Bukti P-181.114 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Karas Kecamatan Temboro Kabupaten Magetan;
986. Bukti P-181.115 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Panaan Kabupaten Pamekasan;
987. Bukti P-181.116 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Panaan Kabupaten Pamekasan;
988. Bukti P-181.117 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Blimbingsari Kecamatan Kaligung Kabupaten Banyuwangi;
989. Bukti P-181.118 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Blimbingsari Kecamatan Kaligung Kabupaten Banyuwangi;
990. Bukti P-181.119 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kota Kediri;

991. Bukti P-181.120 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kota Kediri;
992. Bukti P-181.121 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Jombang Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Jombang;
993. Bukti P-181.122 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Jombang Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Jombang;
994. Bukti P-181.123 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 910 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
995. Bukti P-181.124 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 910 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
996. Bukti P-181.125 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 023 Desa Sukun Kecamatan Pisangcandi Kabupaten Kota Malang;
997. Bukti P-181.126 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 023 Desa Sukun Kecamatan Pisangcandi Kabupaten Kota Malang;
998. Bukti P-181.127 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Robatal Kecamatan Gunung Rancak Kabupaten Sampang;
999. Bukti P-181.128 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Robatal Kecamatan Gunung Rancak Kabupaten Sampang;
1000. Bukti P-181.129 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Tegalsari Kecamatan Karangdoro Kabupaten Banyuwangi;
1001. Bukti P-181.130 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Tegalsari Kecamatan Karangdoro Kabupaten Banyuwangi;
1002. Bukti P-181.131 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Ngoro Kecamatan Rejoagung Kabupaten Jombang;
1003. Bukti P-181.132 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Ngoro Kecamatan Rejoagung Kabupaten Jombang;
1004. Bukti P-181.133 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 007 Desa Bondowoso Kecamatan Pancoran Kabupaten Bondowoso;

1005. Bukti P-181.134 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 007 Desa Bondowoso Kecamatan Pancoran Kabupaten Bondowoso;

1006. Bukti P-181.135 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Ponorogo Kecamatan Banyudono Kabupaten Ponorogo;

1007. Bukti P-181.136 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Ponorogo Kecamatan Banyudono Kabupaten Ponorogo;

1008. Bukti P-181.137 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Laok Kabupaten Sumenep;

1009. Bukti P-181.138 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Laok Kabupaten Sumenep;

1010. Bukti P-181.139 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Karas Kecamatan Temboro Kabupaten Magetan;

1011. Bukti P-181.140 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Karas Kecamatan Temboro Kabupaten Magetan;

1012. Bukti P-181.141 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Pesantren Kecamatan Burengan Kabupaten Kota Kediri;

1013. Bukti P-181.142 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Pesantren Kecamatan Burengan Kabupaten Kota Kediri;

1014. Bukti P-181.143 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Laok Kabupaten Sumenep;

1015. Bukti P-181.144 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Laok Kabupaten Sumenep;

1016. Bukti P-181.145 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 004 Desa Karangpenang Kecamatan Karangpenang Oloh Kabupaten Sampang;

1017. Bukti P-181.146 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Karangpenang Kecamatan Karangpenang Oloh Kabupaten Sampang;

1018. Bukti P-181.147 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Lumajang Kecamatan Jogotrunan Kabupaten Lumajang;

1019. Bukti P-181.148 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Lumajang Kecamatan Jogotrunan Kabupaten Lumajang;
1020. Bukti P-181.149 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Sidoarjo Kecamatan Magersari Kabupaten Sidoarjo;
1021. Bukti P-181.150 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Sidoarjo Kecamatan Magersari Kabupaten Sidoarjo;
1022. Bukti P-181.151 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Jombang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Jombang;
1023. Bukti P-181.152 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Jombang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Jombang;
1024. Bukti P-181.153 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 903 Desa Palenggaan Kecamatan Patoan Daja Kabupaten Pamekasan;
1025. Bukti P-181.154 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 903 Desa Palenggaan Kecamatan Patoan Daja Kabupaten Pamekasan;
1026. Bukti P-181.155 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 007 Desa Ketapang Kecamatan Paopale Laok Kabupaten Sampang;
1027. Bukti P-181.156 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 007 Desa Ketapang Kecamatan Paopale Laok Kabupaten Sampang;
1028. Bukti P-181.157 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Sampang Kecamatan Panggung Kabupaten Sampang;
1029. Bukti P-181.158 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Sampang Kecamatan Panggung Kabupaten Sampang;
1030. Bukti P-181.159 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Kacok Kabupaten Pamekasan
1031. Bukti P-181.160 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Palenggaan Kecamatan Kacok Kabupaten Pamekasan;
1032. Bukti P-181.161 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 903 Desa Pegantenan Kecamatan Plakpak Kabupaten Pamekasan;

1033. Bukti P-181.162 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 903 Desa Pegantenan Kecamatan Plakpak Kabupaten Pamekasan;
1034. Bukti P-181.163 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Bangil Kecamatan Dermo Kabupaten Pasuruan;
1035. Bukti P-181.164 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Bangil Kecamatan Dermo Kabupaten Pasuruan;
1036. Bukti P-181.165 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kraton Kecamatan Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
1037. Bukti P-181.166 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kraton Kecamatan Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
1038. Bukti P-181.167 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
1039. Bukti P-181.168 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
1040. Bukti P-181.169 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Sampang Kecamatan Gunung Sekar Kabupaten Sampang;
1041. Bukti P-181.170 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Sampang Kecamatan Gunung Sekar Kabupaten Sampang;
1042. Bukti P-181.171 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Nganjuk Kecamatan Kauman Kabupaten Nganjuk;
1043. Bukti P-181.172 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Nganjuk Kecamatan Kauman Kabupaten Nganjuk;
1044. Bukti P-181.173 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kraksaan Kecamatan Patokan Kabupaten Probolinggo;
1045. Bukti P-181.174 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kraksaan Kecamatan Patokan Kabupaten Probolinggo;
1046. Bukti P-181.175 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Sokobanah Kecamatan Bira Timur Kabupaten Sampang;

1047. Bukti P-181.176 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Sokobanah Kecamatan Bira Timur Kabupaten Sampang;
1048. Bukti P-181.177 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 004 Desa Tulangan Kecamatan Kedondong Kabupaten Sidoarjo;
1049. Bukti P-181.178 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Tulangan Kecamatan Kedondong Kabupaten Sidoarjo;
1050. Bukti P-181.179 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Palenggaan Kecamatan Panaan Kabupaten Pamekasan;
1051. Bukti P-181.180 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Palenggaan Kecamatan Panaan Kabupaten Pamekasan;
1052. Bukti P-181.181 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
1053. Bukti P-181.182 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
1054. Bukti P-181.183 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Patrang Kecamatan Jemberlor Kabupaten Jember;
1055. Bukti P-181.184 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Patrang Kecamatan Jemberlor Kabupaten Jember;
1056. Bukti P-181.185 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kejayan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
1057. Bukti P-181.186 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kejayan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
1058. Bukti P-181.187 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Jambesari Darus Sholah Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso;
1059. Bukti P-181.188 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Jambesari Darus Sholah Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso;
1060. Bukti P-181.189 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Lamongan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Lamongan;

1061. Bukti P-181.190 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Lamongan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Lamongan;
1062. Bukti P-181.191 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Sananwetan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Kota Blitar;
1063. Bukti P-181.192 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Sananwetan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Kota Blitar;
1064. Bukti P-181.193 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
1065. Bukti P-181.194 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
1066. Bukti P-181.195 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Sokobanah Kecamatan Tobai Tengah Kabupaten Sampang;
1067. Bukti P-181.196 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Sokobanah Kecamatan Tobai Tengah Kabupaten Sampang;
1068. Bukti P-181.197 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 004 Desa Kedungdung Kecamatan Pasarenan Kabupaten Sampang;
1069. Bukti P-181.198 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Kedungdung Kecamatan Pasarenan Kabupaten Sampang;
1070. Bukti P-181.199 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
1071. Bukti P-181.200 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Blimbing Kecamatan Bunulrejo Kabupaten Kota Malang;
1072. Bukti P-181.201 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Babadan Kecamatan Pondok Kabupaten Ponorogo;
1073. Bukti P-181.202 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Babadan Kecamatan Pondok Kabupaten Ponorogo;
1074. Bukti P-181.203 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Arjosari Kecamatan Tremas Kabupaten Pacitan;

1075. Bukti P-181.204 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Arjosari Kecamatan Tremas Kabupaten Pacitan;
1076. Bukti P-181.205 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 016 Desa Palenggaan Kecamatan Palengaan Dajah Kabupaten Pamekasan;
1077. Bukti P-181.206 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 016 Desa Palenggaan Kecamatan Palengaan Dajah Kabupaten Pamekasan;
1078. Bukti P-181.207 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Batuputih Kecamatan Batuputih Laok Kabupaten Sumenep;
1079. Bukti P-181.208 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Batuputih Kecamatan Batuputih Laok Kabupaten Sumenep;
1080. Bukti P-181.209 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Pacitan Kecamatan Baleharjo Kabupaten Pacitan;
1081. Bukti P-181.210 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Pacitan Kecamatan Baleharjo Kabupaten Pacitan;
1082. Bukti P-181.211 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Kapongan Kecamatan Peleyan Kabupaten Situbondo;
1083. Bukti P-181.212 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Kapongan Kecamatan Peleyan Kabupaten Situbondo;
1084. Bukti P-181.213 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Mantup Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lamongan;
1085. Bukti P-181.214 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Mantup Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lamongan;
1086. Bukti P-181.215 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 908 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
1087. Bukti P-181.216 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 908 Desa Banyuputih Kecamatan Sumberejo Kabupaten Situbondo;
1088. Bukti P-181.217 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

1089. Bukti P-181.218 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
1090. Bukti P-181.219 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 902 Desa Arjosari Kecamatan Tremas Kabupaten Pacitan;
1091. Bukti P-181.220 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 902 Desa Arjosari Kecamatan Tremas Kabupaten Pacitan;
1092. Bukti P-181.221 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Bangkalan Kecamatan Pejagan Kabupaten Bangkalan;
1093. Bukti P-181.222 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Bangkalan Kecamatan Pejagan Kabupaten Bangkalan;
1094. Bukti P-181.223 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 901 Desa Grati Kecamatan Kedawungwetan Kabupaten Pasuruan;
1095. Bukti P-181.224 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 901 Desa Grati Kecamatan Kedawungwetan Kabupaten Pasuruan;
1096. Bukti P-181.225 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 007 Desa Sapeken Kecamatan Sepanjang Kabupaten Sumenep;
1097. Bukti P-181.226 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 007 Desa Sapeken Kecamatan Sepanjang Kabupaten Sumenep;
1098. Bukti P-181.227 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Kedungdung Kecamatan Pajeruan Kabupaten Sampang;
1099. Bukti P-181.228 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Kedungdung Kecamatan Pajeruan Kabupaten Sampang;
1100. Bukti P-181.229 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 011 Desa Glenmore Kecamatan Tegalharjo Kabupaten Banyuwangi;
1101. Bukti P-181.230 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 011 Desa Glenmore Kecamatan Tegalharjo Kabupaten Banyuwangi;
1102. Bukti P-181.231 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Banyuates Kecamatan Batioh Kabupaten Sampang;

1103. Bukti P-181.232 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Banyuates Kecamatan Batioh Kabupaten Sampang;
1104. Bukti P-181.233 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Sapeken Kecamatan Sepanjang Kabupaten Sumenep;
1105. Bukti P-181.234 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Sapeken Kecamatan Sepanjang Kabupaten Sumenep;
1106. Bukti P-181.235 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 009 Desa Manguharjo Kecamatan Nambangan Kidul Kabupaten Kota Madiun;
1107. Bukti P-181.236 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Manguharjo Kecamatan Nambangan Kidul Kabupaten Kota Madiun;
1108. Bukti P-181.237 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 013 Desa Kedungdung Kecamatan Pajeruan Kabupaten Sampang;
1109. Bukti P-181.238 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 013 Desa Kedungdung Kecamatan Pajeruan Kabupaten Sampang;
1110. Bukti P-181.239 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Robatal Kecamatan Pandiyangan Kabupaten Sampang;
1111. Bukti P-181.240 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Robatal Kecamatan Pandiyangan Kabupaten Sampang;
1112. Bukti P-181.241 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 004 Desa Kedungdung Kecamatan Banyukapah Kabupaten Sampang;
1113. Bukti P-181.242 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Kedungdung Kecamatan Banyukapah Kabupaten Sampang;
1114. Bukti P-181.243 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 008 Desa Robatal Kecamatan Jelgung Kabupaten Sampang;
1115. Bukti P-181.244 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Robatal Kecamatan Jelgung Kabupaten Sampang;
1116. Bukti P-181.245 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Kota Kecamatan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri;

1117. Bukti P-181.246 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Kota Kecamatan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri;
1118. Bukti P-181.247 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 011 Desa Karangpenang Kecamatan Gunung Kesan Kabupaten Sampang;
1119. Bukti P-181.248 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 011 Desa Karangpenang Kecamatan Gunung Kesan Kabupaten Sampang;
1120. Bukti P-181.249 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 013 Desa Kepung Kecamatan Krenceng Kabupaten Kediri;
1121. Bukti P-181.250 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 013 Desa Kepung Kecamatan Krenceng Kabupaten Kediri;
1122. Bukti P-181.251 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Pamekasan Kecamatan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan;
1123. Bukti P-181.252 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Pamekasan Kecamatan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan;
1124. Bukti P-181.253 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Wonosari Kecamatan Pasarejo Kabupaten Bondowoso;
1125. Bukti P-181.254 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Wonosari Kecamatan Pasarejo Kabupaten Bondowoso;
1126. Bukti P-181.255 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Bangkalan Kecamatan Pangeranan Kabupaten Bangkalan;
1127. Bukti P-181.256 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Bangkalan Kecamatan Pangeranan Kabupaten Bangkalan;
1128. Bukti P-181.257 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Arjasa Kecamatan Kalisangka Kabupaten Sumenep;
1129. Bukti P-181.258 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Arjasa Kecamatan Kalisangka Kabupaten Sumenep;
1130. Bukti P-181.259 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 016 Desa Wonocolo Kecamatan Jemur Wonosari Kabupaten Kota Surabaya;

1131. Bukti P-181.260 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 016 Desa Wonocolo Kecamatan Jemur Wonosari Kabupaten Kota Surabaya;
1132. Bukti P-181.261 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Pesantren Kecamatan Singonegaran Kabupaten Kota Kediri;
1133. Bukti P-181.262 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Pesantren Kecamatan Singonegaran Kabupaten Kota Kediri;
1134. Bukti P-181.263 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Robatal Kecamatan Lepelle Kabupaten Sampang;
1135. Bukti P-181.264 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Robatal Kecamatan Lepelle Kabupaten Sampang;
1136. Bukti P-181.265 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 004 Desa Lembeyan Kecamatan Pupus Kabupaten Magetan;
1137. Bukti P-181.266 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Lembeyan Kecamatan Pupus Kabupaten Magetan;
1138. Bukti P-181.267 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Larangan Kecamatan Lancar Kabupaten Pamekasan;
1139. Bukti P-181.268 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Larangan Kecamatan Lancar Kabupaten Pamekasan;
1140. Bukti P-181.269 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 009 Desa Robatal Kecamatan Lepelle Kabupaten Sampang;
1141. Bukti P-181.270 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Robatal Kecamatan Lepelle Kabupaten Sampang;
1142. Bukti P-181.271 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 023 Desa Bangkalan Kecamatan Pejagan Kabupaten Bangkalan;
1143. Bukti P-181.272 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 023 Desa Bangkalan Kecamatan Pejagan Kabupaten Bangkalan;
1144. Bukti P-181.273 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 007 Desa Galis Kecamatan Banyu Bunih Kabupaten Bangkalan;

1145. Bukti P-181.274 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 007 Desa Galis Kecamatan Banyu Bunih Kabupaten Bangkalan;
1146. Bukti P-181.275 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Tulungagung Kecamatan Bago Kabupaten Tulungagung;
1147. Bukti P-181.276 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Tulungagung Kecamatan Bago Kabupaten Tulungagung;
1148. Bukti P-181.277 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Tulungagung Kecamatan Jepun Kabupaten Tulungagung;
1149. Bukti P-181.278 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Tulungagung Kecamatan Jepun Kabupaten Tulungagung;
1150. Bukti P-181.279 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Nganjuk Kecamatan Kramat Kabupaten Nganjuk;
1151. Bukti P-181.280 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Nganjuk Kecamatan Kramat Kabupaten Nganjuk;
1152. Bukti P-181.281 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;
1153. Bukti P-181.282 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;
1154. Bukti P-181.283 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 008 Desa Kota Sumenep Kecamatan Pabian Kabupaten Sumenep;
1155. Bukti P-181.284 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Kota Sumenep Kecamatan Pabian Kabupaten Sumenep;
1156. Bukti P-181.285 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Sapeken Kecamatan Pagerungan Besar Kabupaten Sumenep;
1157. Bukti P-181.286 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Sapeken Kecamatan Pagerungan Besar Kabupaten Sumenep;
1158. Bukti P-181.287 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 009 Desa Srono Kecamatan Bagorejo Kabupaten Banyuwangi;

1159. Bukti P-181.288 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Srono Kecamatan Bagorejo Kabupaten Banyuwangi;
1160. Bukti P-181.289 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 008 Desa Pakis Kecamatan Bunutwetan Kabupaten Malang;
1161. Bukti P-181.290 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Pakis Kecamatan Bunutwetan Kabupaten Malang;
1162. Bukti P-181.291 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 010 Desa Blimbing Kecamatan Arjosari Kabupaten Kota Malang;
1163. Bukti P-181.292 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 010 Desa Blimbing Kecamatan Arjosari Kabupaten Kota Malang;
1164. Bukti P-181.293 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 004 Desa Klojen Kecamatan Gading Kasri Kabupaten Kota Malang;
1165. Bukti P-181.294 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Klojen Kecamatan Gading Kasri Kabupaten Kota Malang;
1166. Bukti P-181.295 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Klojen Kecamatan Kauman Kabupaten Kota Malang;
1167. Bukti P-181.296 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Klojen Kecamatan Kauman Kabupaten Kota Malang;
1168. Bukti P-181.297 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 013 Desa Klojen Kecamatan Penanggungan Kabupaten Kota Malang;
1169. Bukti P-181.298 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 013 Desa Klojen Kecamatan Penanggungan Kabupaten Kota Malang;
1170. Bukti P-181.299 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 011 Desa Kadur Kecamatan Pamoroh Kabupaten Pamekasan;
1171. Bukti P-181.300 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 011 Desa Kadur Kecamatan Pamoroh Kabupaten Pamekasan;
1172. Bukti P-181.301 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Tamanan Kecamatan Kalianyar Kabupaten Bondowoso;

1173. Bukti P-181.302 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Tamanan Kecamatan Kalianyar Kabupaten Bondowoso
1174. Bukti P-181.303 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 007 Desa Ketapang Kecamatan Pangereman Kabupaten Sampang;
1175. Bukti P-181.304 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 007 Desa Ketapang Kecamatan Pangereman Kabupaten Sampang;
1176. Bukti P-181.305 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Robatal Kecamatan Sawah Tengah Kabupaten Sampang;
1177. Bukti P-181.306 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Robatal Kecamatan Sawah Tengah Kabupaten Sampang;
1178. Bukti P-181.307 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Sampang Kecamatan P. Mandangin Kabupaten Sampang;
1179. Bukti P-181.308 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Sampang Kecamatan P. Mandangin Kabupaten Sampang;
1180. Bukti P-181.309 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Sampang Kecamatan Rongtengah Kabupaten Sampang;
1181. Bukti P-181.310 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Sampang Kecamatan Rongtengah Kabupaten Sampang;
1182. Bukti P-181.311 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Kedunggalar Kecamatan Bangunrejo Kidul Kabupaten Ngawi;
1183. Bukti P-181.312 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Kedunggalar Kecamatan Bangunrejo Kidul Kabupaten Ngawi;
1184. Bukti P-181.313 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 013 Desa Bangkalan Kecamatan Pejagan Kabupaten Bangkalan;
1185. Bukti P-181.314 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 013 Desa Bangkalan Kecamatan Pejagan Kabupaten Bangkalan;
1186. Bukti P-181.315 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 003 Desa Babadan Kecamatan Ngunut Kabupaten Ponorogo;

1187. Bukti P-181.316 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 003 Desa Babadan Kecamatan Ngunut Kabupaten Ponorogo;
1188. Bukti P-181.317 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 019 Desa Pasirian Kecamatan Bades Kabupaten Lumajang;
1189. Bukti P-181.318 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 019 Desa Pasirian Kecamatan Bades Kabupaten Lumajang;
1190. Bukti P-181.319 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 006 Desa Boyolangu Kecamatan Waung Kabupaten Tulungagung;
1191. Bukti P-181.320 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Boyolangu Kecamatan Waung Kabupaten Tulungagung;
1192. Bukti P-181.321 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Gondang Kecamatan Ngujung Kabupaten Nganjuk;
1193. Bukti P-181.322 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Gondang Kecamatan Ngujung Kabupaten Nganjuk;
1194. Bukti P-181.323 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Kertosono Kecamatan Tanjung Kabupaten Nganjuk;
1195. Bukti P-181.324 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Kertosono Kecamatan Tanjung Kabupaten Nganjuk;
1196. Bukti P-181.325 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Dringu Kecamatan Kedungdalem Kabupaten Probolinggo;
1197. Bukti P-181.326 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Dringu Kecamatan Kedungdalem Kabupaten Probolinggo;
1198. Bukti P-181.327 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 008 Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
1199. Bukti P-181.328 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
1200. Bukti P-181.329 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 009 Desa Gempol Kecamatan Carat Kabupaten Pasuruan;

1201. Bukti P-181.330 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Gempol Kecamatan Carat Kabupaten Pasuruan;
1202. Bukti P-181.331 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 010 Desa Gondangwetan Kecamatan Karangsentul Kabupaten Pasuruan;
1203. Bukti P-181.332 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 010 Desa Gondangwetan Kecamatan Karangsentul Kabupaten Pasuruan;
1204. Bukti P-181.333 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Purwodadi Kecamatan Lebak Rejo Kabupaten Pasuruan;
1205. Bukti P-181.334 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Purwodadi Kecamatan Lebak Rejo Kabupaten Pasuruan;
1206. Bukti P-181.335 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Gampengrejo Kecamatan Ngebrak Kabupaten Kediri;
1207. Bukti P-181.336 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Gampengrejo Kecamatan Ngebrak Kabupaten Kediri;
1208. Bukti P-181.337 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 009 Desa Kayen Kidul Kecamatan Padangan Kabupaten Kediri;
1209. Bukti P-181.338 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 009 Desa Kayen Kidul Kecamatan Padangan Kabupaten Kediri;
1210. Bukti P-181.339 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 015 Desa Pare Kecamatan Tulungrejo Kabupaten Kediri;
1211. Bukti P-181.340 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 015 Desa Pare Kecamatan Tulungrejo Kabupaten Kediri;
1212. Bukti P-181.341 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 001 Desa Semen Kecamatan Bulu Kabupaten Kediri;
1213. Bukti P-181.342 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Semen Kecamatan Bulu Kabupaten Kediri;
1214. Bukti P-181.343 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Cluring Kecamatan Benculuk Kabupaten Banyuwangi;
1215. Bukti P-181.344 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Cluring Kecamatan Benculuk Kabupaten Banyuwangi;

1216. Bukti P-181.345 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Cluring Kecamatan Sraten Kabupaten Banyuwangi;
1217. Bukti P-181.346 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Cluring Kecamatan Sraten Kabupaten Banyuwangi;
1218. Bukti P-181.347 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 033 Desa Genteng Kecamatan Kembiritan Kabupaten Banyuwangi;
1219. Bukti P-181.348 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 033 Desa Genteng Kecamatan Kembiritan Kabupaten Banyuwangi;
1220. Bukti P-181.349 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
1221. Bukti P-181.350 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
1222. Bukti P-181.351 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 002 Desa Tulangan Kecamatan Janti Kabupaten Sidoarjo;
1223. Bukti P-181.352 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Tulangan Kecamatan Janti Kabupaten Sidoarjo;
1224. Bukti P-181.353 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 042 Desa Patrang Kecamatan Gebang Kabupaten Jember;
1225. Bukti P-181.354 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 042 Desa Patrang Kecamatan Gebang Kabupaten Jember;
1226. Bukti P-181.355 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 008 Desa Dampit Kecamatan Sukodono Kabupaten Malang;
1227. Bukti P-181.356 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 008 Desa Dampit Kecamatan Sukodono Kabupaten Malang;
1228. Bukti P-181.357 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Gubernur TPS 005 Desa Wajak Kecamatan Dadapan Kabupaten Malang;
1229. Bukti P-181.358 : Cetak Foto C-Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota TPS 005 Desa Wajak Kecamatan Dadapan Kabupaten Malang;

1230. Bukti P-182.1 : Tabel jumlah suara Pemohon di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara di 3.900 TPS;
1231. Bukti P-182.2 : Tabel Foto C-Hasil dan jumlah suara Pemohon di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara di 3.900 TPS yang didapat dari situs Sirekap KPU;
1232. Bukti P-183.1 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1233. Bukti P-183.2 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
1234. Bukti P-183.3 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Alang Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
1235. Bukti P-183.4 : Tidak Ada Bukti Fisik;
1236. Bukti P-183.5 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
1237. Bukti P-183.6 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bangserreh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1238. Bukti P-183.7 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1239. Bukti P-183.8 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1240. Bukti P-183.9 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1241. Bukti P-183.10 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1242. Bukti P-183.11 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1243. Bukti P-183.12 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1244. Bukti P-183.13 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1245. Bukti P-183.14 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1246. Bukti P-183.15 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1247. Bukti P-183.16 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1248. Bukti P-183.17 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1249. Bukti P-183.18 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1250. Bukti P-183.19 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;

1251. Bukti P-183.20 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Lesong Laok Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1252. Bukti P-183.21 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
1253. Bukti P-183.22 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kacok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
1254. Bukti P-183.23 : Cetak Foto C-Hasil TPS 901 Desa Kacok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
1255. Bukti P-183.24 : Cetak Foto C-Hasil TPS 902 Desa Kacok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
1256. Bukti P-183.25 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Patoan Daja Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
1257. Bukti P-183.26 : Cetak Foto C-Hasil TPS 901 Desa Potoan Laok Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan;
1258. Bukti P-183.27 : Cetak Foto C-Hasil TPS 901 Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
1259. Bukti P-183.28 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
1260. Bukti P-183.29 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
1261. Bukti P-183.30 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
1262. Bukti P-183.31 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
1263. Bukti P-183.32 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
1264. Bukti P-183.33 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;
1265. Bukti P-183.34 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1266. Bukti P-183.35 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1267. Bukti P-183.36 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1268. Bukti P-183.37 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1269. Bukti P-183.38 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1270. Bukti P-183.39 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1271. Bukti P-183.40 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

1272. Bukti P-183.41 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1273. Bukti P-183.42 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1274. Bukti P-183.43 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1275. Bukti P-183.44 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1276. Bukti P-183.45 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1277. Bukti P-183.46 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1278. Bukti P-183.47 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1279. Bukti P-183.48 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1280. Bukti P-183.49 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tapa'an Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1281. Bukti P-183.50 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tapa'an Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1282. Bukti P-183.51 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tapa'an Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1283. Bukti P-183.52 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1284. Bukti P-183.53 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1285. Bukti P-183.54 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1286. Bukti P-183.55 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1287. Bukti P-183.56 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1288. Bukti P-183.57 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1289. Bukti P-183.58 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1290. Bukti P-183.59 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1291. Bukti P-183.60 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1292. Bukti P-183.61 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

1293. Bukti P-183.62 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
1294. Bukti P-183.63 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banjartabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
1295. Bukti P-183.64 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banjartabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
1296. Bukti P-183.65 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
1297. Bukti P-183.66 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
1298. Bukti P-183.67 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1299. Bukti P-183.68 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1300. Bukti P-183.69 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1301. Bukti P-183.70 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1302. Bukti P-183.71 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1303. Bukti P-183.72 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1304. Bukti P-183.73 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1305. Bukti P-183.74 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1306. Bukti P-183.75 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1307. Bukti P-183.76 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Blu Uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1308. Bukti P-183.77 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1309. Bukti P-183.78 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1310. Bukti P-183.79 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1311. Bukti P-183.80 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1312. Bukti P-183.81 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1313. Bukti P-183.82 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

1314. Bukti P-183.83 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1315. Bukti P-183.84 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1316. Bukti P-183.85 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1317. Bukti P-183.86 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1318. Bukti P-183.87 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1319. Bukti P-183.88 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1320. Bukti P-183.89 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1321. Bukti P-183.90 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1322. Bukti P-183.91 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1323. Bukti P-183.92 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1324. Bukti P-183.93 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1325. Bukti P-183.94 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1326. Bukti P-183.95 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1327. Bukti P-183.96 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1328. Bukti P-183.97 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1329. Bukti P-183.98 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1330. Bukti P-183.99 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;

1331. Bukti P-183.100 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1332. Bukti P-183.101 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1333. Bukti P-183.102 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1334. Bukti P-183.103 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1335. Bukti P-183.104 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1336. Bukti P-183.105 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
1337. Bukti P-183.106 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bajrasoka Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1338. Bukti P-183.107 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1339. Bukti P-183.108 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1340. Bukti P-183.109 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1341. Bukti P-183.110 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1342. Bukti P-183.111 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1343. Bukti P-183.112 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1344. Bukti P-183.113 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1345. Bukti P-183.114 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1346. Bukti P-183.115 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1347. Bukti P-183.116 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1348. Bukti P-183.117 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1349. Bukti P-183.118 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1350. Bukti P-183.119 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1351. Bukti P-183.120 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

1352. Bukti P-183.121 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1353. Bukti P-183.122 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Palenggian Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
1354. Bukti P-183.123 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1355. Bukti P-183.124 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1356. Bukti P-183.125 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1357. Bukti P-183.126 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1358. Bukti P-183.127 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1359. Bukti P-183.128 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1360. Bukti P-183.129 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1361. Bukti P-183.130 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1362. Bukti P-183.131 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1363. Bukti P-183.132 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1364. Bukti P-183.133 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1365. Bukti P-183.134 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1366. Bukti P-183.135 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1367. Bukti P-183.136 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1368. Bukti P-183.137 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1369. Bukti P-183.138 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1370. Bukti P-183.139 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1371. Bukti P-183.140 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1372. Bukti P-183.141 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

1373. Bukti P-183.142 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1374. Bukti P-183.143 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1375. Bukti P-183.144 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1376. Bukti P-183.145 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1377. Bukti P-183.146 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1378. Bukti P-183.147 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1379. Bukti P-183.148 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1380. Bukti P-183.149 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1381. Bukti P-183.150 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1382. Bukti P-183.151 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1383. Bukti P-183.152 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1384. Bukti P-183.153 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1385. Bukti P-183.154 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1386. Bukti P-183.155 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1387. Bukti P-183.156 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1388. Bukti P-183.157 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1389. Bukti P-183.158 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Paopale Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1390. Bukti P-183.159 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1391. Bukti P-183.160 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
1392. Bukti P-183.161 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1393. Bukti P-183.162 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

1394. Bukti P-183.163 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1395. Bukti P-183.164 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1396. Bukti P-183.165 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1397. Bukti P-183.166 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Napo Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1398. Bukti P-183.167 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1399. Bukti P-183.168 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1400. Bukti P-183.169 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1401. Bukti P-183.170 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
1402. Bukti P-183.171 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1403. Bukti P-183.172 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1404. Bukti P-183.173 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1405. Bukti P-183.174 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1406. Bukti P-183.175 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1407. Bukti P-183.176 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1408. Bukti P-183.177 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1409. Bukti P-183.178 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1410. Bukti P-183.179 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1411. Bukti P-183.180 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1412. Bukti P-183.181 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1413. Bukti P-183.182 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1414. Bukti P-183.183 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

1415. Bukti P-183.184 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1416. Bukti P-183.185 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1417. Bukti P-183.186 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1418. Bukti P-183.187 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1419. Bukti P-183.188 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1420. Bukti P-183.189 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
1421. Bukti P-183.190 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1422. Bukti P-183.191 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1423. Bukti P-183.192 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1424. Bukti P-183.193 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1425. Bukti P-183.194 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1426. Bukti P-183.195 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1427. Bukti P-183.196 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1428. Bukti P-183.197 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1429. Bukti P-183.198 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1430. Bukti P-183.199 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1431. Bukti P-183.200 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1432. Bukti P-183.201 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1433. Bukti P-183.202 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1434. Bukti P-183.203 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1435. Bukti P-183.204 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

1436. Bukti P-183.205 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1437. Bukti P-183.206 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1438. Bukti P-183.207 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1439. Bukti P-183.208 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1440. Bukti P-183.209 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1441. Bukti P-183.210 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1442. Bukti P-183.211 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1443. Bukti P-183.212 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1444. Bukti P-183.213 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1445. Bukti P-183.214 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1446. Bukti P-183.215 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1447. Bukti P-183.216 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1448. Bukti P-183.217 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1449. Bukti P-183.218 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1450. Bukti P-183.219 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1451. Bukti P-183.220 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1452. Bukti P-183.221 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1453. Bukti P-183.222 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1454. Bukti P-183.223 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

1455. Bukti P-183.224 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1456. Bukti P-183.225 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1457. Bukti P-183.226 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1458. Bukti P-183.227 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1459. Bukti P-183.228 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1460. Bukti P-183.229 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1461. Bukti P-183.230 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1462. Bukti P-183.231 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1463. Bukti P-183.232 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1464. Bukti P-183.233 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1465. Bukti P-183.234 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1466. Bukti P-183.235 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1467. Bukti P-183.236 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1468. Bukti P-183.237 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1469. Bukti P-183.238 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1470. Bukti P-183.239 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1471. Bukti P-183.240 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1472. Bukti P-183.241 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1473. Bukti P-183.242 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1474. Bukti P-183.243 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1475. Bukti P-183.244 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

1476. Bukti P-183.245 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
1477. Bukti P-183.246 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banjarbillah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
1478. Bukti P-183.247 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Banjarbillah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
1479. Bukti P-183.248 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
1480. Bukti P-183.249 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
1481. Bukti P-183.250 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
1482. Bukti P-183.251 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
1483. Bukti P-183.252 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
1484. Bukti P-183.253 : Cetak Foto C-Hasil TPS 901 Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
1485. Bukti P-183.254 : Cetak Foto C-Hasil TPS 902 Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
1486. Bukti P-183.255 : Cetak Foto C-Hasil TPS 903 Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
1487. Bukti P-183.256 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep;
1488. Bukti P-183.257 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tamidung Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep;
1489. Bukti P-183.258 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
1490. Bukti P-183.259 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep;
1491. Bukti P-183.260 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Masakambing Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
1492. Bukti P-183.261 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
1493. Bukti P-183.262 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
1494. Bukti P-183.263 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jungkat Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep;
1495. Bukti P-183.264 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
1496. Bukti P-183.265 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

1497. Bukti P-183.266 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Sabunten Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
1498. Bukti P-184.1 : Tabel TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur yang memiliki suara tidak sah lebih dari 10%;
1499. Bukti P-184.2 : Tabel Foto C-Hasil TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur yang memiliki suara tidak sah lebih dari 10% yang didapat dari situs Sirekap KPU;
1500. Bukti P-185.1 : Tabel per TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali;
1501. Bukti P-185.2 : Tabel C-Hasil situs Sirekap KPU per TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali;
1502. Bukti P-186.1 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1503. Bukti P-186.2 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banjar TPS 001 Kabupaten Bangkalan;
1504. Bukti P-186.3 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1505. Bukti P-186.4 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banjar TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1506. Bukti P-186.5 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1507. Bukti P-186.6 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banjar TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1508. Bukti P-186.7 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1509. Bukti P-186.8 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banjar TPS 005 Kabupaten Bangkalan;
1510. Bukti P-186.9 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1511. Bukti P-186.10 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banjar TPS 007 Kabupaten Bangkalan;
1512. Bukti P-186.11 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1513. Bukti P-186.12 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banjar TPS 008 Kabupaten Bangkalan;
1514. Bukti P-186.13 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1515. Bukti P-186.14 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 001 Kabupaten Bangkalan;

1516. Bukti P-186.15 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1517. Bukti P-186.16 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1518. Bukti P-186.17 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1519. Bukti P-186.18 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1520. Bukti P-186.19 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1521. Bukti P-186.20 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 004 Kabupaten Bangkalan;
1522. Bukti P-186.21 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1523. Bukti P-186.22 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 005 Kabupaten Bangkalan;
1524. Bukti P-186.23 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1525. Bukti P-186.24 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 007 Kabupaten Bangkalan;
1526. Bukti P-186.25 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1527. Bukti P-186.26 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 008 Kabupaten Bangkalan;
1528. Bukti P-186.27 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1529. Bukti P-186.28 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 009 Kabupaten Bangkalan;
1530. Bukti P-186.29 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1531. Bukti P-186.30 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 010 Kabupaten Bangkalan;
1532. Bukti P-186.31 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1533. Bukti P-186.32 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 011 Kabupaten Bangkalan;
1534. Bukti P-186.33 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1535. Bukti P-186.34 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 012 Kabupaten Bangkalan;
1536. Bukti P-186.35 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

1537. Bukti P-186.36 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Banyu Bunih TPS 013 Kabupaten Bangkalan;
1538. Bukti P-186.37 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1539. Bukti P-186.38 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Kajuanak TPS 001 Kabupaten Bangkalan;
1540. Bukti P-186.39 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1541. Bukti P-186.40 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Kajuanak TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1542. Bukti P-186.41 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1543. Bukti P-186.42 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Kajuanak TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1544. Bukti P-186.43 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1545. Bukti P-186.44 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Kajuanak TPS 004 Kabupaten Bangkalan;
1546. Bukti P-186.45 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1547. Bukti P-186.46 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Separah TPS 001 Kabupaten Bangkalan;
1548. Bukti P-186.47 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1549. Bukti P-186.48 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Separah TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1550. Bukti P-186.49 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1551. Bukti P-186.50 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Separah TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1552. Bukti P-186.51 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1553. Bukti P-186.52 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Tellok TPS 001 Kabupaten Bangkalan;
1554. Bukti P-186.53 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1555. Bukti P-186.54 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Tellok TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1556. Bukti P-186.55 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1557. Bukti P-186.56 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Tellok TPS 003 Kabupaten Bangkalan;

1558. Bukti P-186.57 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
1559. Bukti P-186.58 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Galis Desa Tlagah TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1560. Bukti P-186.59 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1561. Bukti P-186.60 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Banyoneng Laok TPS 001 Kabupaten Bangkalan;
1562. Bukti P-186.61 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1563. Bukti P-186.62 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Banyoneng Laok TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1564. Bukti P-186.63 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1565. Bukti P-186.64 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Banyoneng Laok TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1566. Bukti P-186.65 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1567. Bukti P-186.66 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Banyoneng Laok TPS 004 Kabupaten Bangkalan;
1568. Bukti P-186.67 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1569. Bukti P-186.68 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Banyoneng Laok TPS 007 Kabupaten Bangkalan;
1570. Bukti P-186.69 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1571. Bukti P-186.70 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Banyoneng Laok TPS 009 Kabupaten Bangkalan;
1572. Bukti P-186.71 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1573. Bukti P-186.72 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 002 Kabupaten Bangkalan;
1574. Bukti P-186.73 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1575. Bukti P-186.74 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 003 Kabupaten Bangkalan;
1576. Bukti P-186.75 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1577. Bukti P-186.76 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 004 Kabupaten Bangkalan;
1578. Bukti P-186.77 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

1579. Bukti P-186.78 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 005 Kabupaten Bangkalan;
1580. Bukti P-186.79 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1581. Bukti P-186.80 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 006 Kabupaten Bangkalan;
1582. Bukti P-186.81 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1583. Bukti P-186.82 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 007 Kabupaten Bangkalan;
1584. Bukti P-186.83 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kombangan KecamatanGeger Kabupaten Bangkalan;
1585. Bukti P-186.84 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 008 Kabupaten Bangkalan;
1586. Bukti P-186.85 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
1587. Bukti P-186.86 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Geger Desa Kombangan TPS 009 Kabupaten Bangkalan;
1588. Bukti P-186.87 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
1589. Bukti P-186.88 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tempurejo Desa Tempurejo TPS 016 Kabupaten Jember;
1590. Bukti P-186.89 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1591. Bukti P-186.90 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
1592. Bukti P-186.91 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1593. Bukti P-186.92 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1594. Bukti P-186.93 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1595. Bukti P-186.94 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1596. Bukti P-186.95 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1597. Bukti P-186.96 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;

1598. Bukti P-186.97 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1599. Bukti P-186.98 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1600. Bukti P-186.99 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1601. Bukti P-186.100 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
1602. Bukti P-186.101 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1603. Bukti P-186.102 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1604. Bukti P-186.103 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1605. Bukti P-186.104 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1606. Bukti P-186.105 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1607. Bukti P-186.106 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1608. Bukti P-186.107 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1609. Bukti P-186.108 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Alun-Alun Contong TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1610. Bukti P-186.109 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1611. Bukti P-186.110 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
1612. Bukti P-186.111 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1613. Bukti P-186.112 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1614. Bukti P-186.113 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1615. Bukti P-186.114 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;

1616. Bukti P-186.115 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1617. Bukti P-186.116 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1618. Bukti P-186.117 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1619. Bukti P-186.118 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1620. Bukti P-186.119 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya
1621. Bukti P-186.120 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya
1622. Bukti P-186.121 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1623. Bukti P-186.122 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1624. Bukti P-186.123 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1625. Bukti P-186.124 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1626. Bukti P-186.125 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1627. Bukti P-186.126 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1628. Bukti P-186.127 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1629. Bukti P-186.128 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1630. Bukti P-186.129 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1631. Bukti P-186.130 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1632. Bukti P-186.131 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1633. Bukti P-186.132 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
1634. Bukti P-186.133 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1635. Bukti P-186.134 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1636. Bukti P-186.135 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;

1637. Bukti P-186.136 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
1638. Bukti P-186.137 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1639. Bukti P-186.138 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1640. Bukti P-186.139 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1641. Bukti P-186.140 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
1642. Bukti P-186.141 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1643. Bukti P-186.142 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1644. Bukti P-186.143 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Bubutan Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1645. Bukti P-186.144 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Bubutan TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1646. Bukti P-186.145 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1647. Bukti P-186.146 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
1648. Bukti P-186.147 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1649. Bukti P-186.148 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1650. Bukti P-186.149 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1651. Bukti P-186.150 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1652. Bukti P-186.151 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1653. Bukti P-186.152 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1654. Bukti P-186.153 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1655. Bukti P-186.154 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1656. Bukti P-186.155 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1657. Bukti P-186.156 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;

1658. Bukti P-186.157 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1659. Bukti P-186.158 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1660. Bukti P-186.159 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1661. Bukti P-186.160 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1662. Bukti P-186.161 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1663. Bukti P-186.162 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1664. Bukti P-186.163 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1665. Bukti P-186.164 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1666. Bukti P-186.165 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1667. Bukti P-186.166 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
1668. Bukti P-186.167 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1669. Bukti P-186.168 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1670. Bukti P-186.169 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1671. Bukti P-186.170 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
1672. Bukti P-186.171 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1673. Bukti P-186.172 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1674. Bukti P-186.173 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1675. Bukti P-186.174 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
1676. Bukti P-186.175 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1677. Bukti P-186.176 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1678. Bukti P-186.177 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;

1679. Bukti P-186.178 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1680. Bukti P-186.179 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1681. Bukti P-186.180 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
1682. Bukti P-186.181 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1683. Bukti P-186.182 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
1684. Bukti P-186.183 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1685. Bukti P-186.184 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
1686. Bukti P-186.185 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1687. Bukti P-186.186 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
1688. Bukti P-186.187 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1689. Bukti P-186.188 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
1690. Bukti P-186.189 : Cetak Foto C-Hasil TPS 024 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1691. Bukti P-186.190 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 024 Kabupaten Kota Surabaya;
1692. Bukti P-186.191 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1693. Bukti P-186.192 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
1694. Bukti P-186.193 : Cetak Foto C-Hasil TPS 026 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1695. Bukti P-186.194 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 026 Kabupaten Kota Surabaya;
1696. Bukti P-186.195 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1697. Bukti P-186.196 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
1698. Bukti P-186.197 : Cetak Foto C-Hasil TPS 028 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1699. Bukti P-186.198 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 028 Kabupaten Kota Surabaya;

1700. Bukti P-186.199 : Cetak Foto C-Hasil TPS 029 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1701. Bukti P-186.200 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 029 Kabupaten Kota Surabaya;
1702. Bukti P-186.201 : Cetak Foto C-Hasil TPS 030 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1703. Bukti P-186.202 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 030 Kabupaten Kota Surabaya;
1704. Bukti P-186.203 : Cetak Foto C-Hasil TPS 031 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1705. Bukti P-186.204 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 031 Kabupaten Kota Surabaya;
1706. Bukti P-186.205 : Cetak Foto C-Hasil TPS 032 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1707. Bukti P-186.206 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 032 Kabupaten Kota Surabaya;
1708. Bukti P-186.207 : Cetak Foto C-Hasil TPS 033 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1709. Bukti P-186.208 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 033 Kabupaten Kota Surabaya;
1710. Bukti P-186.209 : Cetak Foto C-Hasil TPS 034 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1711. Bukti P-186.210 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 034 Kabupaten Kota Surabaya;
1712. Bukti P-186.211 : Cetak Foto C-Hasil TPS 035 Desa Gundih Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1713. Bukti P-186.212 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Gundih TPS 035 Kabupaten Kota Surabaya;
1714. Bukti P-186.213 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1715. Bukti P-186.214 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
1716. Bukti P-186.215 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1717. Bukti P-186.216 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1718. Bukti P-186.217 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1719. Bukti P-186.218 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1720. Bukti P-186.219 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;

1721. Bukti P-186.220 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1722. Bukti P-186.221 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1723. Bukti P-186.222 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1724. Bukti P-186.223 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1725. Bukti P-186.224 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
1726. Bukti P-186.225 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya
1727. Bukti P-186.226 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1728. Bukti P-186.227 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1729. Bukti P-186.228 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1730. Bukti P-186.229 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1731. Bukti P-186.230 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1732. Bukti P-186.231 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1733. Bukti P-186.232 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1734. Bukti P-186.233 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1735. Bukti P-186.234 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1736. Bukti P-186.235 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1737. Bukti P-186.236 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
1738. Bukti P-186.237 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1739. Bukti P-186.238 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1740. Bukti P-186.239 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1741. Bukti P-186.240 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;

1742. Bukti P-186.241 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1743. Bukti P-186.242 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1744. Bukti P-186.243 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1745. Bukti P-186.244 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1746. Bukti P-186.245 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1747. Bukti P-186.246 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1748. Bukti P-186.247 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1749. Bukti P-186.248 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
1750. Bukti P-186.249 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1751. Bukti P-186.250 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
1752. Bukti P-186.251 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1753. Bukti P-186.252 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
1754. Bukti P-186.253 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1755. Bukti P-186.254 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
1756. Bukti P-186.255 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1757. Bukti P-186.256 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
1758. Bukti P-186.257 : Cetak Foto C-Hasil TPS 024 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1759. Bukti P-186.258 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 024 Kabupaten Kota Surabaya;
1760. Bukti P-186.259 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1761. Bukti P-186.260 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
1762. Bukti P-186.261 : Cetak Foto C-Hasil TPS 026 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;

1763. Bukti P-186.262 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 026 Kabupaten Kota Surabaya;
1764. Bukti P-186.263 : Cetak Foto C-Hasil TPS 029 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1765. Bukti P-186.264 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 029 Kabupaten Kota Surabaya;
1766. Bukti P-186.265 : Cetak Foto C-Hasil TPS 031 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1767. Bukti P-186.266 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 031 Kabupaten Kota Surabaya;
1768. Bukti P-186.267 : Cetak Foto C-Hasil TPS 033 Desa Jepara Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1769. Bukti P-186.268 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Jepara TPS 033 Kabupaten Kota Surabaya;
1770. Bukti P-186.269 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1771. Bukti P-186.270 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
1772. Bukti P-186.271 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1773. Bukti P-186.272 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1774. Bukti P-186.273 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1775. Bukti P-186.274 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1776. Bukti P-186.275 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1777. Bukti P-186.276 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1778. Bukti P-186.277 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1779. Bukti P-186.278 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1780. Bukti P-186.279 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1781. Bukti P-186.280 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
1782. Bukti P-186.281 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1783. Bukti P-186.282 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;

1784. Bukti P-186.283 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1785. Bukti P-186.284 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1786. Bukti P-186.285 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1787. Bukti P-186.286 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1788. Bukti P-186.287 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1789. Bukti P-186.288 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1790. Bukti P-186.289 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1791. Bukti P-186.290 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1792. Bukti P-186.291 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1793. Bukti P-186.292 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
1794. Bukti P-186.293 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1795. Bukti P-186.294 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1796. Bukti P-186.295 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1797. Bukti P-186.296 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
1798. Bukti P-186.297 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1799. Bukti P-186.298 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1800. Bukti P-186.299 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1801. Bukti P-186.300 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
1802. Bukti P-186.301 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1803. Bukti P-186.302 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1804. Bukti P-186.303 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;

1805. Bukti P-186.304 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1806. Bukti P-186.305 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1807. Bukti P-186.306 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
1808. Bukti P-186.307 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1809. Bukti P-186.308 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
1810. Bukti P-186.309 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1811. Bukti P-186.310 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
1812. Bukti P-186.311 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1813. Bukti P-186.312 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
1814. Bukti P-186.313 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1815. Bukti P-186.314 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
1816. Bukti P-186.315 : Cetak Foto C-Hasil TPS 024 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1817. Bukti P-186.316 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 024 Kabupaten Kota Surabaya;
1818. Bukti P-186.317 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1819. Bukti P-186.318 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
1820. Bukti P-186.319 : Cetak Foto C-Hasil TPS 026 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1821. Bukti P-186.320 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 026 Kabupaten Kota Surabaya;
1822. Bukti P-186.321 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1823. Bukti P-186.322 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
1824. Bukti P-186.323 : Cetak Foto C-Hasil TPS 028 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1825. Bukti P-186.324 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 028 Kabupaten Kota Surabaya;

1826. Bukti P-186.325 : Cetak Foto C-Hasil TPS 029 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1827. Bukti P-186.326 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 029 Kabupaten Kota Surabaya;
1828. Bukti P-186.327 : Cetak Foto C-Hasil TPS 030 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1829. Bukti P-186.328 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 030 Kabupaten Kota Surabaya;
1830. Bukti P-186.329 : Cetak Foto C-Hasil TPS 031 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1831. Bukti P-186.330 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 031 Kabupaten Kota Surabaya;
1832. Bukti P-186.331 : Cetak Foto C-Hasil TPS 032 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1833. Bukti P-186.332 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 032 Kabupaten Kota Surabaya;
1834. Bukti P-186.333 : Cetak Foto C-Hasil TPS 033 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1835. Bukti P-186.334 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 033 Kabupaten Kota Surabaya;
1836. Bukti P-186.335 : Cetak Foto C-Hasil TPS 034 Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kabupaten Kota Surabaya;
1837. Bukti P-186.336 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Bubutan Desa Tembok Dukuh TPS 034 Kabupaten Kota Surabaya;
1838. Bukti P-186.337 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1839. Bukti P-186.338 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1840. Bukti P-186.339 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1841. Bukti P-186.340 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1842. Bukti P-186.341 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1843. Bukti P-186.342 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1844. Bukti P-186.343 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1845. Bukti P-186.344 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1846. Bukti P-186.345 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;

1847. Bukti P-186.346 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1848. Bukti P-186.347 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1849. Bukti P-186.348 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
1850. Bukti P-186.349 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1851. Bukti P-186.350 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
1852. Bukti P-186.351 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1853. Bukti P-186.352 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1854. Bukti P-186.353 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1855. Bukti P-186.354 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1856. Bukti P-186.355 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1857. Bukti P-186.356 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1858. Bukti P-186.357 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1859. Bukti P-186.358 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
1860. Bukti P-186.359 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1861. Bukti P-186.360 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
1862. Bukti P-186.361 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1863. Bukti P-186.362 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
1864. Bukti P-186.363 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Airlangga Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1865. Bukti P-186.364 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Airlangga TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
1866. Bukti P-186.365 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1867. Bukti P-186.366 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;

1868. Bukti P-186.367 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1869. Bukti P-186.368 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1870. Bukti P-186.369 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1871. Bukti P-186.370 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1872. Bukti P-186.371 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1873. Bukti P-186.372 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1874. Bukti P-186.373 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1875. Bukti P-186.374 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1876. Bukti P-186.375 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1877. Bukti P-186.376 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
1878. Bukti P-186.377 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1879. Bukti P-186.378 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1880. Bukti P-186.379 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1881. Bukti P-186.380 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1882. Bukti P-186.381 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1883. Bukti P-186.382 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1884. Bukti P-186.383 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1885. Bukti P-186.384 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1886. Bukti P-186.385 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1887. Bukti P-186.386 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1888. Bukti P-186.387 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Baratajaya KecamatanGubeng Kabupaten Kota Surabaya;

1889. Bukti P-186.388 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1890. Bukti P-186.389 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1891. Bukti P-186.390 : Fotokopi D-HasilKecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
1892. Bukti P-186.391 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1893. Bukti P-186.392 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1894. Bukti P-186.393 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1895. Bukti P-186.394 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
1896. Bukti P-186.395 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1897. Bukti P-186.396 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1898. Bukti P-186.397 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1899. Bukti P-186.398 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1900. Bukti P-186.399 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1901. Bukti P-186.400 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
1902. Bukti P-186.401 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Baratajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1903. Bukti P-186.402 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Baratajaya TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
1904. Bukti P-186.403 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1905. Bukti P-186.404 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
1906. Bukti P-186.405 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1907. Bukti P-186.406 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1908. Bukti P-186.407 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1909. Bukti P-186.408 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;

1910. Bukti P-186.409 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1911. Bukti P-186.410 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
1912. Bukti P-186.411 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1913. Bukti P-186.412 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1914. Bukti P-186.413 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1915. Bukti P-186.414 : Fotokopi D-HasilKecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
1916. Bukti P-186.415 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1917. Bukti P-186.416 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1918. Bukti P-186.417 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1919. Bukti P-186.418 : Fotokopi D-HasilKecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1920. Bukti P-186.419 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1921. Bukti P-186.420 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1922. Bukti P-186.421 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1923. Bukti P-186.422 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1924. Bukti P-186.423 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1925. Bukti P-186.424 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1926. Bukti P-186.425 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1927. Bukti P-186.426 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
1928. Bukti P-186.427 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1929. Bukti P-186.428 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1930. Bukti P-186.429 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;

1931. Bukti P-186.430 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
1932. Bukti P-186.431 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1933. Bukti P-186.432 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
1934. Bukti P-186.433 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1935. Bukti P-186.434 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
1936. Bukti P-186.435 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1937. Bukti P-186.436 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1938. Bukti P-186.437 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1939. Bukti P-186.438 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1940. Bukti P-186.439 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Gubeng Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1941. Bukti P-186.440 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Gubeng TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
1942. Bukti P-186.441 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1943. Bukti P-186.442 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
1944. Bukti P-186.443 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1945. Bukti P-186.444 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1946. Bukti P-186.445 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1947. Bukti P-186.446 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1948. Bukti P-186.447 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1949. Bukti P-186.448 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
1950. Bukti P-186.449 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1951. Bukti P-186.450 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;

1952. Bukti P-186.451 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1953. Bukti P-186.452 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
1954. Bukti P-186.453 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1955. Bukti P-186.454 : Fotokopi D-HasilKecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
1956. Bukti P-186.455 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1957. Bukti P-186.456 : Fotokopi D-HasilKecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
1958. Bukti P-186.457 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1959. Bukti P-186.458 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
1960. Bukti P-186.459 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1961. Bukti P-186.460 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
1962. Bukti P-186.461 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1963. Bukti P-186.462 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
1964. Bukti P-186.463 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1965. Bukti P-186.464 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
1966. Bukti P-186.465 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1967. Bukti P-186.466 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
1968. Bukti P-186.467 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1969. Bukti P-186.468 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
1970. Bukti P-186.469 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1971. Bukti P-186.470 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
1972. Bukti P-186.471 : Cetak Foto C-Hasil TPS 024 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;

1973. Bukti P-186.472 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 024 Kabupaten Kota Surabaya;
1974. Bukti P-186.473 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1975. Bukti P-186.474 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
1976. Bukti P-186.475 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1977. Bukti P-186.476 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
1978. Bukti P-186.477 : Cetak Foto C-Hasil TPS 029 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1979. Bukti P-186.478 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 029 Kabupaten Kota Surabaya;
1980. Bukti P-186.479 : Cetak Foto C-Hasil TPS 030 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1981. Bukti P-186.480 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 030 Kabupaten Kota Surabaya;
1982. Bukti P-186.481 : Cetak Foto C-Hasil TPS 032 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1983. Bukti P-186.482 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 032 Kabupaten Kota Surabaya;
1984. Bukti P-186.483 : Cetak Foto C-Hasil TPS 033 Desa Kertajaya Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1985. Bukti P-186.484 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Kertajaya TPS 033 Kabupaten Kota Surabaya;
1986. Bukti P-186.485 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1987. Bukti P-186.486 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
1988. Bukti P-186.487 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1989. Bukti P-186.488 : Fotokopi D-HasilKecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
1990. Bukti P-186.489 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1991. Bukti P-186.490 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
1992. Bukti P-186.491 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1993. Bukti P-186.492 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;

1994. Bukti P-186.493 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1995. Bukti P-186.494 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
1996. Bukti P-186.495 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1997. Bukti P-186.496 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
1998. Bukti P-186.497 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
1999. Bukti P-186.498 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
2000. Bukti P-186.499 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2001. Bukti P-186.500 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
2002. Bukti P-186.501 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2003. Bukti P-186.502 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
2004. Bukti P-186.503 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2005. Bukti P-186.504 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
2006. Bukti P-186.505 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2007. Bukti P-186.506 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
2008. Bukti P-186.507 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2009. Bukti P-186.508 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
2010. Bukti P-186.509 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2011. Bukti P-186.510 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
2012. Bukti P-186.511 : Cetak Foto C-Hasil TPS 030 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2013. Bukti P-186.512 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 030 Kabupaten Kota Surabaya;
2014. Bukti P-186.513 : Cetak Foto C-Hasil TPS 032 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;

2015. Bukti P-186.514 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 032 Kabupaten Kota Surabaya;
2016. Bukti P-186.515 : Cetak Foto C-Hasil TPS 034 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2017. Bukti P-186.516 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 034 Kabupaten Kota Surabaya;
2018. Bukti P-186.517 : Cetak Foto C-Hasil TPS 035 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2019. Bukti P-186.518 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 035 Kabupaten Kota Surabaya;
2020. Bukti P-186.519 : Cetak Foto C-Hasil TPS 037 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2021. Bukti P-186.520 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 037 Kabupaten Kota Surabaya;
2022. Bukti P-186.521 : Cetak Foto C-Hasil TPS 040 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2023. Bukti P-186.522 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 040 Kabupaten Kota Surabaya;
2024. Bukti P-186.523 : Cetak Foto C-Hasil TPS 041 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2025. Bukti P-186.524 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 041 Kabupaten Kota Surabaya;
2026. Bukti P-186.525 : Cetak Foto C-Hasil TPS 043 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2027. Bukti P-186.526 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 043 Kabupaten Kota Surabaya;
2028. Bukti P-186.527 : Cetak Foto C-Hasil TPS 046 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2029. Bukti P-186.528 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 046 Kabupaten Kota Surabaya;
2030. Bukti P-186.529 : Cetak Foto C-Hasil TPS 047 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2031. Bukti P-186.530 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 047 Kabupaten Kota Surabaya;
2032. Bukti P-186.531 : Cetak Foto C-Hasil TPS 048 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2033. Bukti P-186.532 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 048 Kabupaten Kota Surabaya;
2034. Bukti P-186.533 : Cetak Foto C-Hasil TPS 052 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2035. Bukti P-186.534 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 052 Kabupaten Kota Surabaya;

2036. Bukti P-186.535 : Cetak Foto C-Hasil TPS 054 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2037. Bukti P-186.536 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 054 Kabupaten Kota Surabaya;
2038. Bukti P-186.537 : Cetak Foto C-Hasil TPS 055 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2039. Bukti P-186.538 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 055 Kabupaten Kota Surabaya;
2040. Bukti P-186.539 : Cetak Foto C-Hasil TPS 056 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2041. Bukti P-186.540 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 056 Kabupaten Kota Surabaya;
2042. Bukti P-186.541 : Cetak Foto C-Hasil TPS 057 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2043. Bukti P-186.542 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 057 Kabupaten Kota Surabaya;
2044. Bukti P-186.543 : Cetak Foto C-Hasil TPS 058 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2045. Bukti P-186.544 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 058 Kabupaten Kota Surabaya;
2046. Bukti P-186.545 : Cetak Foto C-Hasil TPS 059 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2047. Bukti P-186.546 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 059 Kabupaten Kota Surabaya;
2048. Bukti P-186.547 : Cetak Foto C-Hasil TPS 060 Desa Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Kota Surabaya;
2049. Bukti P-186.548 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Gubeng Desa Mojo TPS 060 Kabupaten Kota Surabaya;
2050. Bukti P-186.549 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2051. Bukti P-186.550 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
2052. Bukti P-186.551 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2053. Bukti P-186.552 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
2054. Bukti P-186.553 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2055. Bukti P-186.554 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
2056. Bukti P-186.555 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya

2057. Bukti P-186.556 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
2058. Bukti P-186.557 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2059. Bukti P-186.558 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
2060. Bukti P-186.559 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2061. Bukti P-186.560 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
2062. Bukti P-186.561 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2063. Bukti P-186.562 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
2064. Bukti P-186.563 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2065. Bukti P-186.564 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
2066. Bukti P-186.565 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2067. Bukti P-186.566 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
2068. Bukti P-186.567 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2069. Bukti P-186.568 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
2070. Bukti P-186.569 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2071. Bukti P-186.570 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
2072. Bukti P-186.571 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2073. Bukti P-186.572 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
2074. Bukti P-186.573 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2075. Bukti P-186.574 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
2076. Bukti P-186.575 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2077. Bukti P-186.576 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;

2078. Bukti P-186.577 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2079. Bukti P-186.578 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
2080. Bukti P-186.579 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2081. Bukti P-186.580 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
2082. Bukti P-186.581 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2083. Bukti P-186.582 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
2084. Bukti P-186.583 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2085. Bukti P-186.584 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
2086. Bukti P-186.585 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2087. Bukti P-186.586 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
2088. Bukti P-186.587 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2089. Bukti P-186.588 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
2090. Bukti P-186.589 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2091. Bukti P-186.590 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
2092. Bukti P-186.591 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2093. Bukti P-186.592 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
2094. Bukti P-186.593 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2095. Bukti P-186.594 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
2096. Bukti P-186.595 : Cetak Foto C-Hasil TPS 024 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2097. Bukti P-186.596 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 024 Kabupaten Kota Surabaya;
2098. Bukti P-186.597 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya

2099. Bukti P-186.598 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
2100. Bukti P-186.599 : Cetak Foto C-Hasil TPS 026 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2101. Bukti P-186.600 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 026 Kabupaten Kota Surabaya;
2102. Bukti P-186.601 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2103. Bukti P-186.602 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
2104. Bukti P-186.603 : Cetak Foto C-Hasil TPS 028 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2105. Bukti P-186.604 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 028 Kabupaten Kota Surabaya;
2106. Bukti P-186.605 : Cetak Foto C-Hasil TPS 029 Desa Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2107. Bukti P-186.606 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Dupak TPS 029 Kabupaten Kota Surabaya;
2108. Bukti P-186.607 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2109. Bukti P-186.608 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
2110. Bukti P-186.609 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2111. Bukti P-186.610 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
2112. Bukti P-186.611 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2113. Bukti P-186.612 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
2114. Bukti P-186.613 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2115. Bukti P-186.614 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
2116. Bukti P-186.615 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2117. Bukti P-186.616 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
2118. Bukti P-186.617 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2119. Bukti P-186.618 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;

2120. Bukti P-186.619 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2121. Bukti P-186.620 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
2122. Bukti P-186.621 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2123. Bukti P-186.622 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
2124. Bukti P-186.623 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2125. Bukti P-186.624 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
2126. Bukti P-186.625 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2127. Bukti P-186.626 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
2128. Bukti P-186.627 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2129. Bukti P-186.628 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya
2130. Bukti P-186.629 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2131. Bukti P-186.630 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
2132. Bukti P-186.631 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2133. Bukti P-186.632 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
2134. Bukti P-186.633 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2135. Bukti P-186.634 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
2136. Bukti P-186.635 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2137. Bukti P-186.636 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
2138. Bukti P-186.637 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2139. Bukti P-186.638 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
2140. Bukti P-186.639 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2141. Bukti P-186.640 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
2142. Bukti P-186.641 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2143. Bukti P-186.642 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
2144. Bukti P-186.643 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2145. Bukti P-186.644 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
2146. Bukti P-186.645 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2147. Bukti P-186.646 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
2148. Bukti P-186.647 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2149. Bukti P-186.648 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
2150. Bukti P-186.649 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Kemayoran Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2151. Bukti P-186.650 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Kemayoran TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
2152. Bukti P-186.651 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2153. Bukti P-186.652 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
2154. Bukti P-186.653 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2155. Bukti P-186.654 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
2156. Bukti P-186.655 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2157. Bukti P-186.656 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
2158. Bukti P-186.657 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2159. Bukti P-186.658 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;

2160. Bukti P-186.659 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2161. Bukti P-186.660 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;

2162. Bukti P-186.661 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2163. Bukti P-186.662 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;

2164. Bukti P-186.663 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2165. Bukti P-186.664 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;

2166. Bukti P-186.665 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2167. Bukti P-186.666 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;

2168. Bukti P-186.667 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2169. Bukti P-186.668 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;

2170. Bukti P-186.669 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2171. Bukti P-186.670 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;

2172. Bukti P-186.671 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2173. Bukti P-186.672 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
2174. Bukti P-186.673 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2175. Bukti P-186.674 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
2176. Bukti P-186.675 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2177. Bukti P-186.676 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
2178. Bukti P-186.677 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2179. Bukti P-186.678 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
2180. Bukti P-186.679 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2181. Bukti P-186.680 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
2182. Bukti P-186.681 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2183. Bukti P-186.682 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
2184. Bukti P-186.683 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2185. Bukti P-186.684 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
2186. Bukti P-186.685 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2187. Bukti P-186.686 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
2188. Bukti P-186.687 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2189. Bukti P-186.688 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Krembangan Selatan TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
2190. Bukti P-186.689 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2191. Bukti P-186.690 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
2192. Bukti P-186.691 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2193. Bukti P-186.692 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
2194. Bukti P-186.693 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2195. Bukti P-186.694 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
2196. Bukti P-186.695 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2197. Bukti P-186.696 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
2198. Bukti P-186.697 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2199. Bukti P-186.698 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
2200. Bukti P-186.699 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2201. Bukti P-186.700 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
2202. Bukti P-186.701 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2203. Bukti P-186.702 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
2204. Bukti P-186.703 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2205. Bukti P-186.704 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
2206. Bukti P-186.705 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2207. Bukti P-186.706 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
2208. Bukti P-186.707 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2209. Bukti P-186.708 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
2210. Bukti P-186.709 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2211. Bukti P-186.710 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
2212. Bukti P-186.711 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2213. Bukti P-186.712 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
2214. Bukti P-186.713 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2215. Bukti P-186.714 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
2216. Bukti P-186.715 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2217. Bukti P-186.716 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
2218. Bukti P-186.717 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2219. Bukti P-186.718 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
2220. Bukti P-186.719 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2221. Bukti P-186.720 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;
2222. Bukti P-186.721 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2223. Bukti P-186.722 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
2224. Bukti P-186.723 : Cetak Foto C-Hasil TPS 018 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2225. Bukti P-186.724 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 018 Kabupaten Kota Surabaya;
2226. Bukti P-186.725 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2227. Bukti P-186.726 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 019 Kabupaten Kota Surabaya;
2228. Bukti P-186.727 : Cetak Foto C-Hasil TPS 020 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2229. Bukti P-186.728 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 020 Kabupaten Kota Surabaya;
2230. Bukti P-186.729 : Cetak Foto C-Hasil TPS 021 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2231. Bukti P-186.730 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 021 Kabupaten Kota Surabaya;
2232. Bukti P-186.731 : Cetak Foto C-Hasil TPS 022 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2233. Bukti P-186.732 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 022 Kabupaten Kota Surabaya;
2234. Bukti P-186.733 : Cetak Foto C-Hasil TPS 023 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2235. Bukti P-186.734 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 023 Kabupaten Kota Surabaya;
2236. Bukti P-186.735 : Cetak Foto C-Hasil TPS 024 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2237. Bukti P-186.736 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 024 Kabupaten Kota Surabaya;
2238. Bukti P-186.737 : Cetak Foto C-Hasil TPS 025 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2239. Bukti P-186.738 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 025 Kabupaten Kota Surabaya;
2240. Bukti P-186.739 : Cetak Foto C-Hasil TPS 026 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2241. Bukti P-186.740 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 026 Kabupaten Kota Surabaya;
2242. Bukti P-186.741 : Cetak Foto C-Hasil TPS 027 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2243. Bukti P-186.742 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 027 Kabupaten Kota Surabaya;
2244. Bukti P-186.743 : Cetak Foto C-Hasil TPS 028 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2245. Bukti P-186.744 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 028 Kabupaten Kota Surabaya;
2246. Bukti P-186.745 : Cetak Foto C-Hasil TPS 029 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2247. Bukti P-186.746 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 029 Kabupaten Kota Surabaya;
2248. Bukti P-186.747 : Cetak Foto C-Hasil TPS 030 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2249. Bukti P-186.748 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 030 Kabupaten Kota Surabaya;
2250. Bukti P-186.749 : Cetak Foto C-Hasil TPS 031 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2251. Bukti P-186.750 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 031 Kabupaten Kota Surabaya;
2252. Bukti P-186.751 : Cetak Foto C-Hasil TPS 032 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2253. Bukti P-186.752 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 032 Kabupaten Kota Surabaya;
2254. Bukti P-186.753 : Cetak Foto C-Hasil TPS 033 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2255. Bukti P-186.754 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 033 Kabupaten Kota Surabaya;
2256. Bukti P-186.755 : Cetak Foto C-Hasil TPS 034 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2257. Bukti P-186.756 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 034 Kabupaten Kota Surabaya;

2258. Bukti P-186.757 : Cetak Foto C-Hasil TPS 035 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2259. Bukti P-186.758 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 035 Kabupaten Kota Surabaya;

2260. Bukti P-186.759 : Cetak Foto C-Hasil TPS 036 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2261. Bukti P-186.760 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 036 Kabupaten Kota Surabaya;

2262. Bukti P-186.761 : Cetak Foto C-Hasil TPS 037 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2263. Bukti P-186.762 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 037 Kabupaten Kota Surabaya;

2264. Bukti P-186.763 : Cetak Foto C-Hasil TPS 038 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2265. Bukti P-186.764 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 038 Kabupaten Kota Surabaya;

2266. Bukti P-186.765 : Cetak Foto C-Hasil TPS 039 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2267. Bukti P-186.766 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 039 Kabupaten Kota Surabaya;

2268. Bukti P-186.767 : Cetak Foto C-Hasil TPS 040 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2269. Bukti P-186.768 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 040 Kabupaten Kota Surabaya;

2270. Bukti P-186.769 : Cetak Foto C-Hasil TPS 041 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2271. Bukti P-186.770 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 041 Kabupaten Kota Surabaya;
2272. Bukti P-186.771 : Cetak Foto C-Hasil TPS 043 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2273. Bukti P-186.772 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 043 Kabupaten Kota Surabaya;
2274. Bukti P-186.773 : Cetak Foto C-Hasil TPS 044 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2275. Bukti P-186.774 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 044 Kabupaten Kota Surabaya;
2276. Bukti P-186.775 : Cetak Foto C-Hasil TPS 045 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2277. Bukti P-186.776 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 045 Kabupaten Kota Surabaya;
2278. Bukti P-186.777 : Cetak Foto C-Hasil TPS 046 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2279. Bukti P-186.778 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 046 Kabupaten Kota Surabaya;
2280. Bukti P-186.779 : Cetak Foto C-Hasil TPS 047 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2281. Bukti P-186.780 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 047 Kabupaten Kota Surabaya;
2282. Bukti P-186.781 : Cetak Foto C-Hasil TPS 048 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2283. Bukti P-186.782 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 048 Kabupaten Kota Surabaya;
2284. Bukti P-186.783 : Cetak Foto C-Hasil TPS 049 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2285. Bukti P-186.784 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 049 Kabupaten Kota Surabaya;;
2286. Bukti P-186.785 : Cetak Foto C-Hasil TPS 050 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2287. Bukti P-186.786 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 050 Kabupaten Kota Surabaya;
2288. Bukti P-186.787 : Cetak Foto C-Hasil TPS 051 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2289. Bukti P-186.788 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 051 Kabupaten Kota Surabaya;
2290. Bukti P-186.789 : Cetak Foto C-Hasil TPS 052 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2291. Bukti P-186.790 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 052 Kabupaten Kota Surabaya;
2292. Bukti P-186.791 : Cetak Foto C-Hasil TPS 053 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2293. Bukti P-186.792 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 053 Kabupaten Kota Surabaya;
2294. Bukti P-186.793 : Cetak Foto C-Hasil TPS 054 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2295. Bukti P-186.794 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 054 Kabupaten Kota Surabaya;
2296. Bukti P-186.795 : Cetak Foto C-Hasil TPS 055 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2297. Bukti P-186.796 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 055 Kabupaten Kota Surabaya;
2298. Bukti P-186.797 : Cetak Foto C-Hasil TPS 056 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2299. Bukti P-186.798 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 056 Kabupaten Kota Surabaya;
2300. Bukti P-186.799 : Cetak Foto C-Hasil TPS 057 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya
2301. Bukti P-186.800 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 057 Kabupaten Kota Surabaya
2302. Bukti P-186.801 : Cetak Foto C-Hasil TPS 058 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2303. Bukti P-186.802 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 058 Kabupaten Kota Surabaya;
2304. Bukti P-186.803 : Cetak Foto C-Hasil TPS 059 Desa Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2305. Bukti P-186.804 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Morokrembangan TPS 059 Kabupaten Kota Surabaya;
2306. Bukti P-186.805 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2307. Bukti P-186.806 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 001 Kabupaten Kota Surabaya;
2308. Bukti P-186.807 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2309. Bukti P-186.808 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 002 Kabupaten Kota Surabaya;
2310. Bukti P-186.809 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2311. Bukti P-186.810 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 003 Kabupaten Kota Surabaya;
2312. Bukti P-186.811 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2313. Bukti P-186.812 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 004 Kabupaten Kota Surabaya;
2314. Bukti P-186.813 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2315. Bukti P-186.814 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 005 Kabupaten Kota Surabaya;
2316. Bukti P-186.815 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;

2317. Bukti P-186.816 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 006 Kabupaten Kota Surabaya;
2318. Bukti P-186.817 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2319. Bukti P-186.818 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 007 Kabupaten Kota Surabaya;
2320. Bukti P-186.819 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2321. Bukti P-186.820 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 008 Kabupaten Kota Surabaya;
2322. Bukti P-186.821 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2323. Bukti P-186.822 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 009 Kabupaten Kota Surabaya;
2324. Bukti P-186.823 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2325. Bukti P-186.824 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 010 Kabupaten Kota Surabaya;
2326. Bukti P-186.825 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2327. Bukti P-186.826 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 011 Kabupaten Kota Surabaya;
2328. Bukti P-186.827 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2329. Bukti P-186.828 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 012 Kabupaten Kota Surabaya;
2330. Bukti P-186.829 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2331. Bukti P-186.830 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 013 Kabupaten Kota Surabaya;
2332. Bukti P-186.831 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2333. Bukti P-186.832 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 014 Kabupaten Kota Surabaya;
2334. Bukti P-186.833 : Cetak Foto C-Hasil TPS 015 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2335. Bukti P-186.834 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 015 Kabupaten Kota Surabaya;
2336. Bukti P-186.835 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Perak Barat Kecamatan Krembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2337. Bukti P-186.836 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 016 Kabupaten Kota Surabaya;

2338. Bukti P-186.837 : Cetak Foto C-Hasil TPS 017 Desa Perak Barat KecamatanKrembangan Kabupaten Kota Surabaya;
2339. Bukti P-186.838 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Krembangan Desa Perak Barat TPS 017 Kabupaten Kota Surabaya;
2340. Bukti P-186.839 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2341. Bukti P-186.840 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2342. Bukti P-186.841 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2343. Bukti P-186.842 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2344. Bukti P-186.843 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2345. Bukti P-186.844 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2346. Bukti P-186.845 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2347. Bukti P-186.846 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2348. Bukti P-186.847 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2349. Bukti P-186.848 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2350. Bukti P-186.849 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2351. Bukti P-186.850 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2352. Bukti P-186.851 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2353. Bukti P-186.852 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2354. Bukti P-186.853 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2355. Bukti P-186.854 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 008 Kabupaten Pamekasan;
2356. Bukti P-186.855 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2357. Bukti P-186.856 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 009 Kabupaten Pamekasan;
2358. Bukti P-186.857 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

2359. Bukti P-186.858 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 010 Kabupaten Pamekasan;
2360. Bukti P-186.859 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2361. Bukti P-186.860 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 011 Kabupaten Pamekasan;
2362. Bukti P-186.861 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
2363. Bukti P-186.862 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 013 Kabupaten Pamekasan
2364. Bukti P-186.863 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2365. Bukti P-186.864 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 014 Kabupaten Pamekasan;
2366. Bukti P-186.865 : Cetak Foto C-Hasil TPS 016 Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2367. Bukti P-186.866 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 016 Kabupaten Pamekasan;
2368. Bukti P-186.867 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2369. Bukti P-186.868 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2370. Bukti P-186.869 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2371. Bukti P-186.870 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2372. Bukti P-186.871 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2373. Bukti P-186.872 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2374. Bukti P-186.873 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2375. Bukti P-186.874 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2376. Bukti P-186.875 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2377. Bukti P-186.876 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2378. Bukti P-186.877 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2379. Bukti P-186.878 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 008 Kabupaten Pamekasan;

2380. Bukti P-186.879 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2381. Bukti P-186.880 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 009 Kabupaten Pamekasan;
2382. Bukti P-186.881 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2383. Bukti P-186.882 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2384. Bukti P-186.883 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2385. Bukti P-186.884 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2386. Bukti P-186.885 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2387. Bukti P-186.886 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2388. Bukti P-186.887 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2389. Bukti P-186.888 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2390. Bukti P-186.889 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2391. Bukti P-186.890 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 008 Kabupaten Pamekasan;
2392. Bukti P-186.891 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2393. Bukti P-186.892 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 009 Kabupaten Pamekasan;
2394. Bukti P-186.893 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2395. Bukti P-186.894 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 010 Kabupaten Pamekasan;
2396. Bukti P-186.895 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2397. Bukti P-186.896 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kadur TPS 011 Kabupaten Pamekasan;
2398. Bukti P-186.897 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2399. Bukti P-186.898 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Laok TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2400. Bukti P-186.899 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

2401. Bukti P-186.900 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Laok TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2402. Bukti P-186.901 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2403. Bukti P-186.902 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Laok TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2404. Bukti P-186.903 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2405. Bukti P-186.904 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Laok TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2406. Bukti P-186.905 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2407. Bukti P-186.906 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Laok TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2408. Bukti P-186.907 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2409. Bukti P-186.908 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Tengah TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2410. Bukti P-186.909 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2411. Bukti P-186.910 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Tengah TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2412. Bukti P-186.911 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2413. Bukti P-186.912 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Kertagena Tengah TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2414. Bukti P-186.913 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2415. Bukti P-186.914 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2416. Bukti P-186.915 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2417. Bukti P-186.916 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2418. Bukti P-186.917 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2419. Bukti P-186.918 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2420. Bukti P-186.919 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2421. Bukti P-186.920 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 004 Kabupaten Pamekasan;

2422. Bukti P-186.921 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2423. Bukti P-186.922 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2424. Bukti P-186.923 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2425. Bukti P-186.924 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2426. Bukti P-186.925 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2427. Bukti P-186.926 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2428. Bukti P-186.927 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2429. Bukti P-186.928 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 008 Kabupaten Pamekasan;
2430. Bukti P-186.929 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2431. Bukti P-186.930 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2432. Bukti P-186.931 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2433. Bukti P-186.932 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2434. Bukti P-186.933 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2435. Bukti P-186.934 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2436. Bukti P-186.935 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2437. Bukti P-186.936 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2438. Bukti P-186.937 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2439. Bukti P-186.938 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2440. Bukti P-186.939 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2441. Bukti P-186.940 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2442. Bukti P-186.941 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

2443. Bukti P-186.942 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2444. Bukti P-186.943 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2445. Bukti P-186.944 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 008 Kabupaten Pamekasan;
2446. Bukti P-186.945 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2447. Bukti P-186.946 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 009 Kabupaten Pamekasan;
2448. Bukti P-186.947 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2449. Bukti P-186.948 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 010 Kabupaten Pamekasan;
2450. Bukti P-186.949 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2451. Bukti P-186.950 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 011 Kabupaten Pamekasan;
2452. Bukti P-186.951 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2453. Bukti P-186.952 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Pamoroh TPS 012 Kabupaten Pamekasan;
2454. Bukti P-186.953 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2455. Bukti P-186.954 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Sokolelah TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2456. Bukti P-186.955 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2457. Bukti P-186.956 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Sokolelah TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2458. Bukti P-186.957 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2459. Bukti P-186.958 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Sokolelah TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2460. Bukti P-186.959 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
2461. Bukti P-186.960 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kadur Desa Sokolelah TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2462. Bukti P-186.961 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
2463. Bukti P-186.962 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pademawu Desa Lawangan Daya TPS 006 Kabupaten Pamekasan;

2464. Bukti P-186.963 : Cetak Foto C-Hasil TPS 014 Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
2465. Bukti P-186.964 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Pegantenan Desa Pasanggar TPS 014 Kabupaten Pamekasan;
2466. Bukti P-186.965 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2467. Bukti P-186.966 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2468. Bukti P-186.967 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2469. Bukti P-186.968 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2470. Bukti P-186.969 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2471. Bukti P-186.970 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2472. Bukti P-186.971 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2473. Bukti P-186.972 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2474. Bukti P-186.973 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2475. Bukti P-186.974 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2476. Bukti P-186.975 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2477. Bukti P-186.976 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2478. Bukti P-186.977 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2479. Bukti P-186.978 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2480. Bukti P-186.979 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2481. Bukti P-186.980 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2482. Bukti P-186.981 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2483. Bukti P-186.982 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2484. Bukti P-186.983 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

2485. Bukti P-186.984 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2486. Bukti P-186.985 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2487. Bukti P-186.986 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2488. Bukti P-186.987 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2489. Bukti P-186.988 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2490. Bukti P-186.989 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2491. Bukti P-186.990 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2492. Bukti P-186.991 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2493. Bukti P-186.992 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2494. Bukti P-186.993 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2495. Bukti P-186.994 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 008 Kabupaten Pamekasan;
2496. Bukti P-186.995 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2497. Bukti P-186.996 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 009 Kabupaten Pamekasan;
2498. Bukti P-186.997 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2499. Bukti P-186.998 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2500. Bukti P-186.999 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2501. Bukti P-186.1000 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2502. Bukti P-186.1001 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2503. Bukti P-186.1002 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2504. Bukti P-186.1003 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2505. Bukti P-186.1004 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 004 Kabupaten Pamekasan;

2506. Bukti P-186.1005 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2507. Bukti P-186.1006 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2508. Bukti P-186.1007 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2509. Bukti P-186.1008 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2510. Bukti P-186.1009 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2511. Bukti P-186.1010 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Pesisir TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2512. Bukti P-186.1011 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2513. Bukti P-186.1012 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2514. Bukti P-186.1013 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2515. Bukti P-186.1014 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2516. Bukti P-186.1015 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2517. Bukti P-186.1016 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2518. Bukti P-186.1017 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2519. Bukti P-186.1018 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2520. Bukti P-186.1019 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2521. Bukti P-186.1020 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ceguk TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2522. Bukti P-186.1021 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2523. Bukti P-186.1022 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Ceguk TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2524. Bukti P-186.1023 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2525. Bukti P-186.1024 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Dabuan TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2526. Bukti P-186.1025 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

2527. Bukti P-186.1026 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Dabuan TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2528. Bukti P-186.1027 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2529. Bukti P-186.1028 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Dabuan TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2530. Bukti P-186.1029 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2531. Bukti P-186.1030 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Gugul TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2532. Bukti P-186.1031 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2533. Bukti P-186.1032 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Gugul TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2534. Bukti P-186.1033 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2535. Bukti P-186.1034 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Gugul TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2536. Bukti P-186.1035 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2537. Bukti P-186.1036 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Gugul TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2538. Bukti P-186.1037 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2539. Bukti P-186.1038 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Gugul TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2540. Bukti P-186.1039 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2541. Bukti P-186.1040 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Kramat TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2542. Bukti P-186.1041 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2543. Bukti P-186.1042 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Kramat TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2544. Bukti P-186.1043 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2545. Bukti P-186.1044 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Kramat TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2546. Bukti P-186.1045 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2547. Bukti P-186.1046 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Kramat TPS 004 Kabupaten Pamekasan;

2548. Bukti P-186.1047 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2549. Bukti P-186.1048 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Kramat TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2550. Bukti P-186.1049 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2551. Bukti P-186.1050 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Kramat TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2552. Bukti P-186.1051 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2553. Bukti P-186.1052 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Slampar TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2554. Bukti P-186.1053 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2555. Bukti P-186.1054 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Slampar TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2556. Bukti P-186.1055 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2557. Bukti P-186.1056 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Slampar TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2558. Bukti P-186.1057 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2559. Bukti P-186.1058 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Slampar TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2560. Bukti P-186.1059 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2561. Bukti P-186.1060 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Slampar TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2562. Bukti P-186.1061 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2563. Bukti P-186.1062 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Slampar TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2564. Bukti P-186.1063 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2565. Bukti P-186.1064 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 003 Kabupaten Pamekasan;

2566. Bukti P-186.1065 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2567. Bukti P-186.1066 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2568. Bukti P-186.1067 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2569. Bukti P-186.1068 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2570. Bukti P-186.1069 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2571. Bukti P-186.1070 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2572. Bukti P-186.1071 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2573. Bukti P-186.1072 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 008 Kabupaten Pamekasan;
2574. Bukti P-186.1073 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2575. Bukti P-186.1074 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 009 Kabupaten Pamekasan;
2576. Bukti P-186.1075 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2577. Bukti P-186.1076 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 010 Kabupaten Pamekasan;
2578. Bukti P-186.1077 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2579. Bukti P-186.1078 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 011 Kabupaten Pamekasan;
2580. Bukti P-186.1079 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2581. Bukti P-186.1080 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Larangan Tokol TPS 012 Kabupaten Pamekasan;
2582. Bukti P-186.1081 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2583. Bukti P-186.1082 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Mangar TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2584. Bukti P-186.1083 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2585. Bukti P-186.1084 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Mangar TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2586. Bukti P-186.1085 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

2587. Bukti P-186.1086 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Mangar TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2588. Bukti P-186.1087 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2589. Bukti P-186.1088 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Panglegur TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2590. Bukti P-186.1089 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2591. Bukti P-186.1090 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Panglegur TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2592. Bukti P-186.1091 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2593. Bukti P-186.1092 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Panglegur TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2594. Bukti P-186.1093 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2595. Bukti P-186.1094 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Panglegur TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2596. Bukti P-186.1095 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2597. Bukti P-186.1096 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Panglegur TPS 006 Kabupaten Pamekasan;
2598. Bukti P-186.1097 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2599. Bukti P-186.1098 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Panglegur TPS 007 Kabupaten Pamekasan;
2600. Bukti P-186.1099 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2601. Bukti P-186.1100 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Taro'an TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2602. Bukti P-186.1101 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2603. Bukti P-186.1102 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Taro'an TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2604. Bukti P-186.1103 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2605. Bukti P-186.1104 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Terrak TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2606. Bukti P-186.1105 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2607. Bukti P-186.1106 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Terrak TPS 002 Kabupaten Pamekasan;

2608. Bukti P-186.1107 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2609. Bukti P-186.1108 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Terrak TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2610. Bukti P-186.1109 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2611. Bukti P-186.1110 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Terrak TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2612. Bukti P-186.1111 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2613. Bukti P-186.1112 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Terrak TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2614. Bukti P-186.1113 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2615. Bukti P-186.1114 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlanakan TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2616. Bukti P-186.1115 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2617. Bukti P-186.1116 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlanakan TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2618. Bukti P-186.1117 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2619. Bukti P-186.1118 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlanakan TPS 003 Kabupaten Pamekasan;
2620. Bukti P-186.1119 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2621. Bukti P-186.1120 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlanakan TPS 004 Kabupaten Pamekasan;
2622. Bukti P-186.1121 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2623. Bukti P-186.1122 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlanakan TPS 005 Kabupaten Pamekasan;
2624. Bukti P-186.1123 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2625. Bukti P-186.1124 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlesah TPS 001 Kabupaten Pamekasan;
2626. Bukti P-186.1125 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2627. Bukti P-186.1126 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tlanakan Desa Tlesah TPS 002 Kabupaten Pamekasan;
2628. Bukti P-186.1127 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

2629. Bukti P-186.1128 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Asem Jaran TPS 002 Kabupaten Sampang;
2630. Bukti P-186.1129 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2631. Bukti P-186.1130 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Asem Jaran TPS 003 Kabupaten Sampang;
2632. Bukti P-186.1131 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2633. Bukti P-186.1132 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Asem Jaran TPS 004 Kabupaten Sampang;
2634. Bukti P-186.1133 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2635. Bukti P-186.1134 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Asem Jaran TPS 005 Kabupaten Sampang;
2636. Bukti P-186.1135 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2637. Bukti P-186.1136 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Asem Jaran TPS 006 Kabupaten Sampang;
2638. Bukti P-186.1137 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2639. Bukti P-186.1138 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Banyuates TPS 001 Kabupaten Sampang;
2640. Bukti P-186.1139 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2641. Bukti P-186.1140 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Banyuates TPS 002 Kabupaten Sampang;
2642. Bukti P-186.1141 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2643. Bukti P-186.1142 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Banyuates TPS 004 Kabupaten Sampang;
2644. Bukti P-186.1143 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2645. Bukti P-186.1144 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 003 Kabupaten Sampang;
2646. Bukti P-186.1145 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2647. Bukti P-186.1146 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 006 Kabupaten Sampang;
2648. Bukti P-186.1147 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2649. Bukti P-186.1148 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Jatra Timur TPS 001 Kabupaten Sampang;

2650. Bukti P-186.1149 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2651. Bukti P-186.1150 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Jatra Timur TPS 003 Kabupaten Sampang;
2652. Bukti P-186.1151 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2653. Bukti P-186.1152 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Kembang Jeruk TPS 003 Kabupaten Sampang;
2654. Bukti P-186.1153 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2655. Bukti P-186.1154 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Kembang Jeruk TPS 004 Kabupaten Sampang;
2656. Bukti P-186.1155 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2657. Bukti P-186.1156 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Kembang Jeruk TPS 005 Kabupaten Sampang;
2658. Bukti P-186.1157 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2659. Bukti P-186.1158 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Lar Lar TPS 009 Kabupaten Sampang;
2660. Bukti P-186.1159 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2661. Bukti P-186.1160 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Masaran TPS 001 Kabupaten Sampang;
2662. Bukti P-186.1161 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2663. Bukti P-186.1162 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Masaran TPS 005 Kabupaten Sampang;
2664. Bukti P-186.1163 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2665. Bukti P-186.1164 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 002 Kabupaten Sampang;
2666. Bukti P-186.1165 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2667. Bukti P-186.1166 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 006 Kabupaten Sampang;
2668. Bukti P-186.1167 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2669. Bukti P-186.1168 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Morbatoh TPS 001 Kabupaten Sampang;
2670. Bukti P-186.1169 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

2671. Bukti P-186.1170 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Morbatoh TPS 002 Kabupaten Sampang;
2672. Bukti P-186.1171 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2673. Bukti P-186.1172 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Morbatoh TPS 003 Kabupaten Sampang;
2674. Bukti P-186.1173 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2675. Bukti P-186.1174 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Morbatoh TPS 005 Kabupaten Sampang;
2676. Bukti P-186.1175 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2677. Bukti P-186.1176 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Nagasareh TPS 001 Kabupaten Sampang;
2678. Bukti P-186.1177 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2679. Bukti P-186.1178 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Nagasareh TPS 002 Kabupaten Sampang;
2680. Bukti P-186.1179 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2681. Bukti P-186.1180 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Nagasareh TPS 004 Kabupaten Sampang;
2682. Bukti P-186.1181 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2683. Bukti P-186.1182 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Olor TPS 002 Kabupaten Sampang;
2684. Bukti P-186.1183 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2685. Bukti P-186.1184 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Olor TPS 007 Kabupaten Sampang;
2686. Bukti P-186.1185 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2687. Bukti P-186.1186 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Planggaran Barat TPS 002 Kabupaten Sampang;
2688. Bukti P-186.1187 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2689. Bukti P-186.1188 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Terosan TPS 001 Kabupaten Sampang;
2690. Bukti P-186.1189 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2691. Bukti P-186.1190 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Terosan TPS 002 Kabupaten Sampang;

2692. Bukti P-186.1191 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2693. Bukti P-186.1192 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Terosan TPS 004 Kabupaten Sampang;
2694. Bukti P-186.1193 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Terosan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2695. Bukti P-186.1194 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Terosan TPS 006 Kabupaten Sampang;
2696. Bukti P-186.1195 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2697. Bukti P-186.1196 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tlagah TPS 003 Kabupaten Sampang;
2698. Bukti P-186.1197 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2699. Bukti P-186.1198 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tlagah TPS 005 Kabupaten Sampang;
2700. Bukti P-186.1199 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Tlagah KecamatanBanyuates Kabupaten Sampang;
2701. Bukti P-186.1200 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tlagah TPS 010 Kabupaten Sampang;
2702. Bukti P-186.1201 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2703. Bukti P-186.1202 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tlagah TPS 011 Kabupaten Sampang;
2704. Bukti P-186.1203 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2705. Bukti P-186.1204 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tlagah TPS 012 Kabupaten Sampang;
2706. Bukti P-186.1205 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2707. Bukti P-186.1206 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tlagah TPS 013 Kabupaten Sampang;
2708. Bukti P-186.1207 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2709. Bukti P-186.1208 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Tolang TPS 001 Kabupaten Sampang;
2710. Bukti P-186.1209 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2711. Bukti P-186.1210 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Trapang TPS 001 Kabupaten Sampang;
2712. Bukti P-186.1211 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

2713. Bukti P-186.1212 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Banyuates Desa Trapang TPS 002 Kabupaten Sampang;
2714. Bukti P-186.1213 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
2715. Bukti P-186.1214 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Karangpenang Desa Karangpenang Oloh TPS 004 Kabupaten Sampang;
2716. Bukti P-186.1215 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
2717. Bukti P-186.1216 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Karangpenang Desa Karangpenang Oloh TPS 009 Kabupaten Sampang;
2718. Bukti P-186.1217 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
2719. Bukti P-186.1218 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Karangpenang Desa Karangpenang Oloh TPS 013 Kabupaten Sampang;
2720. Bukti P-186.1219 : Cetak Foto C-Hasil TPS 019 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
2721. Bukti P-186.1220 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Karangpenang Desa Karangpenang Oloh TPS 019 Kabupaten Sampang;
2722. Bukti P-186.1221 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
2723. Bukti P-186.1222 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Karangpenang Desa Poreh TPS 001 Kabupaten Sampang;
2724. Bukti P-186.1223 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
2725. Bukti P-186.1224 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 002 Kabupaten Sampang;
2726. Bukti P-186.1225 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
2727. Bukti P-186.1226 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kedungdung Desa Kramat TPS 002 Kabupaten Sampang;
2728. Bukti P-186.1227 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
2729. Bukti P-186.1228 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kedungdung Desa Pajeruan TPS 011 Kabupaten Sampang;
2730. Bukti P-186.1229 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
2731. Bukti P-186.1230 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kedungdung Desa Pajeruan TPS 012 Kabupaten Sampang;

2732. Bukti P-186.1231 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Rohayu Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
2733. Bukti P-186.1232 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kedungdung Desa Rohayu TPS 004 Kabupaten Sampang;
2734. Bukti P-186.1233 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2735. Bukti P-186.1234 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 007 Kabupaten Sampang;
2736. Bukti P-186.1235 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2737. Bukti P-186.1236 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ketapang Desa Pancor TPS 001 Kabupaten Sampang;
2738. Bukti P-186.1237 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2739. Bukti P-186.1238 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ketapang Desa Pancor TPS 008 Kabupaten Sampang;
2740. Bukti P-186.1239 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2741. Bukti P-186.1240 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ketapang Desa Pangereman TPS 007 Kabupaten Sampang;
2742. Bukti P-186.1241 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2743. Bukti P-186.1242 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Ketapang Desa Paopale Laok TPS 007 Kabupaten Sampang;
2744. Bukti P-186.1243 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2745. Bukti P-186.1244 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Bapelle TPS 004 Kabupaten Sampang;
2746. Bukti P-186.1245 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2747. Bukti P-186.1246 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Bapelle TPS 005 Kabupaten Sampang;
2748. Bukti P-186.1247 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2749. Bukti P-186.1248 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Jelgung TPS 001 Kabupaten Sampang;
2750. Bukti P-186.1249 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2751. Bukti P-186.1250 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Jelgung TPS 004 Kabupaten Sampang;
2752. Bukti P-186.1251 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

2753. Bukti P-186.1252 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Jelgung TPS 008 Kabupaten Sampang;
2754. Bukti P-186.1253 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2755. Bukti P-186.1254 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Pandiyangan TPS 003 Kabupaten Sampang;
2756. Bukti P-186.1255 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2757. Bukti P-186.1256 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Pandiyangan TPS 005 Kabupaten Sampang;
2758. Bukti P-186.1257 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2759. Bukti P-186.1258 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Robatal TPS 001 Kabupaten Sampang;
2760. Bukti P-186.1259 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2761. Bukti P-186.1260 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Robatal TPS 004 Kabupaten Sampang;
2762. Bukti P-186.1261 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2763. Bukti P-186.1262 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Robatal TPS 005 Kabupaten Sampang;
2764. Bukti P-186.1263 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2765. Bukti P-186.1264 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Robatal TPS 007 Kabupaten Sampang;
2766. Bukti P-186.1265 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2767. Bukti P-186.1266 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 005 Kabupaten Sampang;
2768. Bukti P-186.1267 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2769. Bukti P-186.1268 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 006 Kabupaten Sampang;
2770. Bukti P-186.1269 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2771. Bukti P-186.1270 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Torjunan TPS 004 Kabupaten Sampang;
2772. Bukti P-186.1271 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2773. Bukti P-186.1272 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Tragih TPS 002 Kabupaten Sampang;

2774. Bukti P-186.1273 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2775. Bukti P-186.1274 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Robatal Desa Tragih TPS 006 Kabupaten Sampang;
2776. Bukti P-186.1275 : Cetak Foto C-Hasil TPS 006 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2777. Bukti P-186.1276 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Bira Timur TPS 006 Kabupaten Sampang;
2778. Bukti P-186.1277 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2779. Bukti P-186.1278 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Bira Timur TPS 009 Kabupaten Sampang;
2780. Bukti P-186.1279 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2781. Bukti P-186.1280 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Daya TPS 002 Kabupaten Sampang;
2782. Bukti P-186.1281 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2783. Bukti P-186.1282 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Daya TPS 005 Kabupaten Sampang;
2784. Bukti P-186.1283 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2785. Bukti P-186.1284 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Laok TPS 001 Kabupaten Sampang;
2786. Bukti P-186.1285 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2787. Bukti P-186.1286 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Laok TPS 003 Kabupaten Sampang;
2788. Bukti P-186.1287 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2789. Bukti P-186.1288 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Tengah TPS 003 Kabupaten Sampang;
2790. Bukti P-186.1289 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2791. Bukti P-186.1290 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Tengah TPS 004 Kabupaten Sampang;
2792. Bukti P-186.1291 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2793. Bukti P-186.1292 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Tengah TPS 007 Kabupaten Sampang;

2794. Bukti P-186.1293 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2795. Bukti P-186.1294 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Tengah TPS 008 Kabupaten Sampang;
2796. Bukti P-186.1295 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2797. Bukti P-186.1296 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Sokobanah Tengah TPS 009 Kabupaten Sampang;
2798. Bukti P-186.1297 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2799. Bukti P-186.1298 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tamberu Laok TPS 001 Kabupaten Sampang;
2800. Bukti P-186.1299 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2801. Bukti P-186.1300 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tamberu Laok TPS 007 Kabupaten Sampang;
2802. Bukti P-186.1301 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2803. Bukti P-186.1302 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tamberu Timur TPS 003 Kabupaten Sampang;
2804. Bukti P-186.1303 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2805. Bukti P-186.1304 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tobai Barat TPS 004 Kabupaten Sampang;
2806. Bukti P-186.1305 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2807. Bukti P-186.1306 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tobai Tengah TPS 007 Kabupaten Sampang;
2808. Bukti P-186.1307 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2809. Bukti P-186.1308 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tobai Timur TPS 002 Kabupaten Sampang;
2810. Bukti P-186.1309 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2811. Bukti P-186.1310 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tobai Timur TPS 003 Kabupaten Sampang;
2812. Bukti P-186.1311 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2813. Bukti P-186.1312 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tobai Timur TPS 007 Kabupaten Sampang;

2814. Bukti P-186.1313 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
2815. Bukti P-186.1314 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sokobanah Desa Tobai Timur TPS 009 Kabupaten Sampang;
2816. Bukti P-186.1315 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
2817. Bukti P-186.1316 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Tambelangan Desa Birem TPS 002 Kabupaten Sampang;
2818. Bukti P-187.1 : Cetak foto C-Hasil TPS 04 Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
2819. Bukti P-187.2 : Cetak foto C-Hasil TPS 07 Desa Lar-lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2820. Bukti P-187.3 : Cetak foto C-Hasil TPS 03 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
2821. Bukti P-187.4 : Cetak foto C-Hasil TPS 06 Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2822. Bukti P-187.5 : Cetak foto C-Hasil TPS 03 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2823. Bukti P-188.1 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2824. Bukti P-188.2 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2825. Bukti P-188.3 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Cangkareman Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2826. Bukti P-188.4 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Cangkareman Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2827. Bukti P-188.5 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2828. Bukti P-188.6 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2829. Bukti P-188.7 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2830. Bukti P-188.8 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2831. Bukti P-188.9 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2832. Bukti P-188.10 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2833. Bukti P-188.11 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2834. Bukti P-188.12 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2835. Bukti P-188.13 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2836. Bukti P-188.14 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2837. Bukti P-188.15 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2838. Bukti P-188.16 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2839. Bukti P-188.17 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2840. Bukti P-188.18 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2841. Bukti P-188.19 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2842. Bukti P-188.20 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2843. Bukti P-188.21 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2844. Bukti P-188.22 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2845. Bukti P-188.23 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2846. Bukti P-188.24 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2847. Bukti P-188.25 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2848. Bukti P-188.26 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2849. Bukti P-188.27 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2850. Bukti P-188.28 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2851. Bukti P-188.29 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2852. Bukti P-188.30 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2853. Bukti P-188.31 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2854. Bukti P-188.32 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2855. Bukti P-188.33 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2856. Bukti P-188.34 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2857. Bukti P-188.35 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2858. Bukti P-188.36 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2859. Bukti P-188.37 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2860. Bukti P-188.38 : Cetak Foto C-Hasil TPS 001 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2861. Bukti P-188.39 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2862. Bukti P-188.40 : Cetak Foto C-Hasil TPS 002 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2863. Bukti P-188.41 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2864. Bukti P-188.42 : Cetak Foto C-Hasil TPS 003 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2865. Bukti P-188.43 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2866. Bukti P-188.44 : Cetak Foto C-Hasil TPS 004 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2867. Bukti P-188.45 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2868. Bukti P-188.46 : Cetak Foto C-Hasil TPS 005 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2869. Bukti P-188.47 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2870. Bukti P-188.48 : Cetak Foto C-Hasil TPS 007 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2871. Bukti P-188.49 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2872. Bukti P-188.50 : Cetak Foto C-Hasil TPS 008 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;

2873. Bukti P-188.51 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2874. Bukti P-188.52 : Cetak Foto C-Hasil TPS 009 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2875. Bukti P-188.53 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2876. Bukti P-188.54 : Cetak Foto C-Hasil TPS 010 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2877. Bukti P-188.55 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2878. Bukti P-188.56 : Cetak Foto C-Hasil TPS 011 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2879. Bukti P-188.57 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2880. Bukti P-188.58 : Cetak Foto C-Hasil TPS 012 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2881. Bukti P-188.59 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Pertama Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2882. Bukti P-188.60 : Cetak Foto C-Hasil TPS 013 Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Yang Kedua Kali Disimpan Pada Situs Sirekap KPU;
2883. Bukti P-189 : Fotokopi keterangan ahli.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokokna mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur

Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
3. Bahwa sekalipun tuntutan *(petitum)* Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB **(Bukti T-1)**, namum permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

4. Bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang di halaman 25 huruf C Analisa Hukum angka 1, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 *(dua belas juta)* jiwa adalah peserta Pemilihan yang memiliki

perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% *(nol koma lima persen)* dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi **(Bukti T-2) dan (Bukti T-3)**;

2. Bahwa mengingat penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampirannya Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024 berjumlah 41.714.928 *(empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh)* jiwa, **(Bukti T-4)**, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% *(nol koma lima persen)* antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 terdapat **selisih perolehan suara sebanyak 12.192.165 - 6.743.095 = 5.449.070** (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh) suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari **total suara sah sebanyak 20.732.592** (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebanyak **0,5% x 20.732.592 = 103.663** (seratus tiga

ribu enam ratus enam puluh tiga) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan **(Bukti T-1);**

4. Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon umtuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu Putusan Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum karena **pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang diatur dalam Konstitusi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif serta terjadinya pelanggaran asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal*

standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCURE LIBEL)*

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel)* dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (posita) dengan tuntutan (petitum) permohonan serta kesesuaian antar tuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
3. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024;
4. Bahwa tuntutan *(petitum)* Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas atau Kabur *(Obscure Libel)*** atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, (**Bukti T-1**) yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., dan H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.	1.797.332
2.	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, dan EMIL ELESTIANTO DARDAK	12.192.165
3.	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T., dan ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, S.IP., M.Kes.	6.743.095
Total Suara Sah		**20.732.592**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Total Suara Tidak Sah		**1.204.610**

4. Bahwa hasil perolehan suara tersebut ditetapkan telah sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS yang direkap secara berjenjang di tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi, sehingga tidak ditemukan keberatan saksi Pasangan Calon **terkait hasil perolehan suara** pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur menurut perhitungan Pemohon adalah dikalkulasi berdasarkan asumsi-asumsi Pemohon yang tertuang dalam dalil-dalil permohonannya, bahkan asumsi-asumsi tersebut sulit sekali untuk dapat dipahami karena sangat sumir, kabur dan tidak jelas korelasinya dengan penambahan dan/atau pengurangan suara masing-masing pasangan calon;

6. Bahwa agar mudah untuk dipahami dengan ini Termohon mengelompokan jawaban berdasarkan kategori asumsi-asumsi penghitugan suara yang disampaikan Pemohon, sebagai berikut:

   A. Terkait dalil pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait

   Bahwa menurut dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf a, b dan c, telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan Pihak Terkait yang disebabkan karena 3 hal, yaitu:

   a. perolehan suara Pemohon yang kurang dari 30 bahkan ada yang 0 (nihil);
   b. suara tidak sah lebih dari 10% dan pasangan calon nomor urut 02 memperoleh suara lebih dari 50% dalam 1 TPS;
   c. suara tidak sah Pemilihan Gubernur lebih kecil dari suara tidak sah Pemilihan Bupati/Walikota.

   Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bagaimana hubungan fakta-fakta tersebut dengan bertambah atau berkurangnya suara Pasangan Calon tertentu;

Bahwa faktanya tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan dan/atau Keberatan saksi yang spesifik menerangkan keberatan terkait dalil permohonan Pemohon serta tidak ada Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi yang terkait dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa fakta-fakta tersebut merupakan keniscayaan yang menunjukan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, telah berlangsung secara **Luber dan Jurdil** karena fakta yang terjadi secara alamiah sesuai dengan kehendak pemilih di TPS tanpa ada yang bisa mengatur dan mengintervensi.

B. Tekait dalil manipulasi dalam rekapitulasi dan penghitungan suara bersifat Terstruktur, Sistmatis, dan Masif

Bahwa menurut Pemohon asumsi ini didasarkan atas stabilitas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di angka 58,54% dari awal hingga akhir rekapitulasi, bahkan ketika data masuk lebih dari 87,58% pada pukul 21.00 WIB tanggal **24 November 2024** hingga mencapai 100% pada pukul 10.00 WIB tanggal 28 November 2024, sementara faktanya pemungutan dan penghitungan suara baru dimulai tanggal 27 November 2024, serta Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya data yang disampaikan bersumber dari mana;

Bahwa logikanya stabilitas angka tersebut justru menunjukkan perolehan suara yang masuk berimbang, karena jika perolehan suara yang masuk tidak berimbang tentu mengakibatkan persentase perolehan suara calon tersebut akan semakin naik sementara yang lain akan semakin turun;

Bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan stabilitas suara tersebut karena pengkondisian data yang di upload dalam Sirekap, tidak beralasan menurut hukum karena data Sirekap bersumber dari TPS dan diupload oleh petugas KPPS, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pengkondisian oleh siapapun;

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya menipulasi dokumen Model C.Hasil-KWK-Gubernur, pemungutan suara yang tidak sesuai

ketentuan, dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati/Walikota, tidak didukung argumentasi hukum yang cukup sehingga patut untuk diabaikan. Karena lumrah saja dalam suatu daerah tertentu ada kecendrungan pemilih lebih antusias pada jenis pemilihan tertentu, dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

C. Terkait dalil pembagian Bansos PKH

Pembagian Bansos PKH merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintahan Desa/Kelurahan, mulai dari penentuan penerima hingga waktu pembagian;

Bahwa sejak 13 Februari 2024 masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah berakhir dan digantikan oleh Penjabat Gubernur Adhy Karyono;

Bahwa tidak beralasan hukum jika Pemohon melimpahkan kesalahan atas pembagian Bansos PKH yang menurut Pemohon dilakukan pada tanggal 13 November 2024 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak lagi menjabat sejak 13 Februari 2024;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana korelasi pembagian Bansos PKH dengan berkurang dan/atau bertambahnya perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024;

Bahwa sejak diketahui 13 November 2024 hingga permohonan ini diregistrasi di Mahkamah Konstitusi Termohon tidak mendengar adanya laporan pelanggaran terkait pembagian Bansos PKH tersebut kelembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya yang seolah-olah menggambarkan telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang mendasar (fundamental) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, sejatinya menunjukkan ketidakkonsitenan Pemohon dalam memahami

kualifikasi permasalahan yang diajukan, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 59 ayat (2) Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa pemungutan suara ulang di TPS hanya dilakukan jika terdapat keadaan, sebagai berikut:

   (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan, sebagai berikut:
   a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
   b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
   c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
   d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
   e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Pemungutan Suara Ulang karena alasan yang ditentukan dalam ayat 2 huruf a hingga huruf e UU Pemilihan mensyaratkan adanya **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan**, sementara *in casu* dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas Kecamatan;

10. Bahwa tidak adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan disebabkan karena tidak adanya keberatan dan temuan dari Pengawas TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, sejalan dengan dalil jawaban Termohon sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah berjalan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa dengan demikian tuntutan pelaksanaan PSU yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan beralasan untuk dinyatakan ditolak;
12. Bahwa terkait tuntutan Pemohon agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2, patut untuk ditolak karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat dibenarkan;
13. Bahwa diskualifikasi Pasangan Calon dimungkinkan jika terbukti melakulan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, ketentuan Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif, mengisyaratkan bahwa dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut hasil Pemilu;
14. Bahwa penanganan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dengan terlebih dahulu dilaporkan oleh pihak yang dirugikan, sementara tuduhan pelanggaran yang didalilkan Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa dan mengadilinya;
15. Bahwa dengan demikian tuntutan diskualifikasi yang diajukan oleh Pemohon adalah premature dan patut untuk dikesampingkan;
16. Bahwa tindakan Pemohon yang dengan seenaknya mengurangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah tindakan yang melecehkan hati nurani dan pilihan rakyat yang telah diberikan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 November 2024;
17. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, pada huruf B halaman 16 hingga halaman 25 yakni tentang penggunaan DPT 90-100% terdapat 2.780 TPS yang

tersebar di 36 Kabupaten/Kota, dimana persentase terbesar berada di Kabupaten Sampang 53,57%, Pamekasan 45,43%, Bangkalan 27,77%, Sumenep 15,68% dan Mojokerto 15,45%, dengan penyelenggaraan tidak sesuai ketentuan, menghasilkan suara untuk Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebesar 946.415 suara adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR**. Adapun dalil bantahan Termohon sebagai berikut:

Bantahan Termohon Terhadap Dalil Penggunaan
DPT 90% - 100% Di TPS

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
(1)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPPS pada saat itu juga di TPS 07, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi **(Bukti T-23) dan (Bukti T-8)**.

(2)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bondowoso, Bondowoso, Pancoran, TPS 07 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bondowoso, Bondowoso, Pancoran, TPS 07 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan di Pleno tingkat Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso **(Bukti T-24) dan (Bukti T-9)**.
(3)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Giri, Grogol, TPS 07 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form

		Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPPS pada saat itu juga di TPS 07, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi **(Bukti T-23) dan (Bukti T-8)**.
(4)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Lamongan, Paciran, Weru, TPS 06 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Lamongan, Paciran, Weru, TPS 06 100% karena faktanya berdasarkan Form Model C.Hasil KWK-Gubernur Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap 71,11% (tidak 100%) **(Bukti T-25) dan (Bukti T-10)**.
(5)	Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Sidoarjo, Tarik, Segodobancang, TPS 02 tidak 95,69% kehadiran	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Sidoarjo, Tarik, Segodobancang, TPS 02 tidak 95,69% kehadiran karena faktanya berdasarkan Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur,

		jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap 95,69%. **(Bukti T-26) dan (Bukti T-11)**.
(6)	Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Sumenep, Arjasa, Buddi, TPS 03 tidak 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan daftar hadir pemilih tetap Kabupaten Sumenep, Arjasa, Buddi, TPS 03 tidak 100% karena faktanya berdasarkan Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap 100% **(Bukti T-27) dan (Bukti T-12)**.
(7)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sumenep, Arjasa, Angonangon, TPS 07 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sumenep, Arjasa, Angonangon, TPS 07 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih. Atas permasalahan tersebut telah

		dilakukan perbaikan di Pleno tingkat Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep **(Bukti T-28) dan (Bukti T-12)**.
(8)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean, TPS 04 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean, TPS 04 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat pleno tingkat Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo **(Bukti T-29) dan (Bukti T-13)**.
(9)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Wongsorejo, Bajulmati, TPS 09 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Wongsorejo, Bajulmati, TPS 09 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya

		kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat pleno tingkat Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi **(Bukti T-30) dan (Bukti T-14)**.
(10)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean, TPS 04 tidak 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Sidoarjo, Sedati, Pabean, TPS 04 tidak 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih

		Tetap-KWK. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat pleno tingkat Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo **(Bukti T-29) dan (Bukti T-13)**.
(11)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Balen, Mayangkawis, TPS 01 100%	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Balen, Mayangkawis, TPS 01 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPPS pada saat itu juga di TPS 01, Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro **(Bukti T-31) dan (Bukti T-15)**.
(12)	Bahwa penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten	Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan

	Bojonegoro, Kapas, Mojodeso, TPS 04 100%	penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kapas, Mojodeso, TPS 04 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur, yang semestinya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di tulis berdasarkan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi oleh KPPS di tulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat itu pleno tingkat Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro **(Bukti T-32) dan (Bukti T-16)**.
(13)	Bahwa di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan ditemukan penggunaan DPT 100% di seluruh TPS yang ada di 15 Desa, sementara daftar hadir tidak 100% dan memanipulasi daftar kehadiran, ini menunjukkan adanya kecurangan agar memenuhi target kemenangan dari Paslon 02 sebesar 58,72%	Bahwa tidak benar Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih, faktanya hanya ada 12 Desa dalam dalil permohonan Pemohon, dan faktanya jumlah pemilih yang hadir dalam daftar hadir sama dengan jumlah pengguna hak pilih.

(14)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 01 **(Bukti T-33).**
(15)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 02 **(Bukti T-34).**
(16)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 03 **(Bukti T-35).**
(17)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 04 **(Bukti T-36).**

(18)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 05 **(Bukti T-37).**
(19)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Batioh TPS 06 **(Bukti T-38).**
(20)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 01 **(Bukti T-39).**
(21)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 02 **(Bukti T-40).**

(22)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 03 **(Bukti T-41).**
(23)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 04 **(Bukti T-42).**
(24)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 05 **(Bukti T-43).**
(25)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 06 **(Bukti T-44).**

(26)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa Montor terdapat di TPS 07 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa Montor TPS 07 **(Bukti T-45).**
(27)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA TPS 01 **(Bukti T-46).**
(28)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA TPS 02 **(Bukti T-47).**
(29)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA TPS 03 **(Bukti T-48).**

(30)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA TPS 04 **(Bukti T-49).**
(31)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA TPS 05 **(Bukti T-50).**
(32)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa NEPA terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa NEPA TPS 06 **(Bukti T-51).**
(33)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa PLANGGARAN TIMUR di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa PLANGGARAN TIMUR TPS 01 **(Bukti T-52).**

(34)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa PLANGGARAN TIMUR di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa PLANGGARAN TIMUR TPS 02 **(Bukti T-53).**
(35)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa PLANGGARAN TIMUR di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa PLANGGARAN TIMUR TPS 03 **(Bukti T-54).**
(36)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa TEBANAH TPS 01 **(Bukti T-55).**
(37)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

		Kecamatan Banyuates Desa TEBANAH TPS 02 **(Bukti T-56).**
(38)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa TEBANAH TPS 03 **(Bukti T-57).**
(39)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa TEBANAH TPS 04 **(Bukti T-58).**
(40)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TEBANAH di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa TEBANAH TPS 05 **(Bukti T-59).**
(41)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TRAPANG di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

		Kecamatan Banyuates Desa TRAPANG TPS 01 **(Bukti T-60).**
(42)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TRAPANG di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa TRAPANG TPS 02 **(Bukti T-61).**
(43)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Desa TRAPANG di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Banyuates Desa TRAPANG TPS 03 **(Bukti T-62).**
(44)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 01 **(Bukti T-63).**
(45)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

	daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 02 **(Bukti T-64).**
(46)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 03 **(Bukti T-65).**
(47)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 04 **(Bukti T-66).**
(48)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 05 **(Bukti T-67).**
(49)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah

	Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 06 **(Bukti T-68).**
(50)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet terdapat di TPS 07 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Karang Penang Desa Bulmatet TPS 07 **(Bukti T-69).**
(51)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 01 **(Bukti T-70).**
(52)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 02 **(Bukti T-71).**

(53)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 03 **(Bukti T-72).**
(54)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 04 **(Bukti T-73).**
(55)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 05 **(Bukti T-74).**
(56)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

	pemilih menunjukkan hal berbeda	Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 06 **(Bukti T-75).**
(57)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 07 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 07 **(Bukti T-76).**
(58)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 08 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 8 **(Bukti T-77).**
(59)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 09 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 09 **(Bukti T-78).**
(60)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah

	Banyuates Desa Batioha terdapat di TPS 10 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 10 **(Bukti T-79).**
(61)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur terdapat di TPS 11 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Kedungdung Desa Batoporo Timur TPS 11 **(Bukti T-80).**
(62)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS, TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 01 **(Bukti T-81).**
(63)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 02 **(Bukti T-82).**

(64)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 03 **(Bukti T-83).**
(65)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 04 **(Bukti T-84).**
(66)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 05 **(Bukti T-85).**
(67)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

	daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 06 **(Bukti T-86).**
(68)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur terdapat di TPS 07 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Bunten Timur TPS 07 **(Bukti T-87).**
(69)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 01 **(Bukti T-88).**
(70)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 02 **(Bukti T-89).**
(71)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah

	Desa Karanganyar di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 03 **(Bukti T-90).**
(72)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 04 **(Bukti T-91).**
(73)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 05 **(Bukti T-92).**
(74)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 06 **(Bukti T-93).**

(75)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 07 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 07 **(Bukti T-94).**
(76)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar di TPS 08 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Ketapang Desa Karanganyar TPS 08 **(Bukti T-95).**
(77)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan TPS 01 **(Bukti T-96).**
(78)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

		Kecamatan Omben Desa Jranguan TPS 02 **(Bukti T-97).**
(79)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan TPS 03 **(Bukti T-98).**
(80)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Omben Desa Jranguan TPS 04 **(Bukti T-99).**
(81)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 01 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 01 **(Bukti T-100).**
(82)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 02 tetapi sesuai dengan	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang

	daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 02 **(Bukti T-101).**
(83)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 03 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 03 **(Bukti T-102).**
(84)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 04 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 04 **(Bukti T-103).**
(85)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 05 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 05 **(Bukti T-104).**
(86)	Bahwa penggunaan DPT 100% yang terdapat di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal	Bahwa faktanya benar antara Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah

	Desa Sawah Tengah terdapat di TPS 06 tetapi sesuai dengan daftar hadir pemilih menunjukkan hal berbeda	pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya sama di Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah TPS 06 **(Bukti T-105).**

Bahwa dengan demikian dalil tentang adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon adalah juga tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., dan H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.	1.797.332
2.	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, dan EMIL ELESTIANTO DARDAK	12.192.165
3.	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T., dan ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, S.IP., M.Kes.	6.743.095

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Total Suara Sah		**20.732.592**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-106 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2024, Ditetapkan pada Hari Senin Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 Wib. Beserta Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Ditetapkan pada Tanggal 22 September 2024 Beserta Lampiran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Ditetapkan pada Tanggal 23 September 2024 Beserta Lampiran Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampirannya Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan

Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024.

5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Provinsi Jawa Timur.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, di tingkat Kabupaten/Kota; Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lumajang, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruhan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruhan, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Malang, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya.

7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakiil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tingkat Kabupaten/Kota; Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Kota Pasuruhan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruhan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kota Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kota Surabaya.

8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 07 Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Dokumen rekapitulasi di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berupa:
   1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
   2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Dokumen rekapitulasi di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
    2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Dokumen rekapitulasi di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
    2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
    2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Wongsorego Kabupaten Banyuwangi, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
    2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

16. Bukti T-16 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
    2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, berupa:

1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, berupa:
    1. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
24. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
25. Bukti T-25 : Fotokopi MODELC.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
26. Bukti T-26 : Fotokopi MODELC.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Segondobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Buddi Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
28. Bukti T-28 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Angonangon Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
29. Bukti T-29 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
30. Bukti T-30 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 09 Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorego Kabupaten Banyuwangi.
31. Bukti T-31 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
33. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

34. Bukti T-34 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
35. Bukti T-35 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
36. Bukti T-36 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
37. Bukti T-37 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
38. Bukti T-38 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
39. Bukti T-39 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
40. Bukti T-40 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

41. Bukti T-41 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
42. Bukti T-42 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
43. Bukti T-43 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di Tps 05 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
44. Bukti T-44 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
45. Bukti T-45 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
46. Bukti T-46 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
47. Bukti T-47 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di Tps 02 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

48. Bukti T-48 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
49. Bukti T-49 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
50. Bukti T-50 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
51. Bukti T-51 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
52. Bukti T-52 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
53. Bukti T-53 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
54. Bukti T-54 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

55. Bukti T-55 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di Tps 01 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
56. Bukti T-56 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
57. Bukti T-57 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
58. Bukti T-58 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
59. Bukti T-59 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
60. Bukti T-60 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
61. Bukti T-61 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

62. Bukti T-62 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
63. Bukti T-63 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
64. Bukti T-64 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
65. Bukti T-65 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
66. Bukti T-66 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
67. Bukti T-67 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
68. Bukti T-68 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

69. Bukti T-69 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

70. Bukti T-70 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

71. Bukti T-71 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

72. Bukti T-72 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

73. Bukti T-73 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

74. Bukti T-74 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

75. Bukti T-75 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

76. Bukti T-76 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
77. Bukti T-77 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 08 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
78. Bukti T-78 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 09 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
79. Bukti T-79 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 10 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
80. Bukti T-80 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 11 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
81. Bukti T-81 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
82. Bukti T-82 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

83. Bukti T-83 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
84. Bukti T-84 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
85. Bukti T-85 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
86. Bukti T-86 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
87. Bukti T-87 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
88. Bukti T-88 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
89. Bukti T-89 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

90. Bukti T-90 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
91. Bukti T-91 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
92. Bukti T-92 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
93. Bukti T-93 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
94. Bukti T-94 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 07 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
95. Bukti T-95 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 08 Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
96. Bukti T-96 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

97. Bukti T-97 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

98. Bukti T-98 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

99. Bukti T-99 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di Tps 04 Desa Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

100. Bukti T-100 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 01 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

101. Bukti T-101 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 02 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

102. Bukti T-102 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 03 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

103. Bukti T-103 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 04 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

104. Bukti T-104 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 05 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
105. Bukti T-105 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR Tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Di TPS 06 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
106. Bukti T-106 : Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. Terkait Perkara Nomor: 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum kami menguraikan secara rinci tentang Keterangan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan secara singkat beberapa hal pada bagian Pendahuluan ini sebagai berikut:

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Pemilihan Kepala Daerah ("***Pilkada***") serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, dengan total sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) provinsi serta 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut dengan melibatkan 38 KPU Kabupaten/Kota, 666 PPK, 8.494 PPS dan 60.751 KPPS (TPS).

Pada tanggal 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ("***KPU Provinsi Jatim***") (*in casu* Termohon) telah melangsungkan Pemungutan Suara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam

kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ("***Pilgub Jatim 2024***"), yang diikuti tiga Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur ("***Paslon***"), yakni:

1. **Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si & H. Lukmanul Khakim, M.Si** sebagai Paslon Nomor Urut 1;
2. **Khofifah Indar Parawansa & Emil Elestianto Dardak** sebagai Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pihak Terkait); dan
3. **Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. & Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, S.IP., M.Kes** sebagai Paslon Nomor Urut 3 (*in casu* Pemohon).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024 ("***Keputusan KPU Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024***") (*vide* **Bukti PT-3**), Pihak Terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh Termohon memperoleh 12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima) suara, dan oleh karenanya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Paslon terpilih dalam Pilgub Jatim 2024. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("***UU Pilkada***"), yang memuat bahwa: "*Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.*"

Tingginya jumlah suara yang didulang oleh salah satu pasangan calon dalam suatu kontestasi pemilihan umum, termasuk di dalamnya adalah Pilkada, tentunya tidak bisa dimaknai secara tunggal sebagai kemenangan dari pasangan calon itu saja, melainkan juga harus dimaknai sebagai sebuah kemenangan dari masyarakat pemilih, yang telah memberikan hak suaranya secara demokratis kepada calon

pimpinan kepala daerah yang mereka percayai untuk memangku jabatan dalam periode waktu tertentu.

Dalam hal ini, Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Paslon terpilih dalam Pilgub Jatim 2024 dengan perolehan suara sebanyak 58,81% (lima puluh delapan koma delapan satu persen) dari total suara sah, tentunya tidak hanya bermakna sebagai kemenangan bagi Pihak Terkait saja, melainkan merupakan **kemenangan bagi masyarakat Jawa Timur** yang dicapai melalui penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Jumlah perolehan suara yang melebihi lima puluh persen dari total suara sah tersebut juga sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas masyarakat Jawa Timur untuk memberikan amanat kepada Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks ini, sangat diperlukan kesadaran yang tinggi serta pemahaman bersama untuk terus menjaga agar jangan sampai setelah kemenangan masyarakat itu diperoleh, lalu atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu, kemudian terjadi upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil Pilkada dengan alasan-alasan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Apabila kita mencermati secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, kiranya tampak terdapat upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dengan tujuan menegasikan jumlah suara mayoritas masyarakat Jawa Timur yang telah diberikan kepada Pihak Terkait dalam perhelatan Pilgub Jatim 2024. Bahkan tidak berhenti hanya sampai di situ, Pemohon di dalam Permohonannya juga secara tidak konsisten dan tanpa dasar yang jelas justru meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (“***PSU***”) tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait.

Hal demikian tentunya merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi, yang mana kemudian diperparah lagi dengan adanya fakta bahwa hal-hal yang dipaksa untuk dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* hanyalah sebatas narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Pilgub Jatim 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis serta memenuhi asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Bahkan Pilgub Jatim 2024 telah menorehkan catatan penting karena memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, yaitu sebesar 70,06% (tujuh puluh koma nol enam persen) dan angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pilgub Jatim pada tahun 2013 dan tahun 2018.

Perlu kiranya untuk dicermati, bahwasanya tahapan demi tahapan dalam kegiatan Pilgub Jatim 2024 telah dilalui bersama oleh ketiga Paslon, yakni Pemohon, Pihak Terkait, dan Paslon Nomor Urut 1. Lalu, pertanyaannya mengapa kemudian setelah seluruh tahapan Pilkada dilewati dan Termohon menetapkan hasil rekapitulasi, Pemohon justru berupaya untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan berharap dilakukan PSU dengan tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait? Bagaimana nasib suara mayoritas masyarakat Jawa Timur yang secara demokratis telah diberikan untuk memilih Pihak Terkait? Padahal untuk dapat dilakukannya PSU dengan mendiskualifikasi salah satu Paslon Peserta Pilkada harus memenuhi syarat kondisi-kondisi khusus, contohnya Paslon yang diminta untuk didiskualifikasi benar terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada, atau terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, baik yang berhubungan dengan netralitas pejabat maupun aparatur negara, adanya *money politic* yang masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 *jo.* Pasal 135A UU Pilkada, maupun terkait pelaporan dana kampanye yang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada kejadian maupun kondisi khusus yang dapat dijadikan dasar atau alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan dilakukan PSU oleh Termohon.

Apabila kita menelaah secara cermat tentang dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapatlah dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah sebatas dugaan dan asumsi tentang adanya potensi mengenai perselisihan suara, yang tidak didukung dengan data yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya juga tidak memiliki korelasi yang erat dengan penetapan perolehan suara oleh Termohon dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil Pilgub Jatim 2024.

Pihak Terkait memandang uraian dalam Permohonan *a quo* yang pada prinsipnya mempermasalahkan tentang adanya dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilgub Jatim 2024 namun dibingkai dalam muatan perselisihan hasil pemilihan, hanyalah merupakan upaya dari Pemohon yang bermaksud untuk memperpanjang dinamika proses Pilkada yang sebenarnya telah terselenggara dengan sangat demokratis.

Lebih lanjut, masih terkait dengan uraian dalil Pemohon dalam Permohonannya, mengemuka pula pertanyaan bahwa apakah Pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan manipulasi dalam proses Pilkada telah membawa permasalahan tersebut kepada badan/lembaga yang sesuai dengan kewenangannya? Jika sudah, maka tentunya badan/lembaga tersebut telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud. Jika ternyata Pemohon justru tidak membawa permasalahan itu kepada badan/lembaga yang sesuai dengan kewenangannya, maka artinya Pemohon telah mengabaikan hak-hak hukumnya sendiri dan sekedar memperpanjang tahapan pasca Pilkada saja. Selanjutnya tidaklah tepat apabila kemudian Pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan dan manipulasi dalam proses Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya hanya terbatas pada sengketa hasil.

Secara keseluruhan, dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat proses pelaksanaan Pilkada, dimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah diselesaikan sebelum Termohon menetapkan hasil pemilihan, dan melalui badan/lembaga di luar Mahkamah Konstitusi yang memang diberi kewenangan untuk itu. Untuk lebih jelasnya dapat kami klasifikasikan jenis-jenis pelanggaran serta badan/lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus masing-masing persoalan tersebut sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	**Badan/Lembaga yang Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus**	**Dasar Hukum**
Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada
Tindak Pidana Pemilihan	Sistem Peradilan Pidana	Pasal 146 s/d Pasal 150 UU Pilkada

Jenis Pelanggaran	Badan/Lembaga yang Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus	Dasar Hukum
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pilkada	DKPP	Pasal 137 ayat (1) UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi Pilkada	KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atas rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1) *jo.* Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada

Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan sengketa hasil pemilihan sudah secara pasti terdefinisi dengan jelas di dalam undang-undang.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu, dilihat dari segi formalitasnya, Permohonan Pemohon juga mengandung cacat formil, baik dilihat dari segi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, maupun dilihat dari segi kecermatan dan kejelasan uraian dalil-dalil yang mendasari Permohonannya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian juga dilihat dari segi materilnya, Permohonan Pemohon hanya didasari dengan dalil-dalil tidak berdasar yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid serta tidak dapat diukur secara pasti bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Salah satu dalil tidak berdasar yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya adalah tuduhan mengenai adanya manipulasi yang dilakukan terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik ("***Sirekap***") untuk tujuan menciptakan stabilitas persentasi perolehan suara bagi Pihak Terkait, dimana Pemohon menyatakan bahwa "*tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi yang berlangsung pada 27 November 2024 mulai pukul 15.00 WIB menunjukkan pola yang tidak wajar, dimana persentase suara Paslon 02 sebesar 58,54% dari awal hingga akhir rekapitulasi, bahkan ketika data masuk lebih dari 87,58% (28 November*

2024 pukul 10.00 WIB), tidak ada fluktuasi persentase data yang masuk", padahal faktanya meskipun KPU mengunggah hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 di situs resminya, namun KPU tidak menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara, melainkan hanya menunjukkan bukti dokumen C hasil.

Lagi pula, seandainya pun benar terdapat anomali penghitungan suara yang menyebabkan Pemohon beranggapan bahwa terdapat manipulasi terhadap Sirekap dengan tujuan untuk menstabilkan suara Pihak Terkait -*quod non*-, namun oleh karena Sirekap hanya merupakan alat bantu dan tidak bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka dugaan kecurangan yang dilakukan melalui Sirekap tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon yang dilandaskan pada dalil-dalil yang tidak berdasar tersebut.

Selanjutnya, izinkanlah kami untuk menguraikan secara lebih detail dan spesifik sehubungan dengan tanggapan kami atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("***UUD 1945***") *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas mengatur tentang pembagian kekuasaan kehakiman dimana masing-masing lingkungan peradilan, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, maupun Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan mengadilinya masing-masing; dengan demikian, jika suatu gugatan atau permohonan diajukan kepada badan peradilan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, maka berdasarkan hukum gugatan atau permohonan tersebut haruslah dinyatakan "**tidak dapat diterima**".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dikaitkan dengan ketentuan

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 156 dan Pasal 157 UU Pilkada sebagai derivat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam konstitusi, maka terang dan jelas bahwasanya kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, khususnya terkait Pilkada, **hanyalah** terhadap perselisihan antara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dimana selisih di antara kedua hasil penghitungan suara tersebut **harus signifikan** dan **dapat mempengaruhi penetapan calon kepala daerah terpilih.**

3. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapinya sebagai berikut:
   - pokok persoalan dalam putusan tersebut adalah mengenai ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena norma "***pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang belum direalisasikan***", telah mengancam keberlangsungan pemilihan kepala daerah;
   - dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "***sampai dibentuknya badan peradilan khusus***" sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk;
   - atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menjatuhkan

putusan dengan amar yang menyatakan bahwa frasa "***sampai dibentuknya badan peradilan khusus***" pada Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, serta ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa jelas tidak ada satupun pandangan dari Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, baik yang tertuang dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, yang mencerminkan adanya perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara di luar dari sengketa perselisihan hasil pemilihan.
5. Bahwa dengan demikian, jelas kiranya kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebatas perselisihan mengenai penghitungan suara, bukan tentang pelanggaran sengketa prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif (sengketa proses Pilkada). Namun demikian, Pemohon di dalam Permohonan *a quo* justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan Mahkamah yang bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang dapat dikualifikasikan sebagai sengketa pelanggaran administratif. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada bagian poin IV Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
   1) Manipulasi terhadap Sirekap;
   2) Penyelenggaraan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan dimana terdapat penggunaan DPT 100%;
   3) Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih serta suara tidak sah dalam Pilgub dibandingkan dengan Pilbup/Pilwali;
   4) Manipulasi Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur;
   5) Anomali mengenai jumlah suara tidak sah; dan
   6) Penyaluran Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan ("***Bansos PKH***");

sehingga jelas terlihat bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (kualitatif) dengan hasil penghitungan suara (kuantitatif).

6. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 73 *jo.* Pasal 135A UU Pilkada, dapatlah dipahami bersama bahwasanya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus tentang pelanggaran-pelanggaran yang masuk ke ranah administratif dalam proses Pilkada adalah Bawaslu Provinsi, sehingga merupakan suatu hal yang mustahil bila persoalan-persoalan yang diajukan oleh pihak Pemohon di dalam perkara *a quo*, dipaksakan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sementara hal tersebut tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah. Masih berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif merupakan **kewenangan absolut dari Bawaslu Provinsi, yang kemudian hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.**
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah **tidak benar dan tidak tepat,** karena ketentuan tersebut di atas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan pokok Permohonan Pemohon *a quo*

bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif Pilkada, utamanya pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis dan masif.

3. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasan hukumnya.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pilgub Jatim 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan tidak mendeskripsikan kepentingan atau hubungan hukumnya terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan signifikasi pengaruhnya terhadap penetapan Paslon terpilih, sehingga kedudukan hukumnya menjadi cacat formil.
3. Bahwa sekalipun Pemohon benar merupakan Paslon Peserta Pilgub Jatim 2024 dengan Nomor Urut 3, namun Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU Pilkada, diatur persyaratan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (1) huruf d UU Pilkada

"(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...
b. ...
c. ...
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

4. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 berdasarkan Statistik Indonesia – Statistical Yearbook of Indonesia 2024, volume 52, 2024, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat diakses melalui laman (*vide* **Bukti PT-4**) adalah sebanyak 41,814 juta jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU Pilkada di atas, maka Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara hanya dapat diajukan apabila terdapat selisih suara paling banyak ***sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon***.
5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan penetapan mengenai hasil pemilihan Pilgub Jatim 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-3**), sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si** **&** **H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	1.797.332 *(satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)*
2	**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** **&** **EMIL ELESTIANTO DARDAK**	12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, MT.** **&** **ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	20.732.592 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua)
	TOTAL SUARA TIDAK SAH	1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)

6. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak

20.732.592 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara, maka syarat pengajuan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pilgub Jatim 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Paslon peraih suara tertinggi adalah paling banyak **0,5% x 20.732.592 suara sah = 103.663 suara.**

7. Bahwa adapun faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **sebesar 5.449.070 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh) suara.** Sehingga berdasarkan jumlah selisih suara yang sangat jauh antara Pemohon dan Pihak Terkait tersebut, maka seharusnya sudah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024.
8. Bahwa atas adanya dalil Pemohon tersebut berdasarkan pandangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang Pihak Terkait jadikan sebagai Affidavit (*vide* **Bukti PT-21**) dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:

   > ***Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 5.913.724 jauh di atas ambang batas yang bisa diajukan permohonan yakni 103.663 suara, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016.*** *Artinya* ***Pemohon tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara.***
   > *Karenanya jika dilihat dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon, sulit untuk mendapatkan keyakinan bahwa kedua hal tersebut ada dan dapat dibuktikan oleh Pemohon.* ***Itu sebabnya, konstruksi Pasal 158 (1) tersebut kelihatannya menjadi relevan untuk tetap dipergunakan dalam menilai legal standing pemohon.***

9. Selain itu sesuai dengan pandangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM yang Pihak Terkait jadikan sebagai Affidavit (*vide* **Bukti PT-22**) dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:

   > *Mahkamah dalam beberapa Putusannya menunda pemberlakuan ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016.* ***Penundaan ambang batas tersebut dilakukan secara kasuistis, sepanjang Mahkamah***

> ***menilai ada hal khusus yang harus didalami dalam pomormohonan a quo**. (termasuk adanya Rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan).*
> *Bahwa hasil pencermatan dalam perkara a quo **tidak ada kejadian khusus yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016**.*

10. Bahwa adapun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait penundaan penerapan Pasal 158 UU Pilkada, **tidaklah relevan** dan **tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk memutus perkara *a quo*;** karena, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan-putusan dimaksud, akan tetapi penerapan norma hukum yang demikian sifatnya sangatlah kasuistis, yaitu sepanjang memenuhi kondisi-kondisi khusus seperti adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU, atau telah terbukti secara faktual tentang adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh pihak Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta pemilihan, maupun terjadi gangguan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
11. Bahwa berkaca pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon, kemudian disandingkan dengan uraian dalil Permohonan *a quo* secara keseluruhan, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa tidak ada keadaan-keadaan khusus yang dapat dijadikan dasar atau landasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dalam perkara ini. Dengan demikian, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memiliki kedudukan sebagai pelaksana undang-undang tidak memiliki pilihan lain selain daripada menerapkan syarat ambang batas dalam sengketa Pilkada yang diajukan oleh Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP/BUP/XV/2017 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

> "*Perihal keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon".*

   Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang- undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar".

b. *Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*

(selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoaman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU Nomor 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017.

c. *Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Nomor 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagi organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma undang-undang. Dengan demikian mencampur adukkan kedudukan Mahakmah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan sendiri. (3.2) Menimbang bahwa meskipun UU Nomor 10/2016 adalah undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang Nomor 8/2015 dan UU Nomor 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas, sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan- putusan lainnya dalam perkara perselihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo. (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat: a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya*

sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh instritusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, in casu UU Nomor 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);"

12. Bahwa ketegasan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana undang-undang juga tercermin dalam Pilkada serentak tahun 2015 dimana dari 152 (seratus lima pulun dua) perkara yang diajukan ke Mahkamah, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) perkara **dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan.**
13. Bahwa lebih lanjut, dalam posita Permohonannya pada halaman 7 dan 8 huruf h s/d j, pada prinsipnya Pemohon secara gamblang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menunda keterpenuhan syarat formil kedudukan Pemohon dalam mengajukan pembatalan terhadap Keputusan KPU Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024*.* Dari apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, jelas terbukti bahwasanya Pemohon sendiri telah mengetahui secara sadar dan mengakui secara tegas bahwa sejak semula pihaknya tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pilgub Jatim 2024.
14. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam Pilgub Jatim 2024, namun Pemohon **tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) Huruf d UU Pilkada***,* sehingga Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah.

15. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga Pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama seluruh dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpandangan terdapat suatu hal yang fundamental mengenai inkonsistensi dalam konstruksi posita dan petitum Permohonan. Selain itu Pihak Terkait juga menemukan adanya tuduhan manipulasi yang tidak dikonstruksikan secara cermat oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Selanjutnya, Pihak Terkait akan menguraikan secara rinci mengenai eksepsi *obscuur libel* ini sebagai berikut:

1. PETITUM YANG TIDAK DIDUKUNG POSITA

1.1. Bahwa dalam butir 3 petitum Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: "*Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2024*", namun setelah dicermati seluruh dalil dalam Permohonan *a quo*, ternyata **tidak ada satu dalil yang diuraikan oleh Pemohon perihal pelanggaran yang dimaksud**, dan atau fakta hukum lainnya yang mengakibatkan terjadinya **kondisi serta keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan terdiskualifikasinya Pihak Terkait**. Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan Pemohon tidak ada yang yang berkaitan dengan Pihak Terkait.

1.2. Bahwa dari seluruh posita Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan keadaan yang spesifik dan terukur, misalnya apakah

Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UU Pilkada. Demikian halnya, ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur tentang Persyaratan Pencalonan kepala daerah, apakah Pihak Terkait tidak memenuhi Persyaratan Pencalonan dimaksud. Hal lain adalah, bahwa selain persyaratan calon dan persyaratan pencalonan, diskualifikasi terhadap pasangan calon, dapat dilakukan jika melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) dan atau ayat (3) UU Pilkada. Namun, hal ini tidak ada diuraikan oleh Pemohon di dalam posita Permohonannya.

1.3. Bahwa adanya petitum Permohonan yang tidak didukung dengan posita telah mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. PERTENTANGAN/KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM PERMOHONAN

2.1. Bahwa posita dalam Permohonan halaman 10 butir 3 berbunyi sebagai berikut:

> "Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua*)*
2	**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK**	5.851.001 (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu satu)

3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, MT. & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	14.391.428 (empa belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan)
	TOTAL SUARA TIDAK SAH	1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)

Sedangkan petitum dalam Permohonan halaman 31-32 butir 4 berbunyi sebagai berikut:

> "Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, MT. & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)

2.2. Bahwa telah secara jelas terdapat pertentangan antara posita dengan petitum Permohonan, di mana:

- posita pada halaman 10 butir 3 Permohonan menyebutkan bahwa berdasarkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pihak Terkait seharusnya hanya memperoleh

5.851.001 (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu satu) suara; sedangkan

- dalam petitum pada halaman 31-32 butir 4 Permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara untuk Pihak Terkait sebanyak **0 suara.**

2.3. Bahwa dengan dihilangkannya perolehan suara Pihak Terkait dalam petitum menjadi 0 suara, dimana sebelumnya didalilkan berbeda oleh Pemohon sendiri pada bagian posita, hal ini menunjukkan sikap keragu-raguan dan ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun Permohonan, sekaligus juga menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami dan tidak yakin terhadap dalil-dalil Permohonannya sendiri.

2.4. Bahwa adanya pertentangan antara posita dan petitum Permohonan telah mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. PERTENTANGAN/KONTRADIKSI ANTARA PETITUM YANG SATU DENGAN PETITUM YANG LAIN DI DALAM PERMOHONAN

a. Bahwa selain adanya pertentangan antara posita dengan petitum, faktanya antara petitum yang satu dengan petitum yang lain di dalam Permohonan *a quo* juga mengandung pertentangan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada petitum butir 4 dan butir 5 yang dikutip sebagai berikut:

Petitum Permohonan butir 4:

"Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si** **&** **H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, MT.** **&** **ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)

Petitum Permohonan butir 5:

"Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si & H. Lukmanul Khakim, M.Si dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, SIP., M.Kes dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak."

b. Bahwa kedua petitum tersebut di atas mengandung pertentangan di mana di satu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara dalam Pilgub Jatim 2024 yang benar menurut Pemohon, tetapi di sisi yang lain Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan PSU tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait. Hal ini tentunya menunjukkan sikap keragu-raguan dan ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun Permohonan, sekaligus Pemohon juga tidak memahami dan tidak yakin terhadap dalil-dalil Permohonannya sendiri.

c. Bahwa adanya pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain telah mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN TENTANG BAGAIMANA "PENURUNAN SUARA PEMOHON" TERJADI/DILAKUKAN DAN SIAPA SUBJEK YANG MELAKUKAN

a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan halaman 11 butir 4 huruf a dan halaman 14 butir 6 Permohonan mendalilkan pada pokoknya bahwa "*perolehan suara Pemohon yang hanya berjumlah antara 0-30 suara di 3.900 TPS di Kab/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso, merupakan indikasi dari terjadinya* ***pengurangan suara Pemohon*** *hingga terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 837.361 suara*", akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana tuduhan tentang "penurunan suara Pemohon" tersebut terjadi/dilakukan.

b. Bahwa selain tidak jelas dan terang perbuatan apa yang dilakukan sehingga terjadi penurunan suara, Permohonan Pemohon juga gagal dalam menjelaskan hingga menegaskan seluruh peristiwa yang didalilkan tersebut, apakah dilakukan oleh subjek hukum atau beberapa subjek hukum, atau bahkan secara bersama-sama entah itu oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

c. Bahwa penjelasan siapa subjek hukum yang melakukan, akan memudahkan untuk menilai apakah dalil Pemohon merupakan fakta hukum yang memiliki *causa verband* atau hanyalah untaian cerita yang dikait-kaitkan untuk dipaksakan menjadi peristiwa yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

d. Bahwa oleh karena tidak jelas dan terang tentang bagaimana sebenarnya tuduhan mengenai adanya penurunan suara Pemohon tersebut terjadi/dilakukan dan siapa subjek hukum yang melakukan, telah mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan diajukannya eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas, sejatinya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus dengan menyatakan bahwa Mahkamah

tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait harus diputus di akhir persidangan bersama dengan pokok perkara, maka Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa secara keseluruhan, pada prinsipnya pelaksanaan Pilgub Jatim 2024 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis serta memenuhi asas pemilihan umum yang luber jurdil, serta dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden-insiden politik yang berarti.
3. Bahwa Pihak Terkait sebagai salah satu Paslon Peserta Pilgub Jatim 2024 telah mengikuti dengan baik semua peraturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pilkada Jawa Timur, dan telah mengikuti semua tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, termasuk tidak pernah dinyatakan telah melakukan perbuatan curang oleh badan yang berwenang (Bawaslu), apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
4. Bahwa Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yang mencalonkan diri kembali sebagai Paslon Peserta Pilgub Jatim 2024 telah mengikuti dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi petahana, terlebih lagi faktanya Pihak Terkait telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2024, jauh sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada pada tanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang secara langsung ataupun tidak langsung diarahkan dan ditujukan kepada Pihak Terkait, maka Pihak Terkait dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. PERIHAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON

1. Bahwa di dalam Permohonan halaman 11 butir 4 huruf a, yang kemudian diulangi kembali pada halaman 14 butir 6 Permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa "*perolehan suara Pemohon yang hanya berjumlah antara 0-30 suara di 3.900 TPS di Kab/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso, merupakan indikasi dari terjadinya pengurangan suara Pemohon hingga terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 837.361 suara* ".
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil tersebut di atas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*), karena Pemohon sama sekali **tidak menguraikan secara detil, jelas, dan spesifik** terkait subjek hukum, *tempus delicti, locus delicti,* dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara tersebut dilakukan. Akan tetapi Pemohon sekonyong-konyong justru langsung menyimpulkan tanpa dasar yang jelas bahwa perolehan suara Pemohon yang hanya berkisar antara 0-30 suara di sejumlah TPS merupakan indikasi terjadinya pengurangan terhadap suara Pemohon.
3. Bahwa minimnya perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS **bukanlah bukti** telah terjadi manipulasi berupa pengurangan suara oleh pihak-pihak tertentu, melainkan dapat dianggap sebagai faktor sosial yang terjadi secara natural dikarenakan adanya kondisi atau situasi tertentu berdasarkan karakteristik daerah pemilihan masing-masing. Sehingga hal tersebut tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai anomali yang terindikasi adanya kecurangan atau pelanggaran.
4. Bahwa terlebih lagi, hal tersebut bukan hanya dialami oleh Pemohon saja, akan tetapi dialami juga oleh Pihak Terkait. Meskipun Pihak Terkait merupakan Paslon yang memperoleh suara tertinggi dalam Pilgub Jatim 2024, akan tetapi faktanya ada sebanyak 66 (enam puluh enam) TPS di Kabupaten/Kota Tuban, Jombang, dan Sumenep, dengan perolehan suara yang hanya berkisar antara 0-30 suara untuk Pihak Terkait (*vide* **Bukti PT-5.1 s/d Bukti PT-5.66**).

5. Bahwa seandainya pun benar perolehan suara Pemohon yang hanya berkisar antara 0-30 tersebut merupakan akibat dari adanya pengurangan suara -*quod non*-, maka haruslah dapat dibuktikan berapa sesungguhnya jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon sebelum terjadi pengurangan. Sebagai perumpamaan, menurut Pemohon seharusnya ada 1.000 (seribu) suara sah yang diperoleh Pemohon dari 10 (sepuluh) TPS yang ada di suatu wilayah, akan tetapi karena terjadi pengurangan, baik yang dilakukan dengan cara diubah atau lain sebagainya dengan tujuan mengurangi perolehan suara yang sesungguhnya, maka suara Pemohon dari 10 (sepuluh) TPS tersebut menjadi 600 (enam ratus) suara saja, artinya ada pengurangan sebanyak 400 (empat ratus) suara milik Pemohon. Akan tetapi, nyatanya hal ini tidak pernah dijelaskan sama sekali oleh Pemohon di dalam Permohonannya, sehingga mengakibatkan dalil-dalil tuduhan tentang terjadinya pengurangan suara Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak terbukti kebenarannya. Terlebih lagi, seandainya pun benar telah terjadi pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon -*quod non*-, Pemohon tidak melapor ke Panwascam, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi perihal dalil yang diuraikannya. Sehingga dalil ini hanya asumsi yang tidak mempunyai dasar karena tidak ada kejadian-kejadian khusus yang dilaporkan oleh Pemohon, baik saat perhitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di PPK, maupun rekapitulasi di Kabupaten/Kota. (vide **Bukti PT-20.1 s/d Bukti PT-20.32**).
6. Bahwa lebih lanjut, seandainya pun benar telah terjadi pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon -*quod non*-, maka harus juga dapat dibuktikan bahwa hal tersebut **memiliki signifikasi** terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pilgub Jatim 2024, sehingga unsur-unsur dalam tuduhan mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dapat terpenuhi. Dengan demikian, oleh karena hal ini tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwasanya dalil-dalil tuduhan tentang adanya manipulasi berupa pengurangan suara Pemohon merupakan dalil yang mengada-ngada dan hanya opini yang bersifat asumtif dari Pemohon.

B. PERIHAL TOTAL SUARA TIDAK SAH

1. Bahwa selanjutnya, di dalam Permohonan halaman 11-12 butir 4 huruf b-c, yang kemudian diulangi kembali pada halaman 14-15 butir 7 huruf a-c, halaman 28 butir 11, dan halaman 28-29 butir 13 s/d 15 Permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa "*terdapat total suara tidak sah sejumlah 1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh) suara yang memiliki kecenderungan terkait penurunan suara Pemohon dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan dengan Pemohon*".
2. Bahwa Pihak Terkait berpandangan dalam konteks ini sebetulnya dalil Pemohon yang tidak didukung pada bukti-bukti yang valid sebagaimana diuraikan dalam positanya tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara total suara tidak sah dengan penurunan suara Pemohon, maupun terhadap tingginya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Sehingga tidak beralasan hukum apabila Pemohon mendalilkan adanya anomali perolehan suara tidak sah, lantas kemudian dibebankan kepada Pihak Terkait agar suara sahnya dikurangi. Namun demikian, secara sederhana Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:
   - Tidak ditemukan adanya berita acara mengenai permasalahan suara tidak sah yang merugikan pihak Pemohon;
   - Saksi mandat dari Pemohon telah melakukan tanda tangan di mayoritas Formulir C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur maupun D.Hasil-Kecamatan-KWK-Gubernur;
   - Tidak ditemukan adanya laporan kepada Bawaslu perihal adanya anomali suara tidak sah, tetapi hal ini justru baru dipersoalkan kemudian oleh Pemohon setelah melihat hasil *quick count* yang mengalahkannya;
   - Lagi pula, total suara tidak sah sebanyak 1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh), walaupun ditambahkan ke suara Pemohon, jelas juga tidak signifikan merubah perolehan suara akhir, dan juga tidak mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.

C. PERIHAL STABILITAS PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DENGAN MANIPULASI SIREKAP

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan secara singkat pada bagian Pendahuluan di atas, salah satu dalil tidak berdasar yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah tuduhan mengenai adanya manipulasi yang dilakukan terhadap Sirekap untuk tujuan menciptakan stabilitas persentasi perolehan suara bagi Pihak Terkait.
2. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan halaman 12-13 butir 1 huruf a, yang kemudian diulangi kembali pada halaman 13 butir 2 dan halaman 26 butir 4 Permohonan, menyatakan bahwa "*tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi yang berlangsung pada 27 November 2024 mulai pukul 15.00 WIB menunjukkan pola yang tidak wajar, dimana persentase suara Paslon 02 sebesar 58,54% dari awal hingga akhir rekapitulasi, bahkan ketika data masuk lebih dari 87,58% (28 November 2024 pukul 10.00 WIB), tidak ada fluktuasi persentase data yang masuk*"; padahal, faktanya meskipun KPU mengunggah hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 di situs resminya, namun KPU tidak menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara, melainkan hanya menunjukkan bukti dokumen C hasil (*vide* **Bukti PT-6**). Oleh karena itu, sudah cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon yang dilandaskan pada dalil-dalil tidak berdasar tersebut.
3. Bahwa namun demikian, terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana **Bukti P-1** hingga **Bukti P-189**, Pihak Terkait telah melakukan inzage serta mempelajari bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, khususnya mengenai adanya data *record* yang menunjukkan terdapat data yang tersimpan dalam *website* Sirekap sebelum proses pemungutan suara dihentikan pada pukul 13.00 WIB; terhadap hal ini Pihak Terkait berpandangan bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut mengubah/mempengaruhi perolehan suara final, maka sekalipun ada peristiwa tersebut *-quad non-* maka tidak dapat digunakan sebagai dalil adanya perselisihan hasil suara.

4. Bahwa atas adanya dalil Pemohon tersebut berdasarkan pandangan Ahli Statistik Alfian Futuhul Hadi yang Pihak Terkait jadikan sebagai Affidavit (*vide* Bukti PT-23) dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:

   a. **PERTAMA.** Tudingan **STABILITAS** suara itu jelas **TIDAK** benar, karena angka yang ditunjukkan adalah persentase dari sebanyak 60.751 TPS atau sekitar 31.280.418 suara. Satu persen berararti 6075 TPS atau sekitar 3.128.041 (tiga juta lebih); 0.1% artinya 607 TPS atau sekitar 312.804 (tiga ratus ribu lebih) suara; 0.01% artinya sekitar 60-61 TPS atau sekitar 31.280 (tiga puluh satu ribu lebih) suara; 0.01% artnya sekitar 6-7 TPS atau sekitar 3128 (tiga ribu lebih) suara; 0.001% artnya sekitar 1 TPS atau sekitar 3128 (tiga ribu lebih) suara; Artnya, jika dihitung secara rata-rata dari total suara yang 31 jura lebih, maka fluktuasi persentase paslon yang berkisar antara 58.29% sampai dengan 58.72% atau berkisar 0.43% adalah sekitar 134.506 suara. **Faktanya perolehan suara Paslon 02 berfluktuasi, tetapi karena yang tampil adalah persentase maka fluktuasi menjadi tidak tampak**. Fluktuasi persentase justru dapat dilihat pada saat rekapitulasi suara awal yang persen suara masuknya sangat rendah. **Klaim stabilitas tidak dapat dilakukan pada persentase suara masuk yang di atas 10% mengingat 10% ini berarti sudah 3 juta suara lebih**.

   b. **KEDUA.** Fakta dua rilis Quick Count tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil Quick Count dengan persentase suara masuk yang jauh lebih kecil diperkirakan dapat menunjukkan fluktuasi ini. Pada pukul 15.05 WIB **Bisnis.com** merilis hasil Quick Count oleh Poltracking Indonesia dari sekitar 0,36% TPS dari total TPS, atau sekitar 218 TPS saja dan melaporkan memperoleh 60,3% suara bagi paslon 02. Litbang Kompas merilis Quick Count dari 0,52% TPS dari total TPS, atau sekitar 315 TPS dan Paslon 02 memperoleh 58,42%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat fluktuasi, hanya saja tidak mungkin tampak dari rekam per 30 menit oleh sebab begitu banyaknya TPS dan suara masuk dalam rekap 30 menit itu. **Sekagi lagi tudingan STABILITAS suara itu jelas TIDAK dapat dibenarkan. STABILITAS seolah tampak dalam persentase adalah hal WAJAR, tidak menunjukan ANOMALI apapun.**

   c. **KETIGA.** Merujuk pada penjelasan sistem entry data dari Sirekap TPS langsung ke SIREKAP, secara (1) yang online dan (2) real-time, juga melihat grafik rekapitulasi suara yang ditunjukkan Pemohon menunjukkan (3) kecepatan rekapitulasi suara, **menunjukkan bahwa TIDAK ada INDIKASI terjadi tuduhan manipulasi mengatur entry saat rekapitulasi berlangsung pada hari H**. **Sedangkan terpenuhinya prinsip keacakan pada proses entry data pada SIREKAP dan bersejalan dengan gugurnya tuduhan kesengajaan manipulasi sistematik. Maka reportase SIREKAP per 30 menit tersebut justru mengukuhkan bahwa validitas rekapitulasi perolehan suara Paslon dan tidak terbantahkan secara Statistika**.

5. Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (*vide* **Bukti PT-7**), Sirekap adalah "*perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu*".
6. Bahwa oleh karenanya, Pihak Terkait berpandangan dalam hal ini Sirekap hanyalah merupakan salah satu bentuk dari sarana transparansi untuk memberi ruang kepada masyarakat dalam mengawal jalannya pergerakan penghitungan suara, bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil Pilkada yang dilakukan oleh Termohon.
7. Bahwa dalam konteks keabsahan atau penetapan hasil Pilkada oleh Termohon, Pihak Terkait selaku salah satu kontestan memahami mekanismenya adalah melalui penghitungan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, yang semua prosesnya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

   Bahwa dengan demikian, seandainya pun benar terdapat anomali penghitungan suara yang disebabkan karena terjadinya manipulasi terhadap Sirekap dengan tujuan untuk menstabilkan suara Pihak Terkait -*quod non*- , namun oleh karena Sirekap hanya alat bantu dan tidak bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka dugaan kecurangan yang dilakukan melalui Sirekap tidak beralasan hukum. Terlebih lagi Pemohon sendiri tidak bisa menjelaskan di dalam Permohonannya mengenai bagaimana cara manipulasi terhadap Sirekap itu terjadi dan korelasinya yang secara signifikan berdampak terhadap perolehan suara dari Pilgub Jatim 2024 yang sebenarnya ditetapkan dengan dasar penghitungan suara secara berjenjang.

D. PERIHAL DUGAAN PELANGGARAN APARAT YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PRESIDEN JOKOWI

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran aparat yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada Pihak Terkait (*vide* Permohonan halaman 13 huruf b), hal tersebut sangatlah tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan apalagi dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa atas adanya dalil TSM dari Pemohon, berdasarkan pandangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang Pihak Terkait jadikan sebagai Affidavit (*vide* **Bukti PT-21**) dapat diberikan tanggapan sebagai berikut: *"pelanggaran tersebut memang memiliki sifat yang terstruktur, sistematis dan massif dalam artian ada korelasi yang nyata antara pelaku kecurangan, jabatan administrasi yang ia pegang, pelaksanaan oleh elit (pejabat lebih rendah), pelaksana lapangan, pemilih, yang kemudian berdampak pada program pemerintah atau kewenangan yang disimpangi serta memiliki pengaruh pada hasil pemilihan. Pembuktian TSM yang* ***bersifat terang dengan bukti yang nyata*** *dan* ***tidak asumtif****".*
3. Bahwa sebagaimana diketahui, mantan Presiden bukanlah aparat negara yang turut aktif berperan dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Sehingga, Pihak Terkait beranggapan kejadian tersebut merupakan sikap spontanitas yang dilakukan oleh individu warga negara yang memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan apresiasi dan ucapan selamat kepada salah satu pasangan calon dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah.

E. PERIHAL TUDUHAN MANIPULASI TERHADAP FORMULIR C.HASIL-KWK-GUBERNUR

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 13 butir 3 dan halaman 25-26 butir 2 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan: "*terjadi manipulasi terhadap Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS dengan cara: 1) menggunakan tip ex untuk menghapus perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pemohon sehingga menjadi 0 sementara suara Pihak Terkait tetap signifikan, 2) pencoretan hasil suara Pemohon, dan 3) pengiriman dokumen C.Hasil-*

KWK-Gubernur ganda (versi awal dan versi susulan)", Pihak Terkait akan menanggapinya sebagai berikut:

2. Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak jelas (*obscuur*), karena Pemohon sama sekali **tidak menguraikan secara detil, jelas, dan spesifik** terkait subjek hukum, *tempus delicti, locus delicti,* dan dengan cara apa dugaan manipulasi terhadap dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur tersebut dilakukan. Demikian juga dalil Pemohon ini tidak benar dan cenderung mengandung fitnah, karena seandainya pun benar dapat dibuktikan tentang adanya penggunaan tip ex dan pencoretan hasil suara -*quod non*-, maka tidak dapat serta merta dikatakan sebagai tindakan manipulasi, karena faktanya pengoreksian pada formulir tersebut dimungkinkan untuk dilakukan dan bukanlah suatu larangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("***KKPU 1774/2024***") (*vide* **Bukti PT-8**), khususnya pada Bab V tentang Penghitungan Suara, huruf B butir 1.a.8. Selain itu Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa dengan adanya penggunaan tip ex maka mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Lagi pula, seandainya pun benar terjadi manipulasi yang dilakukan dengan cara menggunakan tip ex -*quod non*-, maka harus dapat dibuktikan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan hal tersebut haruslah dilaporkan kepada Bawaslu. Namun, faktanya Pemohon tidak pernah membuat pengaduan yang terkait dengan adanya dugaan manipulasi tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam Permohonan juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur awal dan Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur susulan. Seandainya yang dimaksud dengan Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur susulan adalah terkait pelaksanaaan pemungutan suara susulan, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi manipulasi, melainkan memang terdapat Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur yang dikeluarkan setelah dilakukannya pemungutan suara susulan, dimana

hal demikian adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Alinea 4 Lampiran II KKPU 1774/2024 halaman 4, yang menjadi pedoman teknis jika terdapat pelaksaan pemungutan suara susulan.

4. Bahwa kembali perlu dipahami bersama, seandainya pun benar terjadi manipulasi yang dilakukan dengan cara mengirim dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur ganda -*quod non*-, maka harus dapat dibuktikan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih Terlebih lagi nyatanya Pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang mulai di TPS, saat rekapitulasi di PPK, rekapitulasi di Kabupaten/Kota dan rekapitulasi di Tingkat Provinsi; dan Pemohon juga tidak pernah membuat pengaduan adanya dugaan manipulasi tersebut kepada Bawaslu.

F. PERIHAL PENGGUNAAN DPT HAMPIR 90-100%

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya penggunaan DPT hampir 90-100% pada saat Pilgub Jatim 2024, menurut Pihak Terkait sama sekali tidak mendukung dan tidak membuktikan konstruksi Permohonan Pemohon. Pertama, tidak ada peraturan perundangan-undangan yang melarang tentang penggunaan DPT 90-100% dalam proses Pilkada. Kedua, hal tersebut justru merupakan bagian dari bukti keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Timur.
2. Bahwa Pilgub Jatim 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang demoktratis, jujur, dan adil. Bahkan Pilgub Jatim 2024 telah menorehkan catatan penting karena memiliki **tingkat partisipasi**

pemilih yang cukup baik, yaitu sebesar **70,06%** (tujuh puluh koma nol enam persen) dan angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pilgub Jatim pada tahun 2013 dan tahun 2018 (*vide* **Bukti PT-9**). Adanya penggunaan DPT hingga 100% bukan hanya dimungkinkan terjadi, tetapi juga justru menjadi salah satu sasaran utama yang dituju KPU dalam rangka terselenggaranya Pemilu yang mencapai seluruh pemilih, hal ini tercermin dari disediakannya surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi DPT tambahan. Sehingga singkatnya, bahkan dimungkinkan partisipasi pemilih di suatu TPS mencapai 102,5%.

3. Bahwa terlebih lagi, uraian Permohonan Pemohon tentang penggunaan DPT hampir 90-100% juga tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara yang didalilkan dalam Permohonan dengan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil. Di samping itu Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan tentang perbuatan mana yang terbukti sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berimplikasi/mengakibatkan adanya penggunaan DPT hampir 90-100% hingga membuat perolehan suara yang tinggi bagi Pihak Terkait. Padahal faktanya yang terjadi di lapangan justru pada TPS-TPS dengan penggunaan DPT hampir 90-100%, ditemukan fakta Pihak Terkait mengalami kekalahan dalam perolehan suaranya, sementara Pemohon memperoleh kemenangan (*vide* **Bukti PT-10.1 s/d PT-10.21**).
4. Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya tentang adanya penggunaan DPT 90-100% yang terdapat di 2.780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh) TPS yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota, akan tetapi lebih lanjut Pemohon hanya menguraikan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) TPS yang disebut secara khusus ada kejadian DPT yang 100% (*vide* Bukti P-8 s/d Bukti P-172). Faktanya, dari 83 (delapan puluh tiga) TPS yang dimaksud, tidak ditemukan adanya kecurangan dan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Pemohon, dan lagi pula dari 83 (delapan puluh tiga) TPS yang dipermasalahkan

penggunaan DPT hingga 100% ternyata tidak signifikan untuk mengubah perolehan suara sebagaimana hasil rekapitulasi Termohon, serta tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih.

5. Bahwa lebih lanjut, nyatanya Pemohon sendiri tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi suara dari Termohon yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur oleh para Saksi dari Pemohon di hampir seluruh TPS dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait tingginya penggunaan DPT tersebut. Seandainya pun benar terjadi manipulasi sehubungan dengan adanya penggunaan DPT hampir 90-100% -*quod non*-, maka hal tersebut haruslah dilaporkan kepada Bawaslu. Namun, faktanya Pemohon tidak pernah membuat pengaduan yang terkait dengan adanya dugaan manipulasi tersebut, akan tetapi kemudian secara tanpa dasar Pemohon justru mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya hanya terbatas pada sengketa hasil.

G. PERIHAL KETIDAKSESUAIAN ANTARA JUMLAH PEMILIH PILGUB DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PEMILIH PILBUP/PILWALI

1. Bahwa uraian Permohonan Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dibandingkan dengan Pilbup/Pilwali tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara yang didalilkan dalam Permohonan dengan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil.
2. Bahwa pada prinsipnya, terjadinya perbedaan jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbup/Pilwali bukanlan merupakan kejadian atau peristiwa hukum, melainkan peristiwa sosial yang dapat terjadi secara natural serta di luar kehendak pihak manapun, yang justru selaras dengan asas kebebasan untuk memilih atau tidak memilih dalam suatu pemilihan umum. Terlebih lagi, terjadinya peristiwa ini tidak diatur maupun tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, faktanya Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan atau bahkan membuktikan tentang suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif, yang berimplikasi atau mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pemilih antara Pilgub dengan Pilbup/Pilwali, dengan perolehan suara yang tinggi bagi Pihak Terkait.

3. Bahwa apabila dapat diuraikan secara singkat, rasio legis tentang adanya perbedaan antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbup/Pilwali, dimungkinkan terjadi apabila terdapat suatu kondisi dimana pemilih melakukan pemilihan kepala daerah di luar tempat kedudukan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga pemilih yang demikian hanya bisa memberikan suaranya dalam Pilgub tetapi tidak bisa memberikan suaranya dalam Pilbup/Pilwali. Terlebih lagi, terjadinya peristiwa ini tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, faktanya Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan atau bahkan membuktikan tentang suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang berimplikasi atau mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pemilih antara Pilgub dengan Pilbup/Pilwali, dengan perolehan suara yang tinggi bagi Pihak Terkait.
4. Bahwa kemudian nyatanya Pemohon sendiri tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi suara dari Termohon yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur oleh para Saksi dari Pemohon di hampir seluruh TPS dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait peristiwa ini.

H. PERIHAL PENGALIHAN SUARA DARI FORMULIR C.HASIL-KWK-GUBERNUR KE FORMULIR D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR

1. Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya juga mendalilkan adanya pengalihan suara dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur ke Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur (*vide* Permohonan halaman 15 huruf d dan halaman 26 butir 3). Akan tetapi, Pemohon tidak secara jelas menguraikan dimana tempat pengalihan suara tersebut terjadi, serta berapa nilai suara milik Pemohon yang dialihkan dan dianggap menguntungkan Pihak Terkait. Sehingga, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dan sudah sepatutnya Pihak Terkait tidak perlu memberikan tanggapan lebih dalam.

2. Bahwa meskipun demikian, perlu kiranya Pihak Terkait sampaikan, jumlah TPS di Jawa Timur ada sebanyak 60.751 (enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu) dengan jumlah PPK sebanyak 666 (enam ratus enam puluh enam), ternyata tidak ada laporan serta keberatan dari Pemohon tentang adanya pengalihan suara milik Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 (*in casu* Pemohon) ke perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pihak Terkait), seharusnya pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Pemohon (melalui saksinya) seharusnya keberatan langsung, jika memang terjadi pengalihan suara ke Pihak Terkait, dan seketika itu juga meminta penghitungan yang benar atau penghitungan ulang.
3. Bahwa lebih lanjut, apabila peristiwa pengalihan suara tersebut benar terjadi -*quod non-,* Pihak Terkait berpandangan dalil tersebut tidak lagi relevan untuk dipersoalkan karena mekanisme penyelesaian permasalahan yang didalilkan Pemohon seharusnya sudah dilakukan pada tingkat PPK, yang selanjutnya dikuatkan pula dengan mekanisme rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan di tingkat Provinsi. Sebagaimana hal ini dapat terlihat dalam kanal YouTube KPU Jawa Timur dengan judul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara & Penetapan Hasil Pilgub Jatim 2024, 9 Desember 2024 (https://www.youtube.com/watch?v=7gu8LzxdWrw) (*vide* **Bukti PT-11**).

I. PERIHAL PENYALURAN BANSOS PKH

1. Bahwa dalam hal ini, Pihak Terkait berpandangan bahwasanya Bansos PKH di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak ada relevansinya dengan proses Pilgub Jatim 2024 maupun terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menyebutkan pihak atau lembaga mana yang bertanggungjawab dalam penyaluran Bansos PKH tersebut. Jika Pemohon mempersoalkan penyaluran Bansos PKH, maka seharusnya dari awal melakukan protes kepada pihak atau lembaga yang bertanggungjawab dalam penyaluran Bansos PKH.
2. Bahwa apabila kemudian penyaluran Bansos PKH dikaitkan dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalil

Pemohon dalam Permohonannya, Pihak Terkait berpandangan dalil tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Bansos PKH sebagaimana dimaksud dalam konteks undang-undang. Lagipula, apabila Pemohon dalam Pemohonannya mempermasalahkan Pj. Gubernur Adhy Karyono yang tetap menyalurkan Bansos, hal tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan melalui pernyataan resminya, Pj. Gubernur Adhy Karyono telah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap untuk menahan lebih dulu penyaluran Bansos kepada masyarakat untuk menghindari kepentingan politik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ, tanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial (*vide* **Bukti PT-12**), sebagaimana dapat dilihat dalam pemberitaan di media digital yang diakses melalui laman https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/pemprov-jatim-tunggu-surat-mendagri-soal-penyaluran-bansos-dihentikan-selama-pilkada/ (*vide* **Bukti PT-13**). Langkah tersebut juga telah sejalan dengan sikap dari pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada tertanggal 13 November 2024 pada laman https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/mensos-penyaluran-bansos-ditunda-supaya-tidak-jadi-alat-politik/ (*vide* **Bukti PT-14**)

3. Bahwa lagi pula perlu kiranya untuk mendapatkan perhatian, pada prinsipnya Bansos merupakan program dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerial Sosial, yang memiliki *time schedule* yang telah dirancang dengan matang. Pelaksanaan Bansos pun dilakukan oleh instrumen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial tanpa melibatkan Pemerintah Daerah. Hal mana sesuai Artikel pada detik.com tanggal 8 Mei 2024 *"Risma Perbarui Mekanisme Pengusulan Data Penerima Bansos Jadi Sebulan Sekali" (vide* **Bukti PT-24***)* bahwa sesuai fakta hukumnya justru Menteri Sosial (*in casu* Calon Gubernur Paslon Nomor 3) yang menetapkan pengusulan data Bansos dilakukan setiap bulan dengan mekanisme data penerima yang diusulkan dalam hasil musyawarah desa atau langsung dari Kepala Desa dan tidak melibatkan Camat atau Gubenur. Dengan demikian tidak dapat

dibantah bahwa Gubernur (termasuk PJ Gubernur) tidak pernah dilibatkan oleh Kemensos. Sehingga Bansos tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 apalagi sampai ditunggangi untuk pemenangan salah satu Paslon tertentu.

Bahwa sekalipun tuduhan adanya keterkaitan antara Bansos dengan pemilihan suara, maka dengan menggunakan logika tuduhan yang didalilkan Pemohon, seharusnya pihak yang dapat menggunakan Bansos untuk mempengaruhi pemilihan suara adalah Menteri Sosial pada saat ditetapkannya warga Provinsi Jawa Timur sebagai penerima Bansos, yang dalam hal ini Pemohon merupakan Menteri Sosial periode 23 Desember 2020 sampai dengan 6 September 2024.

4. Bahwa seandainya pun benar masih terjadi penyaluran Bansos di Provinsi Jawa Timur setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud -*quod non*-, maka tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti pelanggaran Pemilu, karena sifat dari surat edaran hanyalah sebatas himbauan saja. Terlebih lagi, Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menyebutkan kapan, dimana serta siapa yang melakukan kegiatan tersebut, serta korelasinya terhadap perolehan suara terhadap masing-masing Paslon dalam Pilgub Jatim 2024.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyinggung mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU/PRES-XXII/2024 di dalam Permohonan halaman 30 butir 22, hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini Pihak Terkait berpandangan bahwa pertimbangan Mahkamah di dalam putusan tersebut yang berkaitan dengan dampak penyaluran Bansos, bukan merupakan *ratio decidendi* atau alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun secara regulasi sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, juga tidak ada aturan yang melarang terkait penyaluran Bansos pada saat Pilkada.
6. Bahwa selanjutnya, asumsi-asumsi Pemohon yang mengkaitkan antara Pihak Terkait dengan koalisi besar pemerintahan, merupakan dalil yang dilebih-lebihkan dan dipaksakan agar terlihat seolah-olah

Pihak Terkait mendapatkan keuntungan dari penyaluran Bansos PKH kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

7. Bahwa lebih lanjut, Pihak Terkait berpandangan dalam konteks ini sebetulnya dalil Pemohon yang tidak didukung pada bukti-bukti yang valid sebagaimana diuraikan dalam positanya tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran Bansos dengan pilihan pemilih, maupun terhadap peningkatan perolehan suara salah satu Paslon yang dalam hal ini Pihak Terkait selaku Paslon Nomor Urut 2. Hal ini sebetulnya secara sederhana dapat dibuktikan dengan unggulnya suara Pemohon di beberapa daerah, antara lain di Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya yang juga merupakan tempat penyaluran Bansos PKH dari Kementerian Sosial (*vide* **Bukti PT-15**). Sehingga, dalil ini seharusnya dikesampingkan dikarenakan merupakan asumsi yang tidak dapat diukur secara konkrit dampaknya serta tidak terdapat *direct evidence* terhadap perolehan suara salah satu Paslon. Mengingat pula pada dasarnya Bansos adalah program pemerintah yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak sosial masyarakat, bukan merupakan program individu warga negara.
8. Bahwa yang terpenting untuk ditekankan dalam hal ini adalah setelah Pihak Terkait memperdalam fakta-fakta di lapangan, Bansos PKH tersebut penyalurannya dilakukan melalui Kantor Pos. Sehingga tidak terdapat ruang interaksi antara pihak yang menyalurkan dengan pihak yang menerima. Dengan tidak adanya interaksi secara langsung antara pihak yang meyalurkan dan pihak yang menerima, tentunya telah menghilangkan seluruh dugaan-dugaan mengenai penyalahgunaan Bansos yang diperuntukkan untuk menguntungkan salah satu Paslon tertentu. Dari berbagai hasil survei yang dilakukan sebelum pemungutan suara Pilgub Jatim 2024 dilaksanakan, diperoleh fakta tentang tingginya elektabilitas Pihak Terkait dengan berbagai parameter pengujian yang menunjukkan kecenderungan mayoritas masyarakat dalam menentukan calon kepada daerahnya (*vide* **Bukti PT-16.1 s/d Bukti PT-16.3**), sehingga dalam hal ini terbukti bahwa tidak ada pengaruh antara penyaluran Bansos di Pronvinsi Jawa Timur

dengan kemenangan Pihak Terkait. Sementara sebaliknya, Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jawa Timur dalam rilis berita tanggal 17 Desember 2024 justru mengungkapkan fakta tentang adanya *money politic* yang masif dari Pemohon di sejumlah wilayah di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya (*vide* **Bukti PT-17**).

9. Bahwa kemudian, Pihak Terkait juga telah melakukan *inzage* terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon mengenai dugaan penyaluran Bansos yang dianggap oleh Pemohon melanggar aturan. Pada prinsipnya, ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki relevansinya dengan posita yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi tidak diuraikan dalam posita, Pihak Terkait berpandangan bahwasanya Pemohon bermaksud untuk menghilangkan hak Pihak Terkait dalam memberikan bantahan atau sanggahan secara tepat, adil dan berimbang. Selain daripada itu, hal ini tidak selaras dengan prinsip umum hukum acara persidangan. Sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi mengeyampingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon.
10. Bahwa namun demikian, terhadap Bukti P-175.2 berupa video dan foto yang diajukan oleh Pemohon yang dinarasikan bahwa Bapak Emil Elistianto Dardak seolah-olah membagikan sembako kepada masyarakat, adalah narasi yang **sangat menyesatkan** dan **tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya**. Dalam konteks tersebut, Bapak Emil Elistianto Dardak sedang melakukan kegiatan/jadwal kampanye pada tanggal 17 November 2024 yang notabene dihadiri juga oleh para pengawas pemilu dan dipastikan tidak ada pembagian/penyaluran Bansos (*vide* **Bukti PT-18**). Terlebih lagi, kegiatan kampanye tersebut telah dilaksanakan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk telah diberitahukan pada Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 16 November 2024 (*vide* **Bukti PT-19**). Kemudian bukti video yang diajukan oleh Pemohon juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan acara tanggal 17 November 2024 yang dihadiri Bapak Emil Elistianto Dardak.

11. Bahwa selanjutnya, dalil pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 6.341.164 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh empat) suara yang disampaikan Pemohon pada bagian sub bab E halaman 28 Permohonan, adalah sangat tidak berdasar, dan tidak ada rujukannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana mungkin Pemohon dengan sesukanya menentukan cara dan metode pengurangan suara kepada Pihak Terkait, hanya dengan berdasarkan asumsi-asumsi, serta narasi kejadian yang ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

J. PERIHAL PERMINTAAN DISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT DAN PSU TANPA MENGIKUTSERTAKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara spesifik dan meyakinkan mengenai adanya perbuatan dari Pihak Terkait yang dianggap melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024. Sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar apabila kemudian Pemohon di dalam petitum Permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU.
2. Bahwa selanjutnya, fakta tersebut di atas dikuatkan pula dengan fakta tidak adanya keputusan dari Termohon untuk membatalkan pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka petitum Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifkasi dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 sangat tidak berasalan hukum sehingga patut untuk ditolak.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan menyeluruh oleh Pihak Terkait mengenai bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam hal ini Pihak Terkait berpandangan pada prinsipnya uraian posita dalam Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanyalah opini yang bersifat asumstif dikarenakan tanpa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, agar memudahkan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memahami tanggapan dari Pihak

Terkait terhadap Permohonan dari Pemohon, maka secara ringkas dan sederhana dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai kinerja Bawaslu dalam penyelenggaran Pilgub Jatim 2024. Selain itu Pemohon juga tidak menempuh mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dianggap merugikan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam positanya. Atas fakta-fakta hukum tersebut, Pihak Terkait berpandangan Bawaslu telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara responsif, obyektif, dan proposional.

   Dengan demikian, oleh karena fungsi pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu telah dijalankan secara optimal, maka tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih dan memeriksa segala permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya.
3. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan Termohon dikarenakan adanya selisih suara yang cukup jauh, yaitu sebesar 5.449.070 (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh) suara. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) Huruf d UU Pilkada yang mensyaratkan bahwasanya Permohonan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara hanya dapat diajukan apabila terdapat selisih suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

   Dengan demikian, oleh karena uraian posita Pemohon mengenai dugaan anomali perolehan suara dan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dianggap merugikan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang berkolerasi, maka hal tersebut tidak dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap 12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima) suara yang diperoleh Pihak Terkait.
4. Bahwa uraian dalam posita Permohonan mengenai penyaluran Bansos PKH di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dipermasalahkan oleh Pemohon -*quod non*-, sama sekali tidak menyebutkan adanya keterlibatan dari Pihak Terkait yang dianggap menyalahgunakan penyaluran Bansos tersebut. Terlebih

Bansos juga merupakan kebijakan yang tidak dilarang dan bersifat membantu warga yang karena keadaan tertentu telah menerima kualifikasi sebagai penerima Bansos tanpa adanya campur tangan Termohon apalagi Pihak Terkait, oleh karenanya mengaitkan Bansos dengan kontestasi pemilihan kepala daerah sama saja dengan memanfaatkan hak warga yang menerima Bansos sebagai alat tuduhan untuk mempengaruhi suara warga Jawa Timur untuk memilih Paslon tertentu.

Dengan demikian, dalil mengenai penyaluran Bansos yang dianggap oleh Pemohon mempengaruhi perolehan suara dan menguntungkan Pihak Terkait, sangat tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada korelasinya dengan perolehan suara salah satu Paslon tertentu.

5. Bahwa Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara spesifik dan meyakinkan mengenai adanya perbuatan dari Pihak Terkait yang dianggap melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024.

   Dengan demikian, dikuatkan pula dengan fakta tidak adanya keputusan dari Termohon untuk membatalkan pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka petitum Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifkasi dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 sangat tidak berasalan hukum sehingga patut untuk ditolak.

6. Bahwa secara garis besar, mengenai adanya anomali perubahan suara sejak tingkat TPS secara berjenjang dalam proses penyelenggaran Pilkada sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya, Pihak Terkait dengan tegas berpandangan sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut tidak relevan untuk diperiksa pada proses persidangan sengketa hasil Pilkada. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan terkait penyelenggaran Pilkada dan mengenai tata cara pelaksaanaan, peserta Pilkada sebenarnya juga telah diberikan ruang untuk menempatkan saksi disetiap TPS, yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan setiap waktu apabila terdapat suatu peristiwa atau kejadian khusus yang dianggap tidak wajar dan dianggap merugikan Pemohon. Terlebih lagi, terdapat Panitia Pengawas secara berjenjang guna mengawal jalannya penyelenggaran pemilu.

Dengan demikian, apabila kemudian kesempatan tersebut tidak digunakan Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya kepada penyelenggara Pemilu dan Bawaslu, maka sudah seharusnya Pemohon tidak dapat membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa faktor terpenting yang perlu dijadikan catatan oleh Mahkamah adalah mengenai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal ini, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* dengan memeriksa dan meneliti kesulurahan bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan kesimpulan bahwasannya Pihak Terkait berpandangan bukti-bukti tersebut pada prinsipnya tidak memiliki kualitas pembuktian dan diragukan prosedur keabsahan perolehannya. Hal ini didasarkan pada fakta mayoritas bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa *cetak* dari foto formulir penghitungan suara. Padahal, untuk menjamin kredibilitas bukti yang diajukan, sudah seharusnya Pemohon yang diberikan beban pembuktian dapat menyajikan bukti-bukti yang selaras dengan dalil-dalil posita serta dapat dipertanggungjawabkan.

   Dengan demikian, oleh karena bukti-bukti Pemohon dalam perkara ini tidak selaras dengan dalil Permohonannya, serta tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang mempunyai kualitas pembuktian sempurna, sudah seharusnya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dapat ditunjukkan aslinya.

8. Bahwa sebagai bentuk upaya Pihak Terkait untuk memperkuat dalil-dalil Keterangannya terhadap Permohonan dari Pemohon, dalam hal ini Pihak Terkait mengajukan Affidavit Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli di Bidang Statistik yang antara lain akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi;
   b. Tentang esensi perselisihan hasil dan perselisihan proses pemilihan umum;
   c. Tentang tinjauan statistik terhadap penyaluran Bansos.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si** **&** **H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2	**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** **&** **EMIL ELESTIANTO DARDAK**	12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, MT.** **&** **ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	20.732.592 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua)
	TOTAL SUARA TIDAK SAH	1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
4.	Bukti PT-4	:	Cetak Statistik Indonesia – *Statistical Yearbook of* Indonesia 2024, volume 52, 2024, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan dapat diakses melalui laman https://www.bps.go.id/en/publication/2024/02/28/c1bacde 0325634 c1bacde03256343b2bf769b0/statistical-yearbook-of-indonesia-2024.html;
5.	Bukti PT-5.1	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Situbondo, Kecamatan Kapongan, Kelurahan/Desa Seletreng, TPS 901 ;
6.	Bukti PT-5.2	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Situbondo, Kecamatan Panji, Kelurahan/Desa Mimbaan, TPS 903;
7.	Bukti PT-5.3	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Kangayan, Kelurahan/Desa Timur Jang-Jang, TPS 003;
8.	Bukti PT-5.4	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Sapeken, Kelurahan/Desa Sabuntan, TPS 008;
9.	Bukti PT-5.5	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Ambunten, Kelurahan/Desa Tambaagung Tengah, TPS 001;
10.	Bukti PT-5.6	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Sapeken, Kelurahan/Desa Saur Saebus, TPS 007;

11.	Bukti PT-5.7	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Ambuten, Kelurahan/Desa Tambaagung Tengah, TPS 002;
12.	Bukti PT-5.8	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Ambuten, Kelurahan/Desa Tambaagung Tengah, TPS 004;
13.	Bukti PT-5.9	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Ra'as, Kelurahan/Desa Brakas, TPS 004;
14.	Bukti PT-5.10	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Sapeken, Kelurahan/Desa Saur Saebus, TPS 008;
15.	Bukti PT-5.11	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sumenep, Kecamatan Sapeken, Kelurahan/Desa Saur Saebus, TPS 009;
16.	Bukti PT-5.12	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Jombang, Kecamatan Mojoagung, Kelurahan/Desa Tanggalrejo, TPS 901;
17.	Bukti PT-5.13	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Jember, Kecamatan Semboro, Kelurahan/Desa Rejoagung, TPS 005;
18.	Bukti PT-5.14	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Ngawi, Kecamatan Paron, Kelurahan/Desa Semen, TPS 007;
19.	Bukti PT-5.15	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro, Kelurahan/Desa Kalipuro, TPS 024;
20.	Bukti PT-5.16	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Banyuwangi, Kecamatan Glenmore, Kelurahan/Desa Karangharjo, TPS 010;
21.	Bukti PT-5.17	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Trenggalek, Kecamatan Gandusari, Kelurahan/Desa Jajar, TPS 005;
22.	Bukti PT-5.18	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Trenggalek, Kecamatan Panggul, Kelurahan/Desa Ngrencak, TPS 007;
23.	Bukti PT-5.19	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Tuban, Kecamatan Bangilan, Kelurahan/Desa Kedungmulyo, TPS 006;
24.	Bukti PT-5.20	:	Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan/Desa Gading Kasri, TPS 009;

25. Bukti PT-5.21 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Kedungdung, Kelurahan/Desa Daleman, TPS 003;
26. Bukti PT-5.22 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Tambelangan, Kelurahan/Desa Banjarbillah, TPS 004;
27. Bukti PT-5.23 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Tambelangan, Kelurahan/Desa Banjarbillah, TPS 006;
28. Bukti PT-5.24 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Kedungdung, Kelurahan/Desa Batoporo Timur, TPS 011;
29. Bukti PT-5.25 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Omben, Kelurahan/Desa Tambak, TPS 013;
30. Bukti PT-5.26 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Camplong, Kelurahan/Desa Dharma Camplong, TPS 009;
31. Bukti PT-5.27 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Sokobanah, Kelurahan/Desa Tobai Tengah, TPS 002;
32. Bukti PT-5.28 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Omben, Kelurahan/Desa Pandan, TPS 007;
33. Bukti PT-5.29 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Kedungdung, Kelurahan/Desa Batoporo Timur, TPS 006;
34. Bukti PT-5.30 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Omben, Kelurahan/Desa Tambak, TPS 013;
35. Bukti PT-5.31 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Omben, Kelurahan/Desa Tambak, TPS 008;
36. Bukti PT-5.32 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Tambelangan, Kelurahan/Desa Banjarbillah, TPS 001;
37. Bukti PT-5.33 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Camplong, Kelurahan/Desa Batukarang, TPS 003;
38. Bukti PT-5.34 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sampang, Kecamatan Banyuates, Kelurahan/Desa Asemjaran, TPS 003;

39. Bukti PT-5.35 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan/Desa Tambaksari, TPS 003;
40. Bukti PT-5.36 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan/Desa Kedung Baruk, TPS 022;
41. Bukti PT-5.37 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan/Desa Keputran, TPS 021;
42. Bukti PT-5.38 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan/Desa Dr. Soetomo, TPS 018;
43. Bukti PT-5.39 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan/Desa Lontar, TPS 033;
44. Bukti PT-5.40 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan/Desa Lontar, TPS 031;
45. Bukti PT-5.41 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan/Desa Kutisari, TPS 024;
46. Bukti PT-5.42 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan/Desa Kapasan, TPS 007;
47. Bukti PT-5.43 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan/Desa Babatan, TPS 037;
48. Bukti PT-5.44 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan/Desa Jajar Tunggal, TPS 014;
49. Bukti PT-5.45 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan/Desa Simokerto, TPS 021;
50. Bukti PT-5.46 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan/Desa Sonokwijenan, TPS 008;
51. Bukti PT-5.47 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan/Desa Sonokwijenan, TPS 009;
52. Bukti PT-5.48 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan/Desa Tanjungsari, TPS 002;

53. Bukti PT-5.49 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis , Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, TPS 018;
54. Bukti PT-5.50 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan/Desa Dukuh Sutorejo, TPS 021;
55. Bukti PT-5.51 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan/Desa Dukuh Sutorejo, TPS 001;
56. Bukti PT-5.52 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan/Desa Dukuh Sutorejo, TPS 005;
57. Bukti PT-5.53 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Bubutan, Kelurahan/Desa Alun-Alun Contong, TPS 003;
58. Bukti PT-5.54 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Bubutan, Kelurahan/Desa Alun-Alun Contong, TPS 004;
59. Bukti PT-5.55 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, TPS 011;
60. Bukti PT-5.56 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan/Desa Wiyung, TPS 002;
61. Bukti PT-5.57 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan/Desa Kapasan, TPS 020;
62. Bukti PT-5.58 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan/Desa Dukuh Setro, TPS 030;
63. Bukti PT-5.59 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, TPS 017;
64. Bukti PT-5.60 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Krembangan, Kelurahan/Desa Krembangan Selatan, TPS 009;
65. Bukti PT-5.61 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan/Desa Sumber Rejo, TPS 017;
66. Bukti PT-5.62 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, TPS 012;

67. Bukti PT-5.63 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan/Desa Kalisari, TPS 017;
68. Bukti PT-5.64 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan/Desa Gading, TPS 013;
69. Bukti PT-5.65 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan/Desa Manyar Sabrangan, TPS 018;
70. Bukti PT-5.66 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan/Desa Tambaksari, TPS 018;
71. Bukti PT-6 : Cetak berita online yang diakses melalui laman https://news. detik.com/pilkada/d-7660844/kpu-tak-tampilkan-grafik-perolehan-suara-pilkada-2024-real-count-di-sirekap;
72. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
73. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
74. Bukti PT-9 : Cetak berita online yang diakses melalui laman https://jatim.times.co.id/news/berita/aOyKdvQNC/Tingkat-Partisipasi-Pemilih-Pilgub-Jatim-2024-Capai-7006-Persen;
75. Bukti PT-10.1 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Kediri, Kecamatan Ngasem, Kelurahan/Desa Gogorante, TPS 008;
76. Bukti PT-10.2 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Jambangan, Kelurahan/Desa Jambangan, TPS 901;
77. Bukti PT-10.3 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Surabaya, Kecamatan Semampir, Kelurahan/Desa Pegirian, TPS 034;
78. Bukti PT-10.4 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan/Desa Bluru Kidul, TPS 007;

79. Bukti PT-10.5 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan/Desa Bluru Kidul, TPS 023;
80. Bukti PT-10.6 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan/Desa Rangkahkidul, TPS 006;
81. Bukti PT-10.7 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Kelurahan/Desa Keboananom, TPS 003;
82. Bukti PT-10.8 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, Kelurahan/Desa Kalisampurno, TPS 008;
83. Bukti PT-10.9 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Kelurahan/Desa Sedati Gede, TPS 008;
84. Bukti PT-10.10 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan/Desa Sidokare, TPS 003;
85. Bukti PT-10.11 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan/Desa Sekardangan, TPS 002;
86. Bukti PT-10.12 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kelurahan/Desa Plakpak, TPS 007;
87. Bukti PT-10.13 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kelurahan/Desa Banyupelle, TPS 005;
88. Bukti PT-10.14 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Pamekasan, Kecamatan Pasean, Kelurahan/Desa Batokerbuy, TPS 013;
89. Bukti PT-10.15 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kelurahan/Desa Tanjung, TPS 009;
90. Bukti PT-10.16 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kelurahan/Desa Tanjung, TPS 006;
91. Bukti PT-10.17 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Magetan, Kecamatan Bendo, Kelurahan/Desa Kinandang, TPS 002;
92. Bukti PT-10.18 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Magetan, Kecamatan Bendo, Kelurahan/Desa Kinandang, TPS 003;

93. Bukti PT-10.19 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Bondowoso, Kecamatan Pujer, Kelurahan/Desa Mengok, TPS 001;
94. Bukti PT-10.20 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Bondowoso, Kecamatan Pujer, Kelurahan/Desa Mengok, TPS 002;
95. Bukti PT-10.21 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Kabupaten/Kota Bondowoso, Kecamatan Sempul, Kelurahan/Desa Kalisat, TPS 003;
96. Bukti PT-11 : *Flashdisk* berisi Video Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara & Penetapan Hasil Pilgub Jatim 2024, yang dilaksanakan pada hari Senin, 9 Desember 2024, yang diakses melalui laman https://www.youtube.com/watch?v=7gu8LzxdWrw;
97. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ, tanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;
98. Bukti PT-13 : *Cetak* berita online yang diakses melalui laman https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/pemprov-jatim-tunggu-surat-mendagri-soal-penyaluran-bansos-dihentikan-selama-pilkada/;
99. Bukti PT-14 : Cetak berita *online* yang diakses melalui laman https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/mensos-penyaluran-bansos-ditunda-supaya-tidak-jadi-alat-politik/;
100. Bukti PT-15.1 : Fotokopi Model D.HASIL-KABKO-KWK-GUBERNUR Kota Mojokerto;
101. Bukti PT-15.2 : Fotokopi Model D.HASIL-KABKO-KWK-GUBERNUR Kota Surabaya;
102. Bukti PT-16.1 : Cetak berita *online* yang diakses melalui laman https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/15/073000865/hasil-survei-litbang-kompas-pilkada-jatim-2024-khofifah-emil-525-persen?page=all;
103. Bukti PT-16.2 : Cetak berita *online* yang diakses melalui laman https://www.antaranews.com/ infografik/4474241/hasil-survei-pilgub-jawa-timur;
104. Bukti PT-16.3 : Cetak berita *online* yang diakses melalui laman https://poltracking.com/rilis-temuan survei-tatap-muka-jawa-timur-poltracking-indonesia-siapa-pemenang-pilkada-jawa-timur/;
105. Bukti PT-17 : Cetak berita *online* yang diakses melalui laman https://hariansurabaya.com/2024/12/17/ gus-yusuf-

bongkar-fakta-money-politics-massif-risma-gus-hans-di-sejumlah-wilayah-di-jatim-khususnya-kota-surabaya/;

106. Bukti PT-18 : Cetak berita *online* yang diakses melalui laman https://www.detik.com/jatim pilkada/d-7643339/hadiri-isitgasah-di-mojokerto-emil-ungkap-keberhasilan-jawa-timur;
107. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTPK/184/XI/YAN.2.2/2024/DITINTELKAM, tanggal 17 November 2024;
108. Bukti PT-20.1 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di TPS 007, Dusun Laos, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
109. Bukti PT-20.2 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
110. Bukti PT-20.3 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Banyuwangi;
111. Bukti PT-20.4 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
112. Bukti PT-20.5 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
113. Bukti PT-20.6 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di TPS 007, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
114. Bukti PT-20.7 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kota Blitar;
115. Bukti PT-20.8 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Lamongan;
116. Bukti PT-20.9 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di TPS 006, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
117. Bukti PT-20.10 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
118. Bukti PT-20.11 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
119. Bukti PT-20.12 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Sampang;
120. Bukti PT-20.13 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
121. Bukti PT-20.14 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Sidoarjo;
122. Bukti PT-20.15 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

123. Bukti PT-20.16 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
124. Bukti PT-20.17 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kota Malang;
125. Bukti PT-20.18 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kota Surabaya;
126. Bukti PT-20.19 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Pacitan;
127. Bukti PT-20.20 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Nganjuk;
128. Bukti PT-20.21 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Malang;
129. Bukti PT-20.22 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Bangkalan;
130. Bukti PT-20.23 : *Affidavit* Bapak Wahyudi, Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Jember;
131. Bukti PT-20.24 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Madiun;
132. Bukti PT-20.25 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Sumenep;
133. Bukti PT-20.26 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Probolinggo;
134. Bukti PT-20.27 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Gresik;
135. Bukti PT-20.28 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Jember;
136. Bukti PT-20.29 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Magetan;
137. Bukti PT-20.30 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Tulungagung;
138. Bukti PT-20.31 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Tuban;
139. Bukti PT-20.32 : *Affidavit* Saksi Mandat Pasangan Calon 02 Khofifah-Emil di Kabupaten Situbondo;
140. Bukti PT-21 : *Affidavit* Ahli Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.;
141. Bukti PT-22 : *Affidavit* Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM;
142. Bukti PT-23 : *Affidavit* Ahli Statistik Alfian Futuhul Hadi;
143. Bukti PT-24 : Cetak berita online yang diakses melalui laman https://news.detik.com/berita/ d-7330754/risma-perbarui-mekanisme-pengusulan-data-penerima-bansos-jadi-sebulan-sekali;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Dari setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Provinsi Jawa Timur (angka 1 halaman 8, Angka 2 Halaman 9, Angka 3 Halaman 10) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan saudara Felix B. Benny C berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 07/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 11.34 WIB dengan register nomor 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Bubutan. **[Vide Bukti PK – 16.1]** Bawaslu Kota Surabaya meneruskan rekomendasi nomor 736/PP.00.02/K.JI-38/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK – 16.2]** Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut secara langsung pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

2. Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan saudara Rudianto berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12.03 WIB dengan register nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Gubeng **[Vide Bukti PK – 16.4]** Bawaslu Kota Surabaya meneruskan rekomendasi nomor 737/PP.00.02/K.JI-38/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK – 16.5]** Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut secara langsung pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**
3. Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan saudara Langen Seputro Amir berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12.36 WIB dengan register nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Krembangan. **[Vide Bukti PK – 16.6]** Bawaslu Kota Surabaya meneruskan Rekomendasi Nomor 738/PP.00.02/K.JI-38/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK – 16.7]** Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut secara langsung pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur bertempat di DoubleTree by Hilton Surabaya, Jl. Tunjungan No.12, Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275 pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2024.

   1.1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 menyampaikan saran perbaikan secara lisan agar pembacaan hasil perolehan suara Kota Surabaya oleh KPU Kota Surabaya ditunda pembacaan perolehan suaranya, untuk dilakukan pencermatan terlebih dahulu terhadap laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Surabaya, dikarenakan terdapat laporan pada Bawaslu Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.3]**

   1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya :

1.2.1. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan secara lisan dan tertulis Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.

1.2.2. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan secara lisan dan tertulis Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 2 pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.

1.2.3. Terdapat keberatan yang disampaikan secara lisan dan tertulis Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 3 pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.

Perolehan suara berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur yang diterima Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : **[Vide Bukti PK – 16.3.1]**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si. & H. Lukmanul Khakim, M.Si.	1.797.332
2.	Khofifah Indar Parawansa & Emil Elestianto Dardak	12.192.165
3.	Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. & Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, SIP., M.Kes.	6.743.095
Total Suara Sah		20.732.592
Suara Tidak Sah		1.204.610

Tabel 1. Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Provinsi Jawa Timur

2. Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Felix B. Benny C Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 11.34 WIB dengan register nomor 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Bubutan. **[Vide Bukti PK – 16.1]**

   2.1. Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal nomor 07/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan material laporan, dan direkomendasikan untuk di registrasi serta dilakukan pencermatan dan penyandingan data hasil laporan yang diajukan oleh Pelapor dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan jajaran Bawaslu Kota Surabaya Pada Kecamatan Bubutan. **[Vide Bukti PK – 16.8]**

   2.2. Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pencermatan sejumlah 123 TPS untuk Kecamatan Bubutan yang telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Surabaya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Bubutan, antara lain :

   - Kelurahan Tembok Dukuh 34 TPS
   - Kelurahan Jepara 28 TPS
   - Kelurahan Gundi 34 TPS
   - Kelurahan Bubutan 18 TPS
   - Kelurahan Alun-Alun Contong 9 TPS

   Proses klarifikasi tersebut dilakukan dengan cara pencermatan data dan dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang

dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan data dan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.9]**

2.3. Bawaslu Kota Surabaya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran adminitrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi. Adapun hasil klarifikasi melalui pencermatan data dan dokumen pada Kecamatan Bubutan adalah sebagai berikut :

2.3.1. Pasangan Calon 1 semula 927 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR menjadi 927 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

2.3.2. Pasangan Calon 2 semula 16737 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR menjadi 9703 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

2.3.3. Pasangan Calon 3 semula 20848 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR menjadi 27906 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

[Vide Bukti PK – 16.10]

2.4. Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Surabaya nomor 736/PP.00.02/K.JI-38/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran adminitrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi. **[Vide Bukti PK – 16.2]**

2.5. Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut secara langsung pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3.1]**

2.6. Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan, diberitahukan status laporan nomor laporan 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, status laporan ditindaklanjuti, dengan direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.11]**

3. Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan saudara Rudianto berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12.03 WIB dengan register nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Gubeng. **[Vide Bukti PK – 16.4]**

3.1. Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal nomor 08/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan material laporan, direkomendasikan untuk di registrasi serta dilakukan pencermatan dan penyandingan data hasil laporan yang diajukan oleh Pelapor dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan jajaran Bawaslu Kota Surabaya pada Kecamatan Gubeng. **[Vide Bukti PK – 16.12]**

3.2. Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pencermatan sejumlah 123 TPS untuk Kecamatan Gubeng yang telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Surabaya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Gubeng, antara lain:

- Kelurahan Airlangga 14 TPS
- Kelurahan Baratajaya 19 TPS
- Kelurahan Gubeng 19 TPS
- Kelurahan Kertajaya 22 TPS
- Kelurahan Mojo 32 TPS
- Pucang Sewu 17 TPS

Proses klarifikasi tersebut dilakukan dengan cara pencermatan data dan dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan data dan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.13]**

3.3. Bawaslu Kota Surabaya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran adminitrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi. Adapun hasil klarifikasi melalui pencermatan data dan dokumen pada Kecamatan Gubeng adalah sebagai berikut :

3.3.1. Pasangan Calon 1 semula 1521 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR seharusnya menjadi 1529 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

3.3.2. Pasangan Calon 2 semula 20373 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR seharusnya menjadi 13234 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

3.3.3. Pasangan Calon 3 semula 34407 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR seharusnya menjadi 41544 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR.

[Vide Bukti PK – 16.14]

3.4. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Surabaya nomor 737/PP.00.02/K.JI-38/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran adminitrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi. **[Vide Bukti PK – 16.5]**

3.5. Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut secara langsung pada proses Tahapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3.1]**

3.6. Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan, diberitahukan status laporan nomor laporan 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, status laporan ditindaklanjuti, dengan direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.15]**

4. Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan saudara Langen Seputro Amir berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12.36 WIB dengan register nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Krembangan. **[Vide Bukti PK – 16.6]**

4.1. Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal nomor 09/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan material laporan, dan direkomendasikan untuk di registrasi serta dilakukan pencermatan dan penyandingan data hasil laporan yang diajukan oleh Pelapor dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan jajaran Bawaslu Kota Surabaya pada Kecamatan Krembangan. **[Vide Bukti PK – 16.16]**

4.2. Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pencermatan sejumlah 145 TPS untuk Kecamatan Krembangan yang telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Surabaya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Krembangan, antara lain :

- Krembangan Selatan 19 TPS
- Morokrembangan 58 TPS
- Dupak 28 TPS
- Perak Barat 18 TPS

- Kemayoran 22 TPS

Proses klarifikasi tersebut dilakukan dengan cara pencermatan data dan dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan data dan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.17]**

4.3. Bawaslu Kota Surabaya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran adminitrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi. Adapun hasil klarifikasi melalui pencermatan data dan dokumen pada Kecamatan Krembangan adalah sebagai berikut :

4.3.1. Pasangan Calon 1 semula 1141 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR seharusnya menjadi 1141 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

4.3.2. Pasangan Calon 2 semula 18208 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR seharusnya menjadi 11123 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

4.3.3. Pasangan Calon 3 semula 24128 pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR seharusnya menjadi 31213 sebagaimana MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

[Vide Bukti PK – 16.18]

4.4. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Surabaya nomor 738/PP.00.02/K.JI-38/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran adminitrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi, **[Vide Bukti PK – 16.7]**

4.5. Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti

Rekomendasi tersebut secara langsung pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3.1]**

4.6. Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan, diberitahukan status laporan nomor laporan 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, status laporan ditindaklanjuti, dengan direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya. **[Vide Bukti PK – 16.19]**

5. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan nomor 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, laporan nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, dan laporan nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, terdapat perubahan perolehan suara pada semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Surabaya antara lain:

5.1. Pasangan Calon 1 pada MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR semula 34.071 yang berdasarkan Proses klarifikasi tersebut dilakukan dengan cara pencermatan data dan dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan data dan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya menjadi 34.079;

5.2. Pasangan Calon 2 pada MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR semula 329.551 yang berdasarkan Proses klarifikasi tersebut dilakukan dengan cara pencermatan data dan dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan data dan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya menjadi 308.293;

5.3. Pasangan Calon 3 pada MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR semula 861.134 yang berdasarkan Proses klarifikasi tersebut dilakukan dengan cara pencermatan data dan dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan data dan

dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Surabaya menjadi 882.414. **[Vide Bukti PK – 16.3.1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Penggunaan TipEx untuk menghapus perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara Paslon 02 tetap signifikan; Pencoretan hasil suara Paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak mencerminkan hasil sebenarnya; Pengiriman dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur ganda, yakni C.Hasil-KWK-Gubernur versi awal dan C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan, dengan perbedaan hasil suara yang mengindikasikan adanya upaya mengubah hasil pilkada (Angka 3 Halaman 13, Angka 2 Halaman 25, dan huruf C angka 3 halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor: 722/PM.01.01/K.JI/11/2024, tanggal 26 November 2024, perihal imbauan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024. Imbauan tersebut dilaksanakan juga oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024. **[Vide Bukti PK – 16.20]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan penggunaan TipEx untuk menghapus perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara Paslon 02 tetap signifikan; Pencoretan hasil suara Paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak mencerminkan hasil sebenarnya; Pengiriman dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur ganda, yakni C.Hasil-KWK-Gubernur versi awal dan C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan, dengan perbedaan hasil suara yang mengindikasikan adanya upaya mengubah hasil pilkada. **[Vide Bukti PK – 16.21]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya :
   3.1. Bahwa saksi pasangan calon 01 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 36 (Tiga Puluh Enam) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya;
   3.2. Bahwa saksi pasangan calon 02 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 38 (Tiga Puluh Delapan)

Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya;

3.3. Bahwa saksi pasangan calon 03 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, pada proses penyerahan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR oleh 38 (tiga puluh delapan) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa Timur setelah selesai pelaksanaan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota. Proses penyerahan tersebut dengan pengamanan dari Pihak Kepolisian dan Pengawasan Bawaslu, hal mana Proses penyerahan tingkat di bawah mutatis mutandis dengan pengamanan dari Pihak Kepolisian dan Pengawasan Bawaslu. **[Vide Bukti PK – 16.22]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan Penggunaan TipEx untuk menghapus perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara Paslon 02 tetap signifikan; Pencoretan hasil suara Paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak mencerminkan hasil sebenarnya. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Ketidaksesuaian Jumlah Pemilih Pilgub Dibandingkan Pilbup/Pilwali dimana terdapat 179 TPS yang menghasilkan suara untuk Paslon 02 sebesar 28.986 suara, dengan indikasi: Jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari pada Pilbup/Pilwali, dengan selisih yang melebihi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Ketidakwajaran ini ditemukan di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri (Angka 6 Halaman 14, Angka 10 lampiran halaman 28 dan Huruf E angka (3) halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor : 309/PM.00.01/K.JI/06/2024, tanggal 12 Juni 2024, perihal imbauan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan pantarlih, tata kerja pantarlih, pemutakhiran dan penyusunan

daftar pemilih pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Imbauan tersebut dilaksanakan juga oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan pantarlih, tata kerja pantarlih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK – 16.23]**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan jumlah pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 khususnya di Provinsi Jawa Timur, pengawasan ini dilakukan mulai dari penyusunan Bahan Daftar Pemilih, Rapat Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Rapat Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, diantaranya :

   2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.01/15/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, bertempat di Hotel Morazen Surabaya, Jl. Kayoon No.4-10, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan beberapa hal catatan tentang Daftar Pemilih Sementara termasuk namun tidak terbatas pada hasil pembacaan oleh KPU Provinsi Jawa Timur perihal penyusunan Daftar Pemilih pada Kabupaten Bojonegoro, pada Kabupaten Sampang, dan pada Kota Batu, dan atas hasil rekapitulasi

DPS Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal tanggapan termasuk namun tidak terbatas pada :

2.3.1. Terdapat 3 kluster yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan adanya kesalahan prosedur yakni Bawaslu tidak mendapatkan salinan BNBA secara digital yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota, Bawaslu meminta kepada KPU Provinsi Jawa Timur agar memasukkan tanggapan masyarakat apabila terdapat ketidaksesuaian terkait pemutakhiran daftar Pemilih.

2.3.2. Terdapat 7 Pemilih yang sampai dengan saat ini belum di Coklit di Kabupaten Situbondo.

2.3.3. Penambahan TPS, Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti terkait adanya usulan penambahan TPS berdasarkan pertimbangan aspek geografis di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lamongan.

2.3.4. Adanya Pemilih tidak dikenal sejumlah 61.404 se-Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam daftar Pemilih sementara. Bawaslu akan menyampaikan *By Name By Address* terkait Pemilih tidak dikenal tersebut kepada KPU Provinsi Jawa Timur.

2.3.5. Serta, terdapat tanggapan dari DP3KA Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya mengantisipasi beberapa *case* yang mungkin sama pada saat Pemilu 2024 sehingga perlu duduk bersama antara KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan DPT kedepannya, masih adanya data pemilih ganda, penjelasan mengenai WNI dan WNA termasuk namun tidak terbatas kedudukannya dalam Daftar Pemilih serta status pada Kartu Keluarga, dan masih adanya pemilih ganda.

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.01/23/09/2024, tentang Rapat Pleno Tahapan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa

Timur bertempat di Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya, Jl. Bintoro No.21 - 25, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60264 pada tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota pada rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT, disampaikan saran perbaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa Timur sebagai berikut

2.2.1. KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan 6 KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kota Surabaya, KPU Sampang, KPU Jember, KPU Sumenep, KPU Kota Batu dan KPU Lumajang untuk memperbaiki kesalahan penulisan BA dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota pada Penetapan DPT:

2.2.2. KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mengakomodir hak pilih 2 Pemilih yang sebelumnya MS kemudian di TMSkan pada saat rapat pleno penetapan DPT, KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan KPU Ponorogo untuk menghapus atau menandai data Pemilih tidak dikenali atau tidak diketahui keberadaannya yang istilahnya ghost vooter dikarenakan berpotensi datanya disalahgunakan, KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan 3 KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi lebih lanjut kepada yang berwenang untuk mendapatkan bukti dokumen autentik dan menandai Pemilih TMS di data Sidalih;

2.2.3. KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan 5 KPU kabupaten/Kota yaitu KPU Bondowoso, KPU Kota Batu, KPU Kota Malang, KPU Kota Pasuruan dan KPU Kota Probolinggo menuliskan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam berita acara rekapitulasi DPT;

2.2.4. KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan KPU Kabupaten Lamongan untuk melakukan kajian mendalam dan turun langsung ke seluruh lokasi yang diusulkan penambahan TPS oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan serta menyampaikan hasilnya kepada KPU Provinsi dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan

2.2.5. Dalam rangka menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabel terkait daftar pemilih di lokasi khusus, dalam hal pengumuman DPT di TPS reguler, maka KPU juga mengumumkan DPT di lokasi khusus sesuai lokasi khusus TPS di lokasi khusus tersebut.

2.2.6. Berdasarkan atas saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur akan melakukan tindak lanjut terkait poin-poin saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang disertai dengan dokumen autentik atau bukti dukung atas saran perbaikan.

2.2.7. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terdapat lokasi khusus pada 35 Kabupaten/Kota, sedangkan 3 Kabupaten/Kota lainnya tidak terdapat lokasi khusus diantaranya Kabupaten Blitar, Kota Batu, dan Kabupaten Madiun. Hal mana jumlah Pemilih DPT pada Pemilihan Gubernur lebih besar dari pada jumlah Pemilih Bupati dan Walikota karena disebabkan adanya TPS Lokasi Khusus tersebut.

[Vide Bukti PK – 16.24]

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.01/15/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 bertempat di Hotel Morazen Surabaya, Jl. Kayoon No.4-10, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, pada tanggal 15 Agustus 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 438/PM.00.01/K.JI/08/2024, tanggal 15 Agustus 2024, perihal saran perbaikan, yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota pada rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, diantaranya terkait (1) perbaikan prosedur, (2)

terkait pemilih yang tidak dikenali atau tidak diketahui keberadaannya, dan (3) KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan kepada 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota (Situbondo dan Lamongan) untuk melakukan restrukturisasi atau penambahan TPS sesuai masukan Bawaslu dengan mempertimbangkan aksesibilitas pemilih terkait kondisi geografis yang sulit. Hal ini penting untuk menjamin kemudahan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. **[Vide Bukti PK – 16.25]**

2.3.1. Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 950/PL.02.1-SD/35/2024 tanggal 24 Agustus 2024, perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya menjawab masing-masing saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan (1) terkait perbaikan prosedur, (2) terkait pemilih yang tidak dikenali atau tidak diketahui keberadaannya, dan (3) KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan kepada 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota (Situbondo dan Lamongan) untuk melakukan restrukturisasi atau penambahan TPS sesuai masukan Bawaslu dengan mempertimbangkan aksesibilitas pemilih terkait kondisi geografis yang sulit. Hal ini penting untuk menjamin kemudahan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. **[Vide Bukti PK – 16.26]**

2.3.2. Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 587/PL.02.1-SD/35/2024 tanggal 31 Agustsu 2024, perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Timur menjawab dan/atau menjelaskan kembali masing-masing saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan (1) terkait perbaikan prosedur, (2) terkait pemilih yang tidak dikenali atau tidak diketahui keberadaannya, dan (3) KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan kepada 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota

(Situbondo dan Lamongan) untuk melakukan restrukturisasi atau penambahan TPS sesuai masukan Bawaslu dengan mempertimbangkan aksesibilitas pemilih terkait kondisi geografis yang sulit. Hal ini penting untuk menjamin kemudahan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. **[Vide Bukti PK – 16.27]**

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.01/23/09/2024, tentang Rapat Pleno Tahapan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur bertempat di Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya, Jl. Bintoro No.21 - 25, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60264 pada tanggal 23 September 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 428/PM.00.01/K.JI/09/2024, tanggal 23 September 2024, perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota pada rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT memberikan saran perbaikan diantaranya (1) Terkait Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme, (2) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan (3) Restrukturisasi TPS. **[Vide Bukti PK – 16.28]**

2.4.1. Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 950/PL.02.1-SD/35/2024 tanggal 3 Oktober 2024, perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya menjawab masing-masing saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan (1) Terkait Prosedur, tata cara, mekanisme, (2) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan (3) Restrukturisasi TPS. **[Vide Bukti PK – 16.29]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan pengguna hak pilih DPTb (Jumlah Pemilih Pemilihan Gubernur) lebih besar dari jumlah Pemilih Pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota (Presentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri) **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadi angka perolehan Paslon 03 sejumlah 69,407 bahwa seterusnya Paslon 02 sejumlah 906,768 dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara di 3.900 TPS yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan indikasi: a. Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan b. Bahkan ada yang tidak mendapatkan suara atau (0 suara). (Angka 6 Halaman 14, Angka 10 lampiran halaman 28 dan Huruf E angka (3) halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor : 722/PM.01.01/K.JI/11/2024, tanggal 26 November 2024, perihal imbauan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024.

Imbauan tersebut dilaksanakan juga oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024. **[Vide Bukti PK – 16.20]**

2. Bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan Rekapitulasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan 2024. **[Vide Bukti PK – 16.30]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan adanya penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadi angka perolehan Paslon 03 sejumlah 69,407 bahwa seterusnya Paslon 02 sejumlah 906,768 dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara di 3.900 TPS yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan indikasi: a. Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan b. Bahkan ada yang tidak mendapatkan suara atau (0 suara). **[Vide Bukti PK – 16.21]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya :
   4.1. Bahwa saksi pasangan calon 01 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 36 (Tiga Puluh Enam) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya;

4.2. Bahwa saksi pasangan calon 02 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya;

4.3. Bahwa saksi pasangan calon 03 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan bahkan mencapai 0 di 3.900 TPS (Presentase terbesar ada di Sumenep, Sampang dan Bondowoso). **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. Tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8%, Pasuruan 8,5%, Jombang 8,3%, dan Bojonegoro 7,7%. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota (Angka 7 Halaman 14 dan Huruf E angka 13 sampai dengan 15, Halaman 28 sampai dengan 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan Rekapitulasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan 2024. **[Vide Bukti PK – 16.30]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan adanya Terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8%, Pasuruan 8,5%, Jombang 8,3%, dan Bojonegoro 7,7%. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota. **[Vide Bukti PK – 16.21]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya :
   3.1. Bahwa saksi pasangan calon 01 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 36 (Tiga Puluh Enam) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung,

Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya;

3.2. Bahwa saksi pasangan calon 02 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya;

3.3. Bahwa saksi pasangan calon 03 menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur antara lain: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 pada proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud

adanya Terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8% persen, Pasuruan 8,5% persen, Jombang 8,3% persen dan Bojonegoro 7,7% persen. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]** Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Perolehan suara berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur yang diterima Bawaslu Provinsi Jawa Timur. **[Vide Bukti PK – 16.3.1]** berkenaan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur yang diterima Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

KABUPATEN /KOTA	PEMILIHAN GUBERNUR D. Hasil Provinsi [Vide Bukti PK.16 – 3] dan [Vide Bukti PK.16 – 3.1]			PEMILIHAN BUPATI D. Hasil Kabko [Vide Bukti PK.16 – 21]		
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	%	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	%
TUBAN	654.670	69.324	10,59%	654.458	23.954	3,66%
PASURUAN	907.254	72.499	7,99%	906.373	36.371	4,01%
JOMBANG	724.228	55.742	7,70%	722.581	33.603	4,65%
BOJONEGORO	805.959	58.296	7,23%	805.710	20.752	2,58%

Tabel 2. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur yang diterima Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan pada Pemilihan Bupati dan Wak

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan berkenaan dengan tabel tersebut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya prosentase terbesar terdapat di Kabupaten Tuban sejumlah 69.324 jumlah suara tidak sah dengan

presentase 10,59%, disusul oleh Kabupaten Pasuruan sejumlah 72.499 jumlah suara tidak sah dengan presentase 7,99%, Kabupaten Jombang sejumlah 55.742 jumlah suara tidak sah dengan presentase 7,70%, dan Kabupaten Bojonegoro sejumlah 58.296 jumlah suara tidak sah dengan presentase 7,23%.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Penggunaan DPT 90-100% di 36 Kabupaten/Kota dengan penyelenggaraan tidak sesuai ketentuan (Angka 4 Halaman 13 sampai dengan halaman 14, huruf B halaman 15 sampai dengan halaman 25, Angka 10 huruf a dan b, Lampiran Angka (1), angka 2 sampai dengan 5 Halaman 27). Pemohon menyebutkan Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Sampang Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Pamekasan

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 405/LHP/PM.01.02/JI.19/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.16 – 31]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Hotel PKPRI Pamekasan

dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK.16 – 32]**

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan

   2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 172/LHP/PM.01.02/JI.01/04/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.16 – 33]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bangkalan dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon tidak menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.34]**

3. Bawaslu Kabupaten Mojokerto

   3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 090/LHP/PM.01.02/JI.15/06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, **[Vide Bukti PK – 16.35]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Desember 2024 bertempat di Graha Wira Wibawa Mukti KPU Kabupaten Mojokerto

dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.36]**

4. Bawaslu Kabupaten Gresik

   4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 140/LHP/PM.01.02/JI-06/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.16 – 37]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2024 bertempat di Hotel Santika Gresik dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon tidak menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.38]**

5. Bawaslu Kabupaten Jember

   5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 020/LHP/PM.01.02/JI.07/05/XII/2024 tanggal 5 November 2024, **[Vide Bukti PK – 16.39]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Desember 2024 bertempat di Hotel Luminor Jember dengan dihadiri Saksi Pasangan

Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon tidak menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.40]**

6. Bawaslu Kabupaten Jombang

   6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jombang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 135/LHP/PM.01.02/JI.08/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, **[Vide Bukti PK – 16.41]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di Hotel Yusro Jombang dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.42]**

7. Bawaslu Kota Kediri

   7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kediri sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 190/LHP/PM.01.02/K.JI-32/3/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, **[Vide Bukti PK – 16.43]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di Hotel Lotus Garden dengan dihadiri Saksi Pasangan

Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.44]**

8. Bawaslu Kota Madiun

   8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Madiun sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 111/LHP/PM.01.02/ JI.33/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, **[Vide Bukti PK – 16.45]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Aston Hotel Madiun dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.46]**

9. Bawaslu Kota Malang

   9.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 201/LHP/PM.01.02/ JI.34/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, **[Vide Bukti PK – 16.47]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di Harris Hotel & Conventions Malang dengan dihadiri Saksi

Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon tidak menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.48]**

10. Bawaslu Kota Mojokerto

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 119/LHP/PM.01.02/JI.35/1/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, **[Vide Bukti PK – 16.49]** yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Desember 2024 bertempat di Ayola Hotel Sunrise Mall dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03 serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.50]**

11. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
434	279	434	279	434	279

Tabel 3. TPS 07, Desa Grogol, Kec Giri

11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.02.17.2006.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya telah dilakukan pembetulan MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada Jumlah Laki-laki 141 dan Perempuan 138, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 279 seharusnya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada Jumlah Laki-laki 222 dan Perempuan 212, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 434. tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.51]**

11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Giri sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 183/LHP/PM.01.02/JI.02.17/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 29 November 2024 bertempat di Aula Kecamatan Giri dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Giri telah menyampaikan pembetulan MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada TPS 07, Desa Grogol namun pada D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur yang telah dicetak data tidak berubah yang kemudian ditindaklanjuti dalam saran perbaikan nomor 139/PM/K.JI-02.07/11/2024 tanggal 30 November 2024 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.52]**

11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 105/LHP/PM.01.02/JI.02/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 bertempat di El Hotel Banyuwangi dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pembetulan secara langsung dalam forum melalui aplikasi SIREKAP dan selanjutnya dilakukan pencatatan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.53]**

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
270	270	482	270	482	270

Tabel 4. TPS 09, Desa Bajulmati, Kec Wongsorejo

11.4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon terdapat kesalahan penyebutan pada Kecamatan Wongsorejo yang seharusnya Kecamatan Wongsorejo tertulis Wongsorego;

11.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.02.18.2007.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.54]**

11.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 147/LHP/PM.01.02/JI.02.18/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan Wongsorejo dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya dilakukan pembetulan pada TPS 09, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi terkait Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap laki-laki 125 dan perempuan 145, Jumlah laki-laki dan Perempuan 270 seharusnya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap laki-laki 236 dan perempuan 246, Jumlah laki-laki dan Perempuan 482 yang secara langsung dilakukan pembetulan pada D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.55]**

12. Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
558	419	558	419	558	419

Tabel 5. TPS 07, Desa Pancoran, Kec Bondowoso

12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.11.2001.07/27/ XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya terdapat pembetulan C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Pengguna Hak Pilih serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.56]**

12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 085/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.11/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 bertempat di Kecamatan Bondowoso dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.57]**

13. Bawaslu Kabupaten Lamongan

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
533	379	533	379	533	379

Tabel 6. TPS 06, Desa Weru, Kec Paciran

13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.11.14.2015.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya terdapat pembetulan terkait Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah namun tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.58]**

13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 130/LHP/PM.01.02/ JI.11.14/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 bertempat di Pendopo

Kecamatan Paciran dengan dihadiri Saksi Pasangan 02 dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK - 16.59]**

14. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
487	466	487	466

Tabel 7. TPS 02, Desa Segodobancang, Kec Tarik

14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Segodo Bancang, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.24.01.2019.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.60]**

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
498	498	498	498	579	498

Tabel 8. TPS 04, Desa Pabean, Kec Sedati

14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.24.17.2012.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.61]**

14.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.24.17 /30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan Sedati dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sedati menyampaikan pembetulan pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-laki 245 dan Perempuan 253, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-laki dan Perempuan 498 seharusnya Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-laki 290 dan Perempuan 289, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-laki dan Perempuan 579. Pembetulan tersebut telah ditindaklanjuti langsung oleh PPK Kecamatan Sedati pada Aplikasi Sirekap namun tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-

100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.62]**

15. Bawaslu Kabupaten Sumenep

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
-	-	398	398

Tabel 9. TPS 03, Desa Buddi, Kec Arjasa

15.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Buddi, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2011.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon 02 dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.63]**

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
408	408	408	408

Tabel 10. TPS 07, Desa Angonangon, Kec Arjasa

15.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Angonangon, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 02/LHP/PM.01.02-Jl.26.24.2022.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan

DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.64]**

16. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
484	428	484	428	484	428

Tabel 11. TPS 01, Desa Mayangkawis, Kec Balen

16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Mayangkawis, Kecamatan balen, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.04.13.2002.1/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan dihadiri Saksi Pasangan 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya terdapat pembetulan pada C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki 251, Perempuan 233, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki dan Perempuan 484 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki 212, Perempuan 216, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki dan Perempuan 428, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.65]**

16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor

127/LHP/PM.01.02/JI.04. 13/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 bertempat di Kecamatan Balen dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 02 dan 03, yang pada pokoknya Pembetulan telah diselesaikan dan hasil cetak D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur telah sesuai serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur. **[Vide Bukti PK – 16.66]**

Form A TPS Foto Model C.Hasil-KWK-Gubernur		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur		Form A Rekap Kecamatan Foto Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur	
DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
444	370	444	370	444	370

Tabel 12. TPS 04, Desa Mojodeso, Kec Kapas

16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.04.14.2015.4/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan dihadiri Saksi Pasangan 02 dan 03, yang pada pokoknya terdapat pembetulan pada C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki 228, Perempuan 216, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Laki-Laki dan Perempuan 444, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil

permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.67]**

16.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 102/LHP/PM.01.02/ JI.04.14/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 bertempat di Kecamatan Kapas dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon 01, 02, dan 03, yang pada pokoknya Pembetulan telah diselesaikan dan hasil cetak D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur telah sesuai serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon tidak menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.68]**

17. Bawaslu Kabupaten Sampang

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	538	538	538	538
02	498	498	498	498
03	594	594	594	594
04	543	543	543	543
05	564	564	564	564
06	595	595	595	595

Tabel 13. Desa Batioh, Kec Banyuates

17.1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon terdapat kesalahan penyebutan pada Desa Batioh yang seharusnya Desa Batioh tertulis Batioha.

17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.69]**

17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.70]**

17.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi

Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.71]**

17.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK -16.72]**

17.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.73]**

17.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.74]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	597	597	597	597
02	600	600	600	600
03	599	599	599	599
04	600	600	600	600
05	596	596	596	596
06	600	600	600	600
07	421	421	-	-

Tabel 14. Desa Montor, Kec Banyuates

17.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta

saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.75]**

17.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.76]**

17.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.77]**

17.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.78]**

17.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.79]**

17.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.80]**

17.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.81]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	515	515	515	515
02	537	537	537	537
03	525	525	525	525
04	489	489	489	489
05	539	539	539	539
06	590	590	590	590

Tabel 15. Desa NEPA, Kec Banyuates

17.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.82]**

17.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor

004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.83]**

17.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.84]**

17.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01 dan 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.85]**

17.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23. 09.2015.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.86]**

17.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.87]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	519	519	519	519
02	583	583	583	583
03	551	551	551	551

Tabel 16. Desa Planggaran Timur, Kec Banyuates

17.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa PLANGGARAN TIMUR, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan

Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003.01/ 27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.88]**

17.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa PLANGGARAN TIMUR, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003.02 /27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.89]**

17.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa PLANGGARAN TIMUR, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003. 03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01 dan 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.90]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	552	552	552	552
02	450	450	450	450
03	544	544	544	544
04	591	591	591	591
05	569	569	569	569

Tabel 17. Desa Tebanah, Kec Banyuates

17.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.91]**

17.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.92]**

17.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.93]**

17.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.94]**

17.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor

004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.95]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	431	431	431	431
02	457	457	457	457
03	279	279	279	279

Tabel 18. Desa Trapang, Kec Banyuates

17.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2008.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.96]**

17.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2008.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01 dan 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.97]**

17.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2008.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.98]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	519	519	519	519
02	512	512	512	512
03	551	551	551	551
04	443	443	443	443
05	502	502	502	502
06	548	548	548	548
07	485	485	485	485

Tabel 19. Desa Bulmatet, Kec Karang Penang

17.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.99]**

17.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.100]**

17.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.101]**

17.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.102]**

17.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.103]**

17.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.104]**

17.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.105]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	597	597	597	597
02	573	573	573	573
03	521	521	521	521
04	593	592	593	592
05	600	599	600	599
06	585	585	585	585
07	594	594	532	532
08	598	598	598	598
09	575	575	575	575
10	554	554	554	554
11	516	516	516	516

Tabel 20. Desa Batoporo Timur, Kec Kedungdung

17.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.106]**

17.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.107]**

17.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.108]**

17.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampag sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.109]**

17.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon

yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.110]**

17.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.111]**

17.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.112]**

17.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.08/27/XI/2024 tanggal 27

November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.113]**

17.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.114]**

17.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.10/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.115]**

17.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 11, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan

Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.11/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.116]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	599	599	599	599
02	596	596	596	596
03	599	599	599	599
04	598	598	598	598
05	598	598	598	598
06	599	599	599	599
07	600	600	600	600

Tabel 21. Desa Bunten Timur, Kec Ketapang

17.50. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.01.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.117]**

17.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.02.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang

pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.118]**

17.52. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.03.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.119]**

17.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.04.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.120]**

17.54. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.05.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.121]**

17.55. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.06.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.122]**

17.56. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.07.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.123]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	546	546	546	546
02	530	530	530	530
03	530	530	530	530
04	514	514	514	514
05	528	528	528	528
06	527	527	527	527
07	515	515	515	515

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
08	494	494	494	494

Tabel 22. Desa Karanganyar, Kec Ketapang

17.57. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.01.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.124]**

17.58. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.02.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.125]**

17.59. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.03.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.126]**

17.60. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02 /JI.23.12.2005.04.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.127]**

17.61. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.05.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.128]**

17.62. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.06.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang

pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.129]**

17.63. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.07.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.130]**

17.64. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.08.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.131]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	593	593	593	593
02	572	572	572	572
03	581	581	581	581
04	456	456	456	456

Tabel 23. Desa Jranguan, Kec Omben

17.65. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.132]**

17.66. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.002/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.133]**

17.67. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.003/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.134]**

17.68. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.004/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.135]**

TPS	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS		Form A TPS Foto Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur	
	DPT	Penggunaan DPT	DPT	Penggunaan DPT
01	562	562	562	562
02	561	561	561	561
03	597	597	597	597
04	499	499	499	499
05	594	594	594	594
06	592	592	592	592

Tabel 24. Desa Sawah Tengah, Kec Robatal

17.69. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.136]**

17.70. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.137]**

17.71. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.138]**

17.72. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.139]**

17.73. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 02 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100%. **[Vide Bukti PK – 16.140]**

16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02, dan 03 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud adanya Penggunaan DPT 90-100% serta saksi pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **[Vide Bukti PK – 16.141]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Angka 7 Huruf e Halaman 15, Angka 6 dan 7 Halaman 26, Angka 8 dan 9 Halaman 27, Angka 12 Halaman 28, Angka 17 Halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat Imbauan kepada Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 179/PM.00.01/K.JI/04/2024, tanggal 3 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada hari Minggu, 22 September 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024. **[Vide Bukti PK – 16.142]**
2. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menerbitkan Surat Imbauan Netralitas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, melalui Surat

Ketua Bawaslu RI Nomor 897/PM.00/K1/06/2024, pada tanggal 11 Juni 2024, perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan dengan materi imbauan yang pada pokoknya berupa :

2.1. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

2.2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan

2.3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

[Vide Bukti PK – 16.143]

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Timur, bertempat di Hotel Majapahit Surabaya - MGallery Collection, Jl. Tunjungan No.65, Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275, tanggal 10 November 2024. Dengan tema Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa Dalam Pemilihan

Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Timur di Hotel Majapahit, sebagaimana link yotube : https://www.youtube.com/live/S75Q5R4fOWc?si=exJ7zCmxIW8RLwpW yang pada pokoknya mengundang :

- Wakil Menteri Dalam Negeri
- Bawaslu RI
- Bawaslu Jawa Timur
- Ketua DPRD Jawa Timur
- PJ Gubernur Jawa Timur
- Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya
- Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- Kepala Pengadilan Tinggi, dan
- Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Timur
- PJ/PJs. Bupati dan Walikota se-Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
- Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
- Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
- Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Setempat
- Perwakilan Camat se-Provinsi Jawa Timur
- Perwakilan Lurah/Paguyuban Kepala Desa se-Provinsi Jawa Timur
- Ketua Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur
- Ketua dan Koordinator Wilayah Paguyuban Kepala Desa Provinsi Jawa Timur

[Vide Bukti PK – 16.144]

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan adanya bantuan sosial program keluarga harapan. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran serius yang memenuhi kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis di tingkat TPS tetapi juga terindikasi melibatkan struktur penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota, hingga KPU Provinsi. Indikasi kuat ini menunjukkan adanya pengaturan hasil pemilu secara terencana yang mencederai integritas demokrasi (Huruf C Angka 1 Halaman 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta permohonan sengketa proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 215/PM.00.01/K.JI/04/2024, tanggal 30 April 2024, perihal Imbauan Rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada pokoknya dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1.1. Memperhatikan kepatuhan prosedur selama proses pembentukan PPK Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
    1.2. Tidak melakukan praktek KKN dalam proses pembentukan.

1.3. Memperhatikan calon PPK yang kemungkinan berasal dari pengurus atau anggota partai politik.

1.4. Memperhatikan jadwal dan waktu pembentukan sesuai aturan yang berlaku.

1.5. Memberikan akses sebagai *viewer* pendaftaran dan pendataan dalam Pembentukan Badan Adhoc KPU pada aplikasi SIAKBA kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.

Imbauan tersebut dilaksanakan juga oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai mekanisme, tata cara dan prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK – 16.145]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada pokoknya pengawasan mekanisme, tata cara dan prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terkait dengan proses penerimaan pendaftaran, seleksi tertulis, seleksi wawancara serta tanggapan dan masukan masyarakat terhadap pembentukan badan *adhoc* penyelenggara dengan memperhatikan pada ketaatan prosedur, keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*, Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*, dan keterwakilan 30% perempuan. **[Vide Bukti PK – 16.146]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 dan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berkenaan adanya pelanggaran serius yang memenuhi kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis di tingkat TPS tetapi juga terindikasi melibatkan struktur penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota, hingga KPU Provinsi. Indikasi kuat ini menunjukkan adanya pengaturan hasil pemilu secara terencana yang mencederai integritas demokrasi. **[Vide Bukti PK – 16.3] dan [Vide Bukti PK – 16.3.1]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-16.1 sampai dengan Bukti PK-16.146, sebagai berikut:

1. Bukti PK-16.1 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 Pada Hari Sabtu, Tanggal 7 Desember 2024 Pukul 11.34 WIB dengan Register Nomor 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
2. Bukti PK-16.2 : Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi Nomor: 736/PP.00.02/K.JI-38/12/2024 pada tanggal 8 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Bukti PK-16.3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.00.01/8/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Jawa Timur;
4. Bukti PK-16.3.1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 010/LHP/PM.00.01/9/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Jawa Timur;
5. Bukti PK-16.4 : Fotokopi Formulir Laporan dan tanda bukti penyampaian laporan Nomor

08/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12.03 Wib dengan register nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;

6. Bukti PK-16.5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 737/PP.00.02/K.JI-38/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
7. Bukti PK-16.6 : Fotokopi formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 09/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12.36 WIB dengan register nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
8. Bukti PK-16.7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 738/PP.00.02/K.JI-38/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
9. Bukti PK-16.8 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Kota Surabaya Nomor 07/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024;
10. Bukti PK-16.9 : Fotokopi Data Hasil Pencermatan Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pencermatan sejumlah 123 TPS untuk Kecamatan Bubutan yang telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Surabaya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Bubutan, antara lain:
    - Kelurahan Tembok Dukuh 34 TPS
    - Kelurahan Jepara 28 TPS
    - Kelurahan Gundi 34 TPS
    - Kelurahan Bubutan 18 TPS
    - Kelurahan Alun-Alun Contong 9 TPS
11. Bukti PK-16.10 : Fotokopi Dokumen Bawaslu Kota Surabaya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;

12. Bukti PK-16.11 : Fotokopi Dokumen Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024;
13. Bukti PK-16.12 : Fotokopi Dokumen Kajian Awal Bawaslu Kota Surabaya Nomor 08/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024;
14. Bukti PK-16.13 : Fotokopi Data Hasil Pencermatan Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pencermatan sejumlah 123 TPS untuk Kecamatan Gubeng yang telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Surabaya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Gubeng, antara lain :
    - Kelurahan Airlangga 14 TPS
    - Kelurahan Baratajaya 19 TPS
    - Kelurahan Gubeng 19 TPS
    - Kelurahan Kertajaya 22 TPS
    - Kelurahan Mojo 32 TPS
    - Pucang Sewu 17 TPS
15. Bukti PK-16.14 : Fotokopi Dokumen Bawaslu Kota Surabaya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;
16. Bukti PK-16.15 : Fotokopi Dokumen Bawaslu Kota Surabaya, Laporan Nomor 08/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
17. Bukti PK-16.16 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Kota Surabaya Nomor 09/PL/PW/Kota/16.01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
18. Bukti PK-16.17 : Fotokopi Data Hasil Pencermatan Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pencermatan sejumlah 145 TPS untuk Kecamatan Krembangan yang telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Surabaya terkait perbedaan perolehan pada MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR pada beberapa TPS di Kecamatan Krembangan, antara lain :
    - Krembangan Selatan 19 TPS
    - Morokrembangan 58 TPS
    - Dupak 28 TPS

- Perak Barat 18 TPS
- Kemayoran 22 TPS

19. Bukti PK-16.18 : Fotokopi Dokumen Bawaslu Kota Surabaya, Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;
20. Bukti PK-16.19 : Fotokopi Dokumen Bawaslu Kota Surabaya Laporan Nomor 09/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
21. Bukti PK-16.20 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor: 722/PM.01.01/K.JI/11/2024, tanggal 26 November 2024, perihal Imbauan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024;
22. Bukti PK-16.21 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
23. Bukti PK-16.22 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, pada proses penyerahan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR oleh 38 (tiga puluh delapan) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
24. Bukti PK-16.23 : Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor: 309/PM.00.01/K.JI/06/2024, tanggal 12 Juni 2024, perihal imbauan;
25. Bukti PK-16.24 :
    - Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.01/15/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;
    - Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.01/23/09/2024, tentang Rapat Pleno Tahapan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur;

26. Bukti PK-16.25 : Fotokopi surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 438/PM.00.01/K.JI/08/2024, tanggal 15 Agustus 2024, Perihal Saran Perbaikan;
27. Bukti PK-16.26 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 950/PL.02.1-SD/35/2024, tanggal 24 Agustus 2024, perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ke 1 (satu);
28. Bukti PK-16.27 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 587/PL.02.1-SD/35/2024 tanggal 31 Agustsu 2024, perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ke 2 (dua);
29. Bukti PK-16.28 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 428/PM.00.01/K.JI/09/2024, tanggal 23 September 2024, perihal Saran Perbaikan;
30. Bukti PK-16.29 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 950/PL.02.1-SD/35/2024, tanggal 3 Oktober 2024, perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
31. Bukti PK-16.30 : Fotokopi Dokumen jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
32. Bukti PK-16.31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 405/LHP/PM.01.02/JI.19 /04/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan;
33. Bukti PK-16.32 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Kabupaten Pamekasan;
34. Bukti PK-16.33 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 172/LHP/PM.01.02/JI.01/04 /XI/2024, tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
35. Bukti PK-16.34 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Kabupaten Bangkalan;
36. Bukti PK-16.35 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

090/LHP/PM.01.02/JI.15/06 /12/2024, tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto;

37. Bukti PK-16.36 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Kabupaten Mojokerto;
38. Bukti PK-16.37 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 140/LHP/PM.01.02/JI-06/04/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Gresik;
39. Bukti PK-16.38 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Kabupaten Gresik;
40. Bukti PK-16.39 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 020/LHP/PM.01.02/JI.07/ 05/XII/2024, tanggal 5 November 2024, Bawaslu Kabupaten Jember;
41. Bukti PK-16.40 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Jember;
42. Bukti PK-16.41 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 135/LHP/PM.01.02/JI.08/03 /XII/2024, tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Jombang;
43. Bukti PK-16.42 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Jombang;
44. Bukti PK-16.43 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 190/LHP/PM.01.02/K.JI-32/3/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kota Kediri;
45. Bukti PK-16.44 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kota Kediri;
46. Bukti PK-16.45 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor 111/LHP/PM.01.02/ JI.33/04/ XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kota Madiun;
47. Bukti PK-16.46 : Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kota Madiun;
48. Bukti PK-16.47 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 201/LHP/PM.01.02/

			Jl.34/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kota Malang;
49.	Bukti PK-16.48	:	Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kota Malang;
50.	Bukti PK-16.49	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 119/LHP/PM.01.02/Jl.35/I/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kota Mojokerto;
51.	Bukti PK-16.50	:	Fotokopi Dokumen FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kota Mojokerto,
52.	Bukti PK-16.51	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.02.17.2006.07/27/XI/2024 anggal 27 November 2024, Pengawas TPS 07, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
53.	Bukti PK-16.52	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 183/LHP/PM.01.02/Jl.02.17/29/XI/2024, tanggal 29 November 2024 Panwas Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
54.	Bukti PK-16.53	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 105/LHP/PM.01.02/Jl.02/04/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 Kabupaten Banyuwangi;
55.	Bukti PK-16.54	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.02.18.2007.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 09, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
56.	Bukti PK-16.55	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 147/LHP/PM.01.02/Jl.02.18/29/XI/2024, tanggal 29 November 2024 Panwas Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
57.	Bukti PK-16.56	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/Jl.05.35.11.11.2001.07/27/I/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

58. Bukti PK-16.57 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 085/LHP/PM.01.02/JI.05.35.11.11/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
59. Bukti PK-16.58 : Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.11.14.2015.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
60. Bukti PK-16.59 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 130/LHP/PM.01.02/JI.11.14/30/XI/2024, tanggal 30 November 2024, Panwas Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
61. Bukti PK-16.60 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.24.01.2019.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Pengawas TPS 02, Desa Segodo Bancang, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
62. Bukti PK-16.61 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.24.17.2012.04/27/XI/2024, tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
63. Bukti PK-16.62 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.24.17/30/XI/2024, tanggal 30 November 2024 Panwas Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
64. Bukti PK-16.63 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2011.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Buddi, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
65. Bukti PK-16.64 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 02/LHP/PM.01.02-Jl.26.24.2022.07/27/XI/2024, tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Angonangon, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
66. Bukti PK-16.65 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.04.13.2002.1/27/XI/2024,

tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Mayangkawis, Kecamatan balen, Kabupaten Bojonegoro;

67. Bukti PK-16.66 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 127/LHP/PM.01.02/JI.04.13/30/XI/2024, tanggal 30 November 2024 Panwas Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
68. Bukti PK-16.67 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.04.14.2015.4/27/XI/2024, tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
69. Bukti PK-16.68 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 102/LHP/PM.01.02/JI.04.14/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Panwas Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
70. Bukti PK-16.69 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
71. Bukti PK-16.70 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
72. Bukti PK-16.71 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
73. Bukti PK-16.72 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
74. Bukti PK-16.73 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.05/27/XI/2024

tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

75. Bukti PK-16.74 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2016.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

76. Bukti PK-16.75 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

77. Bukti PK-16.76 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.02/27/XI/2024, tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

78. Bukti PK-16.77 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

79. Bukti PK-16.78 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

80. Bukti PK-16.79 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

81. Bukti PK-16.80 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

82.	Bukti PK-16.81	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
83.	Bukti PK-16.82	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
84.	Bukti PK-16.83	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
85.	Bukti PK-16.84	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
86.	Bukti PK-16.85	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
87.	Bukti PK-16.86	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
88.	Bukti PK-16.87	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2015.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa NEPA, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
89.	Bukti PK-16.88	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nom Nomor or 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa PLANGGARAN TIMUR, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

90.	Bukti PK-16.89	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa PLANGGARAN TIMUR, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
91.	Bukti PK-16.90	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa PLANGGARAN TIMUR, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
92.	Bukti PK-16.91	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
93.	Bukti PK-16.92	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
94.	Bukti PK-16.93	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
95.	Bukti PK-16.94	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
96.	Bukti PK-16.95	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa TEBANAH, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

97.	Bukti PK-16.96	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2008.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
98.	Bukti PK-16.97	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2008.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
99.	Bukti PK-16.98	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2008.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
100.	Bukti PK-16.99	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
101.	Bukti PK-16.100	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
102.	Bukti PK-16.101	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
103.	Bukti PK-16.102	:	Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;

104. Bukti PK-16.103 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
105. Bukti PK-16.104 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
106. Bukti PK-16.105 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
107. Bukti PK-16.106 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.06.2014.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
108. Bukti PK-16.107 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.06.2014.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
109. Bukti PK-16.108 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.06.2014.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
110. Bukti PK-16.109 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.06.2014.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

111. Bukti PK-16.110 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
112. Bukti PK-16.111 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
113. Bukti PK-16.112 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
114. Bukti PK-16.113 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 08, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
115. Bukti PK-16.114 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 09, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
116. Bukti PK-16.115 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.10/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 10, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
117. Bukti PK-16.116 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.11/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 11, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

118. Bukti PK-16.117 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.01.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
119. Bukti PK-16.118 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.02.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
120. Bukti PK-16.119 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.03.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
121. Bukti PK-16.120 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.04.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
122. Bukti PK-16.121 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.05.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
123. Bukti PK-16.122 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.06.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
124. Bukti PK-16.123 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2003.07.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

125. Bukti PK-16.124 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.01.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
126. Bukti PK-16.125 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.02.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
127. Bukti PK-16.126 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.03.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
128. Bukti PK-16.127 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.04.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
129. Bukti PK-16.128 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.05.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
130. Bukti PK-16.129 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.06.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 06, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
131. Bukti PK-16.130 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.07.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 07, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

132. Bukti PK-16.131 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.12.2005.08.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 08, Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
133. Bukti PK-16.132 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
134. Bukti PK-16.133 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.002/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 02, Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
135. Bukti PK-16.134 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.003/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
136. Bukti PK-16.135 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.004/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
137. Bukti PK-16.136 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 01, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
138. Bukti PK-16.137 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 202 Pengawas TPS 02, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
139. Bukti PK-16.138 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 03, Desa

Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;

140. Bukti PK-16.139 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 04, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;

141. Bukti PK-16.140 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.05/27/XI/2024, tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 05, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;

142. Bukti PK-16.141 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02JI/23.10.2010.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Pengawas TPS 06, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;

143. Bukti PK-16.142 : Fotokopi Dokumen surat Imbauan kepada PJ. Gubernur Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 179/PM.00.01/K.JI/04/2024, tanggal 3 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

144. Bukti PK-16.143 : Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Netralitas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, melalui Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 897/PM.00/K1/06/2024, pada tanggal 11 Juni 2024, perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;

145. Bukti PK-16.144 : Fotokopi Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Timur dan Link Youtube Bawaslu Provinsi Jawa Timur Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Timur di Hotel Majapahit https://www.youtube.com/live/S75Q5R4fOWc?si=exJ7zCmxIW8RLwpW;

146. Bukti PK-16.145 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 215/PM.00.01/K.JI/04/2024, tanggal 30 April 2024, perihal Imbauan Rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

147. Bukti PK-16.146 : Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebatas perselisihan mengenai penghitungan suara, bukan tentang pelanggaran sengketa prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif (sengketa proses Pilkada), sedangkan permasalahan Pemohon bukan merupakan

perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024, Pukul 21.30 WIB, (selanjutnya disebut Keputusan KPU 63/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan

melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 63/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai tenggang waktu masih memenuhi adalah tidak tepat, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil penghitungan suara, sedangkan pokok permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif Pilkada.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 63/2024, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan eksepsi Pihak Terkait

mengenai tenggang waktu yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan telah Mahkamah jelaskan pada Subparagraf **[3.2.2]** di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur *(obscuur)* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Petitum untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak didukung dengan alasan-alasan dalam posita;
2. Pertentangan antara posita dengan petitum permohonan;
3. Pertentangan antar-petitum;
4. Pemohon tidak menguraikan bagaimana terjadinya “penurunan suara Pemohon”;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang didalikan Pemohon diwarnai dengan pelanggaran dan manipulasi sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Sementara terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dugaan manipulasi persentase perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 dalam Sirekap yang stabil pada angka 58,54% (lima puluh delapan koma lima puluh empat persen);
2. Dugaan manipulasi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dengan cara menghapus perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 dan mengirimkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal;
3. Pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90-100% dari DPT; ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dengan jumlah pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup)/Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako); perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 suara sampai 0 suara;
4. Total suara tidak sah Pilgub yang sangat tinggi, mencapai 1.204.610 suara atau 5.5% (lima koma lima persen), dan suara tidak sah Pilgub lebih besar dari suara tidak sah Pilbup/Pilwako terutama di daerah di mana Paslon Nomor Urut 2 memeroleh lebih dari 50% di TPS-TPS;

5. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan EMIL ELESTIANTO DARDAK** karena telah melakukan pelanggaran secara Terstuktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	**Nama Pasangan Calon**	**Perolehan Suara**
1	**Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si**	**1.797.332** (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
3	**Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES**	**6.743.095** (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)

Atau

5. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di seluruh TPS se Provinsi Jawa Timur yang dikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. **Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si & H. Lukmanul Khakim, M.Si** dan Pasangan calon dengan nomor urut 3. **Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T dan ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES** dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan EMIL ELESTIANTO DARDAK.**
6. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk Melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-189 (sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-106, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43, dan Bukti PK-16.1 sampai dengan Bukti PK-16.146], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal terjadi manipulasi persentase perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dalam Sirekap yang stabil pada angka 58,54% (lima puluh delapan koma lima puluh empat persen), Pemohon telah mengajukan Bukti P-176 sampai dengan Bukti P-178;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-7; Bukti PT-6 dan Bukti PT-7; Bukti PK-16.3, Bukti PK-16.3.1 dan Bukti PK-16.21] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa persentase perolehan suara pada Sirekap yang selalu stabil pada angka tertentu yang didalilkan Pemohon bukan tidak mungkin terjadi, di mana persentase suara masing-masing pasangan calon yang ditampilkan seakan-akan tidak berubah dari waktu ke waktu. Namun hal demikian tidak serta merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data, karena selain Sirekap berbasis pada data riil yang disampaikan dari masing-masing TPS, namun *load* data yang masuk pada sistem juga tidak bisa diatur sedemikian rupa, terlebih Pilgub Jawa Timur bukanlah lingkup wilayah yang kecil. Selain itu masing-masing TPS membutuhkan waktu yang bervariasi untuk menyelesaikan penghitungan suaranya dan mengunggahnya pada Sirekap. Andaipun benar stabilnya persentase perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 pada Sirekap merupakan manipulasi, *quod non*, Pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya bahwa manipulasi pada Sirekap juga terjadi pada penghitungan

suara riil yang dilakukan Termohon yang kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkatan di atasnya. Terkait sistem informasi yang digunakan oleh Termohon dalam pemilihan pejabat publik, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah berpandangan bahwa Sirekap yang merupakan perangkat aplikasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Data yang ada pada Sirekap justru disesuaikan dari data penghitungan/rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali maupun kendala teknis pada Sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian memengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang maka tidak terbukti pula manipulasi Sirekap yang didalikan Pemohon. Terlebih, penentuan suara akhir tidak didasarkan pada suara dalam Sirekap tetapi didasarkan pada perhitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara secara manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai manipulasi persentase perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dalam Sirekap yang stabil pada angka 58,54% (lima puluh delapan koma lima puluh empat persen), adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal telah terjadi manipulasi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dengan cara: a) menghapus perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 dan b) mengirimkan dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal, Pemohon mengajukan Bukti P-187.1 sampai dengan Bukti P-187.5 dan Bukti P-188.1 sampai dengan Bukti P-188.60.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-7; Bukti PT-8; Bukti PK-16.3, Bukti PK-16.3.1, Bukti PK-16.20 sampai dengan Bukti PK-16.23,] dan fakta

yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati bahwa bukti-bukti Pemohon memang memperlihatkan adanya pembetulan menggunakan tip-ex yang mengkoreksi bagian perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 [vide Bukti P-187.1 sampai dengan Bukti P-187.5], Mahkamah juga mendapati adanya dua versi Formulir Model C.Hasil KWK-Gubernur di 30 TPS di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang berbeda tanggal formulirnya, yaitu bertanggal 27 November 2024 pada Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur yang menurut Pemohon merupakan versi awal, sedangkan versi susulan bertanggal 28 November 2024 [vide Bukti P-188.1 sampai dengan Bukti P-188.60]. Terhadap fakta hukum yang termuat dalam bukti-bukti tersebut Mahkamah kemudian memeriksa dengan saksama dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, namun Mahkamah tidak menemukan penjelasan bagaimana kronologi terjadinya pembetulan Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur dengan menggunakan tip-ex dan bagaimana bisa terdapat Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur ganda di 30 TPS di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Mahkamah menilai Pemohon tidak secara jelas menguraikan dalilnya, sehingga Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memberikan keterangan yang cukup dan relevan untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi berkenaan dengan permohonan *a quo*.

Bahwa kemudian Mahkamah menilai bukti yang disampaikan oleh Pemohon, meskipun memang terlihat ada pembetulan dengan menggunakan tip-ex pada Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur yang tidak sesuai dengan pedoman yang diatur Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) yang pada pokoknya menyatakan pembetulan dilakukan dengan mencoret dengan dua garis horizontal. Namun demikian, Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi Pemohon bertandatangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur yang dibetulkan dengan tip-ex merupakan hasil manipulasi perolehan suara apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu.

Bahwa demikian halnya bukti-bukti Pemohon terkait dengan adanya dua versi Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur di 30 TPS di Kecamatan Konang dan

Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang didalilkan dimanipulasi, Mahkamah juga menemukan bahwa Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur yang selanjutnya direkapitulasi dalam Formulir Model D.Hasil KWK-Gubernur adalah yang merupakan versi susulan bertanggal 28 November 2024 [vide Bukti P-186.51 dan Bukti P-186.52], meskipun Mahkamah juga tidak bisa menilai apakah rekapitulasi menggunakan Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur bertanggal 28 November 2024 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, karena ketidakjelasan dalil dan kronologis dari peristiwa hukum dimaksud. Namun demikian oleh karena bukti-bukti Pemohon memperlihatkan saksi Pemohon bertandatangan pada sebagian besar Formulir Model C.Hasil KWK-Gubernur yang dianggap versi susulan, dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun Formulir Model C.Hasil.KWK-Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi, *quod non*, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan untuk memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dengan cara menghapus perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 dan dengan mengirimkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90-100% dari DPT; ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbup/Pilwako; perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 suara sampai 0 suara, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-173; Bukti P-181.1 sampai dengan Bukti P-181.2; Bukti P-181.1 sampai dengan Bukti P-181.358; Bukti P-182.1 sampai dengan Bukti P-182.2; Bukti P-183.1 sampai dengan Bukti P-183.266.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait,

keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-105; Bukti PT-5.1 sampai dengan Bukti PT-5.66, Bukti PT-9, Bukti PT-10.1 sampai dengan Bukti PT-10.21; Bukti PK-16.20 sampai dengan Bukti PK-16.140] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih, ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbup/Pilwako, serta perolehan suara Pemohon yang sangat rendah di sejumlah TPS tentu akan berpengaruh pada perolehan masing-masing pasangan calon, namun fenomena demikian bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi, dan jikapun terjadi tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Seperti halnya partisipasi pemilih yang mencapai 100% dari DPT, kemungkinan demikian telah diantisipasi penyelenggara pemilihan dengan adanya surat suara cadangan sebanyak 2,5% yang digunakan selain sebagai pengganti jika ada yang rusak/keliru tercoblos, juga digunakan untuk pemilih pindahan dan pemilih tambahan, bahkan jika surat suara cadangan tidak cukup maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia [vide Pasal 21 PKPU 17/2024]. Selain itu, dari jawaban Termohon diketahui bahwa di beberapa TPS yang dipermasalahkan Pemohon, jumlah pemilih sampai 100% DPT terjadi karena kesalahan menuangkan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form Model C.Hasil-KWK-Gubernur namun telah dilakukan perbaikan oleh KPPS pada saat itu juga [vide Bukti T-8, sampai dengan Bukti T-16, Bukti T-23, sampai dengan Bukti T-32], sebagaimana juga diterangkan Bawaslu dalam keterangannya [vide Bukti PK-16.51 sampai dengan Bukti PK-16.68]. Selain itu beberapa TPS yang didalilkan partisipasinya mencapai 100% menurut keterangan Termohon ternyata tidak mencapai 100% [vide Bukti T-10, Bukti 11, Bukti T-25, Bukti T-26]. Menurut Mahkamah tidak bisa pula dipastikan di TPS yang partisipasinya mencapai 90%-100% merugikan perolehan suara Pemohon ataupun menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana Pihak Terkait membuktikan bahwa Pemohon menang di beberapa TPS yang pemilihnya mencapai 90%-100% dari DPT [vide Bukti PT-10.1 sampai dengan Bukti PT-10.21].

Bahwa demikian pula dengan dalil jumlah pemilih Pilgub yang lebih banyak dari pemilih Pilbup/Pilwako, menurut Mahkamah hal demikian dapat saja terjadi karena pemilih pindahan atau pemilih tambahan yang hanya bisa memilih pada pemilihan gubernur, atau sebagaimana diterangkan Bawaslu dalam keterangannya bahwa jumlah pemilih DPT pada Pilgub lebih besar dari pada jumlah

Pilbup/Pilwako karena adanya TPS Lokasi khusus seperti Lapas atau Pesantren, sehingga pemilih Pilgub akan lebih banyak dari pada Pilbub/Pilwako [vide Bukti PK-16.24]. Apalagi terkait dengan perolehan suara Pemohon yang sangat rendah di beberapa TPS hanya mencapai 30 suara sampai 0 suara, hal itu sangat mungkin terjadi jika memang TPS dimaksud memang bukan berada di basis pendukung Pemohon, demikian sebaliknya jika sebuah TPS bukan berada di daerah basis pendukung Pihak Terkait, sangat dimungkinkan perolehan suara Pihak Terkait sangat rendah, sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait bahwa terdapat TPS-TPS di mana perolehan suara Pihak Terkait 0 suara [vide Bukti PT-5.1 sampai dengan Bukti PT-5.66]. Oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah fenomena yang didalilkan demikian terjadi secara melawan hukum atau karena ada manipulasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbup/Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara Pemohon yang sangat rendah di beberapa TPS, namun Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum, kalaupun benar terjadi bagaimana proses terjadinya, dan siapa yang melakukan manipulasi demikian. Hal demikian menyebabkan Pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar terjadi dan jikapun terjadi, *quod non*, tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90-100% dari DPT; ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbup/Pilwako; perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 suara sampai 0 suara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi, mencapai 1.204.610 suara atau 5.5% (lima koma lima persen), dan suara tidak sah Pilgub lebih besar dari Pilbup/Pilwako, Pemohon mengajukan Bukti P-184.1 sampai dengan Bukti P-184.2; Bukti P-185.1 sampai dengan Bukti P-185.2.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-7; Bukti PK-16.3, Bukti PK-16.3.1, Bukti PK-16.21, PK-16.30] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai keabsahan surat suara telah jelas diatur dalam Pasal 35 PKPU 17/2024 yang menyebutkan:

(1) Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:
   a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
   b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.

(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
   a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
   b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
   c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
   d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

Sehingga jika tidak memenuhi ketentuan di atas, maka surat suara harus dinyatakan tidak sah. Persoalan yang Pemohon dalilkan adalah tingginya jumlah surat suara tidak sah pada Pilgub Jawa Timur yang dinilai tidak wajar. Terhadap hal ini menurut Mahkamah, Pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah, apakah surat-surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 PKPU 17/2024 ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Karena surat suara yang tidak sah memang secara hukum harus dinyatakan tidak sah, karena jika surat suara tidak sah justru dianggap sah juga merupakan pelanggaran hukum. Selain itu berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK

terkait dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. Padahal jika tingginya surat suara tidak sah memang dianggap tidak wajar sejak awal penghitungan suara seharusnya saksi-saksi Pemohon di TPS sudah mengajukan keberatan. Dengan demikian menurut Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahakamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon. Terlebih, jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi, mencapai 1.204.610 suara atau 5.5%, dan suara tidak sah Pilgub lebih besar dari Pilbup/Pilwako adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu, Pemohon mangajukan Bukti P-174, Bukti P-175.1 sampai dengan Bukti P-175.3.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-7, Bukti PT-12 sampai dengan PT-18, Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-24, Bukti PK-16.142 sampai dengan Bukti PK- 16.144] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018) yang menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pasal 3 Permensos 1/2018 kemudian memberikan batasan sasaran yang dapat menerima Bansos PKH yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan,

dan/atau kesejahteran sosial. Dengan demikian, penerima Bansos PKH harus terlebih dahulu terdaftar dan juga dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan komponen yang diatur dalam Pasal 5 Permensos 1/2018. Sehingga tidak semua masyarakat meskipun tergolong miskin dan rentan dapat menerima Bansos PKH. Selain itu, Pasal 37 Permensos 1/2018 menegaskan bahwa penyaluran Bansos PKH dilakukan secara non-tunai secara bertahap dalam 1 tahun melalui bank penyalur. Dengan demikian Bansos PKH tidak serta merta dapat dibagikan apalagi pada masyarakat tertentu yang terkait sebagai pendukung salah satu pasangan calon, namun dibagikan kepada sasaran penerima yang telah terdaftar dan tervalidasi. Karena penyalurannya yang dilakukan dengan cara nontunai maka tidak ada temu muka antara pemberi dan dan penerima bansos yang memungkinan untuk melakukan kampanye terselubung yang dapat memengaruhi penerima bansos PKH untuk memilih salah satu pasangan calon. Jikapun masyarakat penerima bansos berasumsi bahwa Bansos PKH yang diterimanya berasal dari salah satu pasangan calon lalu terpengaruh untuk memilih pasangan calon dimaksud, tidak dapat dipastikan siapa pasangan calon yang dipilihnya. Apakah penerima bansos berasumsi bahwa bansos terafiliasi dengan Paslon Nomor Urut 2 sebagai petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, ataukah justru memilih Pemohon yang calon Gubernurnya dikenal masyarakat sebagai Menteri Sosial pada pemerintahan sebelumnya. Pandangan demikian menurut Mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh Pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara Bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon, dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dan dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos dalam memilih. Terlebih Bawaslu dalam keterangan tertulisnya telah menerangkan bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Jawa Timur tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK berkenaan adanya Bansos PKH [vide Bukti PK-16.3 dan Bukti PK-16.3.1], sebagaimana juga jawaban Termohon yang menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah mendengar adanya laporan pelanggaran terkait pembagian Bansos PKH.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan penyaluran Bansos PKH telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024?
2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015,

> “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024,

"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b. ...; dst

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024,

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. ...; dst

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Tri Rismaharani M.T., dan Zahrul Azhar Asumta, S.Ip., M.Kes., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Tri Rismaharani M.T., dan Zahrul Azhar Asumta, S.Ip., M.Kes., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-5 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016 menyatakan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur adalah 41.714.928 jiwa, sehingga selisih perolehan suara

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 20.732.592 suara (total suara sah) = 103.663 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.743.095 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 12.192.165 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 12.192.165 suara - 6.743.095 suara = 5.449.070 suara (setara dengan 26,3%) atau lebih dari 103.663 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.8] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,

Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis,** tanggal **tiga puluh,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **empat,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **21.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Ridwan Mansyur**
ttd.	**ttd.**
Arsul Sani	**Anwar Usman**
ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.